

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGHIJAUAN WILAYAH KOTA MALANG
MELALUI PROGRAM MALANG IJO ROYO-ROYO (MIRR) DALAM
MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**(STUDI ANALISIS METODE *SYSTEMS THINKING* PADA
PENGHIJAUAN WILAYAH KOTA MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ASRAWANI TAMBUNAN

NIM. 0810310020



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2012

MOTTO

“Bertakwalah Pada Allah Maka Allah Akan Mengajarimu. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.”

(QS Al-Baqarah:282)

*“Rahmat Sering Datang Kepada Kita Dalam Bentuk Kesakitan,
Kehilangan Dan Kekecewaan, Tetapi Kalau Kita Sabar, Kita Segera
Akan Melihat Bentuk Aslinya.”*

(Joseph Addison)



TANDA PENGESAHAN

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Juli 2012
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Asrawani Tambunan
Judul : Evaluasi Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) Dalam Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan. (Studi Analisis Metode *Systems Thinking* Pada Penghijauan Wilayah Kota Malang)
Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Ketua

Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota

Fadillah Putra, S.Sos, M.Si
NIP. 19740627 200312 1 001

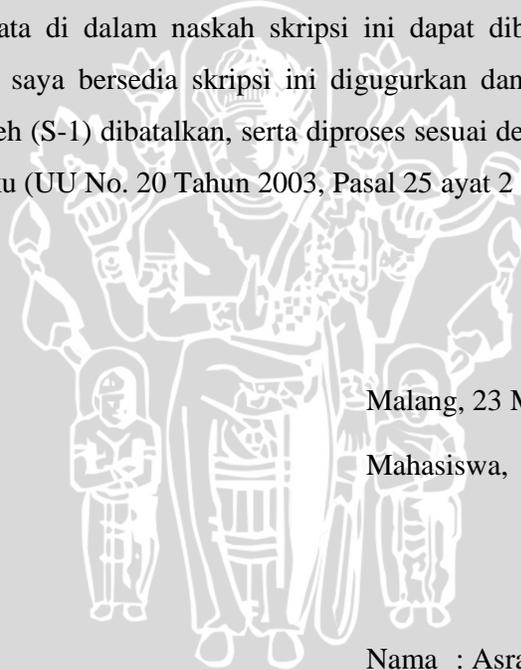
Anggota

Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19580320 198701 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, 23 Mei 2012

Mahasiswa,

Nama : Asrawani Tambunan

NIM : 0810310020

RINGKASAN

Asrawani Tambunan, 2012, **Evaluasi Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) dalam Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Analisis Metode *Systems Thinking* pada Penghijauan Wilayah Kota Malang)**, Nama Pembimbing Utama Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Pendamping Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff. 177 hal. + xv

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Malang, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau akibat dari pembangunan yang semakin pesat dan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pemanasan global (*global warming*) yang terjadi di bumi. Untuk itu pemerintah memformulasikan sebuah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang asri sehat dan indah, yaitu penghijauan. Kebijakan penghijauan tersebut akan dianalisis menggunakan analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian). Dengan menggunakan analisis *monitoring*, maka akan dapat menemukan permasalahan, alternatif pemecahan masalah dan langkah-langkah penyelesaian sebagai “koreksi dini” agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Sedangkan evaluasi untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode yang relevan.

Penelitian ini menurut jenis pendekatannya merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *systems thinking*, yaitu suatu metode pemecahan masalah yang didahului dengan identifikasi masalah secara komprehensif, memperhatikan dinamika berbagai faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem, sehingga solusi yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan inti atau sumber permasalahan dengan tepat. Untuk mempermudah simulasi model *systems thinking*, maka penelitian ini menggunakan bantuan *software vensim*.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi dan *monitoring* melalui metode *systems thinking* menunjukkan adanya variabel-variabel dalam sistem kebijakan penghijauan yang merupakan mekanisme kontrol dari kebijakan tersebut, yang mempengaruhi sistem secara positif (*positif link*) maupun yang mempengaruhi secara negatif (*negatif link*) dan membentuk suatu sub sistem (*loop*) dari *causal*

loop diagram. Dari hasil identifikasi diperoleh variabel kunci (utama)/variabel pengungkit (*leverage*), yaitu Malang Ijo Royo-Royo (MIRR), yang kemudian dijadikan sebagai rekomendasi terhadap permasalahan lingkungan di wilayah Kota Malang untuk kedepannya.

MIRR sebagai rekomendasi dalam penelitian ini membuat suatu skenario kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sistem agar mengalami *Effectiveness* atau ketercapaian tujuan atau *goal*. Skenario kebijakan yang pertama adalah skenario kebijakan penghijauan melalui MIRR dengan optimalisasi perlombaan lingkungan hidup, dan skenario kedua adalah menjadikan MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat. Skenario MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi perlombaan lingkungan hidup dapat memacu masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan, karena memberikan motivasi berupa *reward* yang akan diperoleh dari perlombaan tersebut. Skenario MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat memungkinkan pemerintah untuk dapat berhadapan langsung dengan berdiskusi terkait isu lingkungan, sehingga permasalahan terkait kerusakan lingkungan tersebut dapat diminimalisir dan dicegah.

Analisis metode *systems thinking* tidak hanya berusaha memahami secara aktual mengenai obyek penelitian dengan mengidentifikasi faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik yang dapat memperbaiki perilaku sistem melalui pemodelan *causal loop diagram* (CLD). Analisis Metode *systems thinking* merupakan metode yang penting dalam memformulasikan kebijakan publik. Dengan menggunakan analisis metode *systems thinking*, kebijakan publik yang dihasilkan akan memiliki tujuan yang jelas.

SUMMARY

Asrawani Tambunan, 2012, **Evaluation Of Greening Policy of Malang City Region By Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) Program in Creating Sustainable Development (Analysis Of Study Systems Thinking Method in Greening Region Of Malang City)**, The main Supervisor name, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Co-Supervisor, Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff. 177 Pages + xv.

The research was motivated by the environmental damage in the city of Malang, such as decrease of open green spaces resulting from the rapid development, and also as a form awareness of global warming that occurs on earth. Therefore, the government formulated a policy with environmental development in order to keep the environment healthy and beautiful lush, by greening. Greening policies will be analyzed using analysis of monitoring and evaluation. By using the analysis of monitoring, it will be able to find the problem, alternative solutions and the steps solution as "an early correction" so that the implementation of activities operate efficiently, effectively and timely. While the evaluation analysis, to measure objectively and give value for the achievement of the results of the implementation of programs / activities have been planned and systematically conducted and objectively by using the relevant method.

This research is according to the type of the approach qualitative research. While the method of analysis used in this research is the method of systems thinking, which is a method of solving problems that are preceded by the identification of problems comprehensively, paying attention to the dynamics of many factors involved that affect each other in a system, so that the resulting solution will be able to complete the core or source of the problem appropriately. To simplify the simulation model of systems thinking, this research uses the help of vensim software.

Based on the analysis of evaluation and monitoring by systems thinking methods indicate a variables in the system of policy which is the greening of the policy control mechanisms, which affect positively (positive link) or negatively affect (negative link) and form a sub-system (loop) of the causal loop diagram. From the results obtained by the identification of key variables (primary) / variable leverage, which is Malang Ijo Royo-Royo (MIRR), which then used as a recommendation to the environmental problems in the region of Malang city for the future.

MIRR as a recommendation in this research makes a policy scenario that is used to realize the performance of the system to have Effectiveness or achievement goals. The first scenario is the policy of greening policy scenarios by optimization MIRR to the competition the environment and the second scenario is to make the MIRR as greening policies by optimizing the socialization of society. MIRR as a greening policy scenarios by optimization competition environmental can stimulate people to be more concerned with the environment, because it provides the motivation of rewards that will be obtained from these events. MIRR as a greening policy scenarios by optimization socialization of the community allows the government to be able to deal directly with the discussion of issues related to environment, so that problems related environmental damage can be minimized and prevented.

Analysis method of systems thinking, not just trying to understand an actual the object of research by identifying the factors involved that affect each other in a system, but also provide a better policy recommendations that can improve the system behavior by modeling causal loop diagram (CLD). Methods of analysis systems thinking is an important method in formulating public policy. By using the systems thinking method analysis, the resulting public policy will have a clear purpose.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) dalam Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Analisis Metode Sisytems Thingking Pada Penghijauan Wilayah Kota Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan, Staf dan Karyawan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
8. Seluruh Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
9. Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 23 Mei 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	11
Tujuan Penelitian	12
Kontribusi Penelitian	12
Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
Kebijakan Publik	17
Pengertian Kebijakan Publik	17
Analisis Kebijakan Publik	21
Implementasi Kebijakan Publik	24
Efektivitas Implementasi Kebijakan	25
Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	26
Penataan Ruang	30
Penghijauan Lingkungan	31
Peran Pemerintah Daerah	38
Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup.....	38
Hubungan <i>Systems Thinking</i> dengan Kebijakan Penghijauan	40
Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR).....	45
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang	46

Kebijakan Penghijauan Melalui Program MIRR untuk Menciptakan
Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Administrasi Publik..... 47

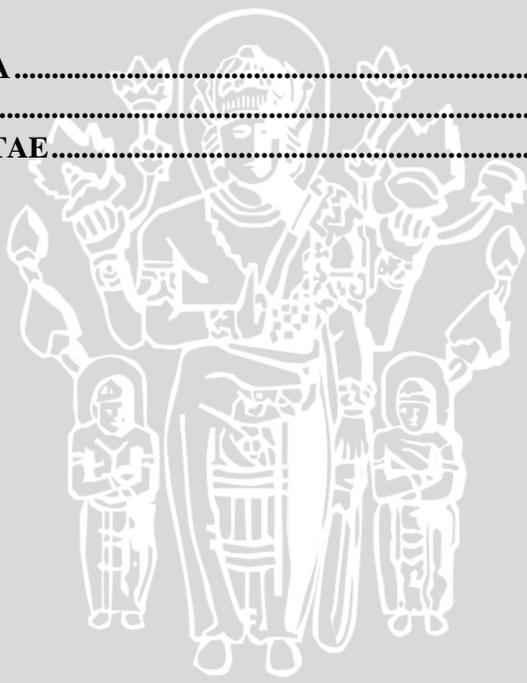
BAB III METODE PENELITIAN 51

Jenis Penelitian	51
Fokus penelitian	55
Lokasi dan Situs Penelitian	56
Jenis dan Sumber Data	58
Teknik Pengumpulan Data	59
Instrumen Penelitian	60
Metode Analisis Data.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 67

Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
Gambaran Umum Kota Malang	67
Topografi.....	68
Iklim.....	68
Gambaran Umum Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang.....	69
Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	72
Struktur Organisasi	75
SDM Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	79
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Malang	80
Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	96
Data Analisis Sistem Dari Kebijakan Penghijauan Kota Malang.....	100
Data Faktor Pendukung (<i>Positive Links</i>) dan Penghambat (<i>Negative Links</i>) Pelaksanaan Penghijauan Wilayah Kota Malang	112
Data Pelaksanaan Program MIRR	118
Analisis dan Interpretasi.....	121
Analisis <i>Systems Thinking</i> dari Kebijakan Penghijauan Kota Malang	121
<i>Story Line</i> (Alur Cerita) Kegiatan Penghijauan Oleh Pemerintah Kota Malang.....	123
Alur Cerita (<i>Story Line</i>) Program Malang Ijo Royo – Royo.....	128
Alur Cerita (<i>Story Line</i>) Program Malang Berbunga.....	130
Model <i>Systems Thinking</i> Kebijakan Penghijauan Kota Malang	140
Faktor Pendukung (<i>Positive Links</i>) dan Penghambat (<i>Negative Links</i>) Pelaksanaan Penghijauan Wilayah Kota Malang	145
Rekomendasi Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Dalam Model <i>Systems Thinking</i>	152

Identifikasi Variabel Kunci/Variabel Pengungkit.....	154
Pengujian MIRR Sebagai Suatu Kebijakan Penghijauan Melalui Skenario – Skenario Kebijakan Yang Ditawarkan.....	158
MIRR Sebagai Kebijakan Melalui Optimalisasi Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan Hidup.....	158
MIRR Sebagai Kebijakan Melalui Optimalisasi Sosialisasi Terhadap Masyarakat.....	159
Rekomendasi Model <i>Causal Loop Diagram</i> Program MIRR Sebagai Suatu Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang	161
BAB V PENUTUP.....	169
Kesimpulan	169
Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN.....	177
CURRICULUM VITAE.....	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
	Penggunaan Lahan dan Jumlah Penduduk Kota Malang Pada Tahun 2000 dan 2004	6
	Jumlah Personil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	79
	Pengembangan Gerakan Penghijauan di Tiga Bidang	101
	Data CSR 2010	105
	Data CSR 2011	107
	Data Taman Kota, Hutan Kota, Kebun Bibit yang Dikelola Pemerintah Kota Malang Tahun 2010.....	109
	Data Taman Kota Milik Pemerintah Kota Malang yang Dikelola Masyarakat tahun 2010	111
	Tahapan Gerakan MIRR 2004-2008	118
	Pemetaan <i>story line</i> (alur cerita) Kebijakan Penghijauan Kota Malang dari Tahun 2004-sekarang	133



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
	Siklus Kebijakan	20
	Model <i>Causal Loop Diagram</i> Kebijakan Penghijauan Kota Malang	45
	Model Sistem	52
	Peta Wilayah Kota Malang	69
	Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	78
	Pelibatan Kegiatan MIRR	102
	Mekanisme Permohonan Pemotongan Pohon	117
	<i>Causal Loop Diagram</i> (CLD) Kebijakan Penghijauan Kota Malang	142
	Diagram Uses Tree Malang Ijo Royo-Royo (MIRR)	155
	Diagram <i>Causes Tree</i> Malang Ijo Royo-Royo (MIRR)	155
	Diagram <i>Uses Tree</i> Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).....	156
	Diagram <i>Causes Tree</i> Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)..	156
	<i>Causal Loop Diagram</i> MIRR sebagai kebijakan Penghijauan wilayah Kota Malang.....	166



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
	Hasil Dokumentasi	177
	Daftar Wawancara	179
	Surat Ijin Penelitian Riset	181



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang maju dan sejahtera dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional, proporsi penduduk di wilayah *urban* berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi, produktivitas tinggi yaitu modal usaha yang dihimpun melalui tabungan. Untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera tersebut membutuhkan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan prinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan sumber daya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-

kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang mana harus didukung melalui kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi memiliki landasan yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Peranan pembangunan dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan fungsi pelestarian pengelolaan lingkungan hidup yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terlindungi dan terbuka dan dapat mengurangi terjadinya konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Adapun peraturan terkait lingkungan hidup diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Dalam usaha pencapaian ke arah pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah sebagai penentu kebijakan pembangunan, menerapkan program penghijauan. Pada era otonomi daerah program ini didesentralisasikan kepada daerah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tanggung jawab yang besar. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan tersebut, maka diperlukan peran serta seluruh aspek

kehidupan dan disini manusialah yang menjadi tulang punggung dalam kelestarian lingkungan hidup.

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar, kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan memberikan jasa secara langsung kepada konsumen seperti udara yang segar, zat-zat yang diperlukan tubuh dari makanan dan minuman, perlindungan (pakaian), pemandangan dan panorama yang indah, serta jasa lain yang tidak terhitung. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (*over exploitation*) dan pemanfaatan yang semena-mena (*irrational use*) baik untuk produksi dan konsumsi akan mengurangi kemampuan daya dukung alam bagi pembangunan yang berkelanjutan (Yakin, 2004:4).

Salah satu upaya pelestarian lingkungan hidup yang sangat penting dilakukan mengingat kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu upaya penghijauan. Penghijauan dalam arti luas menurut Yakin (2004:14) adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Sedangkan Penghijauan Kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman-taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya. Dalam hal ini penghijauan perkotaan merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka di perkotaan. Begitu pentingnya peranan tumbuhan di bumi ini dalam menangani krisis lingkungan terutama di perkotaan, sangat tepat jika keberadaan tumbuhan

mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan penghijauan perkotaan sebagai unsur hutan kota.

Oleh sebab itu pemilihan jenis tanaman dalam pelaksanaan penghijauan harus konseptual, tidak asal jadi, dengan alasan mudah diperoleh, murah harganya dan cepat tumbuh. Seperti yang dikemukakan oleh Yakin (2004:4) bahwa pemilihan jenis tanaman untuk penghijauan agar tumbuh dengan baik hendaknya mempertimbangkan syarat-syarat hortikultura (ekologikal) dan syarat- syarat fisik. Syarat hortikultural yaitu respon dan toleransi terhadap temperatur, kebutuhan air, kebutuhan dan toleransi terhadap cahaya matahari, kebutuhan tanah, hama dan penyakit, serta syarat-syarat fisik lainnya yaitu tujuan penghijauan, persyaratan budi daya, bentuk tajuk, warna, dan aroma.

Penghijauan sendiri merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, semangat sadar lingkungan yang tertuang dalam program nasional penghijauan tersebut berbeda dengan kondisi pembangunan Indonesia saat ini yang kurang berwawasan lingkungan, terbukti dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa tidak jarang pembangunan dibangun di lahan pertanian maupun di ruang terbuka hijau, seperti di kota Malang sendiri. Ruang terbuka hijau di kota Malang sendiri antara lain bantaran sungai, resapan air, taman kota, hutan kota, makam, kawasan Universitas Brawijaya, Malang *Town Square* (MATOS), dan lapangan olah raga. Tetapi, pada kenyataannya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengizinkan pembangunan *mall* di areal Stadion

Gajayana dan Jalan Veteran yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau. Selain itu, Pemkot juga mengizinkan berdirinya rumah mewah, restoran, kantor, dan pertokoan di sekitar lahan resapan air Taman Kunir. Bahkan, *eks*-lahan Kampus Penyuluh Pertanian di Tanjung juga sudah beralih fungsi menjadi sebuah *mall*. Dan era hutan-hutan beton pun dimulai.

Tidak heran jika akhir-akhir ini kita mulai merasa Kota Malang yang semakin panas, Kota Malang memang telah berubah. Dengan slogan “Tribina Citra Kota Malang” yaitu Malang Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata, Kota Malang semakin memacu dirinya untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Lihat saja, industri-industri seperti industri keramik, tempe, meubel, dan banyak lagi berkembang dengan suburnya. Kemajuan sektor pendidikan juga telah diakui secara nasional. Terbukti dengan banyaknya siswa dari luar Malang yang “menyerbu” lembaga-lembaga pendidikan di kota ini. Julukan “Malang Kota Pendidikan” semakin mengukuhkan fakta tersebut. Sektor ekonomi juga semakin menggeliat dan melaju pesat. Namun, untuk meraih kemajuan yang pesat, selalu ada yang dikorbankan. Seperti kata pepatah *no pain no gain*, mau tidak mau harus ada yang “rela” dikorbankan untuk bisa meraih sebuah tujuan. Sayangnya, dalam hal ini yang dikorbankan adalah lingkungan hidup yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Perlu kita ketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Malang hanya tinggal 4% dari seluruh luas wilayah yang mencapai 110,06 kilometer persegi. Data yang terbaru pada tahun 2008 malah semakin mengawatirkan. Menurut perhitungan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jatim, ruang terbuka

hijau di kota Malang kini tinggal 1,8% dari total luas wilayah 110,6 kilometer persegi. Sedangkan lahan resapan air hanya tinggal 40 persen. Padahal, menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Luas, ideal ruang terbuka hijau harus mencapai 30% dari total luas wilayah yang terdiri atas 10% ruang terbuka hijau privat dan 20% untuk publik (www.hariantempo.co.id).

Tabel 1
Penggunaan Lahan dan Jumlah Penduduk Kota Malang Pada Tahun 2000
Dan 2004

No.	Bmw	Luas (Ha)	Luas Kawasan		Jumlah Penduduk		Kebutuhan RTH
			Terbangun	Belum Terbangun	2000	2004	
1.	Malang Tengah (Klojen)	883,00	754,250	128,75	117.094	108.268	18,63%
2.	Malang Timur	1.776,65	1.445,300	331,35	156,542	163,637	13,99%
3.	Sukun	2.096,57	1.235,400	861,17	161,846	166,675	12,08%
4.	Malang Barat	2.260,00	1.598,007	661,993	166,308	182,839	12,29%
5.	Malang Tenggara	3.989,44	1.869,731	2119,709	149,939	167,930	6,39%
	Jumlah	11.005,68	6.902,688	4.102,972	751,729	789,349	63,38%

Sumber: www.hariantempo.co.id

Kondisi Malang saat ini sudah menyalahi aturan pemerintah, bukan hanya karena aturan pemerintah, tapi karena urgensi adanya ruang terbuka hijau. Rusaknya lingkungan di kota Malang menurut Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan, “akibat kebijakan yang mengizinkan terjadinya eksploitasi

ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun, yang pada akhirnya kota Malang yang dulunya hijau, indah dan asri, kini seringkali dilanda banjir”. Ketentuan mengenai tata ruang sendiri dapat dilihat pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menanggapi krisis lingkungan akibat pembangunan tersebut, pada awal tahun 2004 Walikota Malang mencanangkan gerakan penghijauan kota Malang. Yang mana, kebijakan penghijauan tersebut tertuang dalam Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, Pengumuman Walikota Malang No. 1 Tahun 2004 tentang Program Penghijauan, dan Pengumuman Walikota Malang No. 5 tentang Peduli Lingkungan.

Salah satu kebijakan pemerintah terkait penghijauan Kota Malang tersebut ditandai dengan adanya gerakan *Malang ijo royo-royo (MIRR)*, yang mana gerakan MIRR tersebut disponsori sebuah perusahaan rokok dan ditambah dukungan media massa lokal. Gerakan ini merupakan program penanaman berbagai bibit pohon dengan konsep multi partisipatif yang mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, kalangan pelajar, mahasiswa, aparat TNI dan Polri, Ormas, Parpol, lembaga swadaya, dan tidak ketinggalan para pengusaha menjadikan gerakan penghijauan ini terasa sangat impresif.

Kegiatan MIRR yang awalnya terkesan sebagai gerakan rekreatif ini telah menjadi agenda tahunan. Kesuksesan MIRR I, dilanjutkan dengan gerakan MIRR II – MIRR V, disusul dengan munculnya *event-event* yang terkait dengan gerakan penghijauan seperti pemilihan putri lingkungan sampai dengan gerakan Rembug

Kampung (Rempung). Rangkaian gerakan MIRR paling tidak telah menumbuhkan kepedulian baru terhadap pentingnya menghijaukan lingkungan Kota Malang. Dalam jangka panjang melalui gerakan MIRR akan memunculkan harapan baru agar Kota Malang kembali menjadi kota yang hijau, rimbun, sejuk dengan taman-taman kota yang tertata dan tersebar di sudut-sudut kota. Namun demikian, mengakomodasi keinginan untuk menghijaukan Kota Malang bisa jadi bukan perbuatan main-main. Apalagi di tengah pesatnya kemajuan kota Malang yang kadang tidak mengakomodir pembangunan lingkungan dalam perencanaan tata kota.

Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan tata ruang, gerakan MIRR seharusnya bukan lagi *event* insidental tetapi sebagai gerakan integral dalam kerangka menata Kota. Melihat pentingnya program ini, gerakan MIRR sebagai upaya penyadaran peduli lingkungan patut didukung. Tetapi, harapan agar gerakan semacam ini tidak sekedar slogan semata harus dijadikan pijakan untuk mengkritisi MIRR. Sebab jika tidak gerakan MIRR I – MIRR V hanya akan menjadi gerakan seremonial, gerakan lipstik sekedar menambal wajah kota yang memang kelihatan bopeng di sana-sini.

Perubahan fungsi seperti ini bagi kepentingan perencanaan pembangunan kota bisa jadi merupakan sebuah keniscayaan. Hanya sayangnya, konsep membangun kota dengan segala kepentingannya seringkali menabrak ketentuan-ketentuan yang sebenarnya sudah digariskan baik itu yang tertuang pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Penataan Ruang termasuk Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Bagi

Pemerintah Kota, keniscayaan kemajuan kota yang mengedepankan aspek ekonomi seringkali meminggirkan pentingnya lingkungan hidup dengan perencanaan pembangunan. Kalaupun kemudian terimplementasi dalam rencana tata kota seringkali tidak konsisten, cenderung insidental dan sangat artifisial.

Sebagai contoh, penghargaan lingkungan yang diraih Kota Malang dengan Piala Adipura. Penghargaan di bidang lingkungan ini, lebih terkesan sekedar menjaga gengsi dan prestasi pemerintah ketimbang berbicara substansi bagaimana mengkaitkan kebersihan kota dengan peningkatan kualitas lingkungan kota Malang. Hal ini nampak dari kebijakan pemerintah yang terus berupaya meraih dan mempertahankan Piala Adipuranya dengan berbagai usaha, namun Pemerintah Kota justru membangun kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Antara lain dengan melakukan kebijakan yang semakin mempersempit ruang terbuka hijau di kota Malang. Hal ini menunjukkan, bahwa target yang ingin diraih yaitu piala Adipura menjadi berbeda jika dikaitkan dengan fakta akan keseriusan pemerintah menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Gerakan penghijauan penanaman pohon seperti MIRR, bisa jadi merupakan alternatif meminimalkan dampak negatif dari kemajuan kota. Apalagi pencapaian yang ingin diraih program ini selain untuk melestarikan lingkungan hidup, menciptakan lingkungan yang sehat dan hijau juga sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi Kota Malang. Namun demikian, konsistensi gerakan ini harus ditelaah sepanjang gerakan ini belum terintegrasi secara penuh dalam tata perencanaan pembangunan kota. Integrasi ini diperlukan agar apapun nama gerakan penghijauan tidak dijadikan sebagai pijakan untuk menggulirkan

kebijakan lain yang justru tidak menyandarkan pada keseimbangan lingkungan. Hal ini penting dijadikan dasar pijakan, karena pada kenyataannya kecepatan membangun keseimbangan ekologi misalnya perluasan RTH, masih kalah dibandingkan dengan pembangunan kawasan baru yang justru semakin mengurangi wilayah terbuka hijau di kota Malang.

Dari hal tersebut maka sudah seharusnya pemerintah daerah memformulasikan sebuah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang asri sehat dan indah. Dunn (1999:21) yang diterjemahkan oleh Wibawa, merumuskan 5 metode analisis kebijakan yang sangat membantu dalam memformulasikan kebijakan publik. Kelima metode dimaksud adalah (1) perumusan masalah (*problem structuring*), (2) peramalan (*forecasting*), (3) rekomendasi (*recommendation*), (4) pemantauan (*monitoring*), dan (5) evaluasi (*evaluation*). Penelitian ini nantinya akan berkonsentrasi pada analisis mengenai kebijakan (*analysis of policy*) khususnya analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian). Analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian) kebijakan tersebut dapat ditelaah dari pendekatan metode *Systems thinking* yang merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang didahului dengan identifikasi masalah secara komprehensif. Memperhatikan dinamika berbagai faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Sehingga solusi yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan inti atau sumber permasalahan dengan tepat. Permasalahan yang dimaksud dalam penelitian terkait program penghijauan lingkungan ini yaitu mengenai kerusakan lingkungan dengan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau

(RTH) sebagai akibat kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pembangunan yang menyalahi prinsip pembangunan. Lahan yang seharusnya menjadi RTH Kota Malang malah beralih fungsi menjadi pertokoan, *mall*, rumah mewah dan lain-lain.

Untuk maksud tersebut, dalam usaha mengungkap apakah kebijakan penghijauan melalui program MIRR sebagai suatu solusi pemerintah terhadap persoalan lingkungan hidup sudah sesuai dengan *systems thinking* apa belum, dan untuk memahami akar permasalahannya sekaligus sebagai ikhtiar dalam menemukan solusi atas masalah-masalah tersebut perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Evaluasi Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) dalam Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dilakukan pengkajian mendalam dan tindakan-tindakan yang riil untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem dan *networks* atas kebijakan penghijauan di wilayah Kota Malang?
2. Apa sajakah faktor pendukung (*positive link*) dan penghambat (*negative link*) dalam pelaksanaan penghijauan wilayah Kota Malang?

3. Bagaimana rekomendasi model pelaksanaan *systems thinking* melalui program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) sebagai program penghijauan wilayah Kota Malang yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematis dan objektif untuk mengkaji suatu atau beberapa masalah dalam usaha mencapai pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan umum berkenaan dengan landasan atau inti perwujudan masalah tersebut (Suparlan, 1994:14). Penelitian itu dilakukan dengan berpedoman pada berbagai informasi (yang terwujud sebagai teori-teori) yang telah dihasilkan dalam penelitian-penelitian yang terdahulu.

Dengan memperhatikan pendapat yang dikemukakan Suparlan tersebut maka secara sederhana penulis mencoba merumuskan tujuan penelitian ini dan kaitannya dengan permasalahan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem dan *networks* atas kebijakan penghijauan di wilayah Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung (*link positif*) dan penghambat (*link negatif*) Program Penghijauan wilayah Kota Malang.
3. Untuk memberikan rekomendasi model pelaksanaan *systems thinking* melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) sebagai program penghijauan wilayah Kota Malang kedepannya.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Kontribusi akademis

- a) Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan dunia administrasi publik, khususnya pengembangan metode *systems thinking* dalam ruang lingkup penghijauan melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR).
- b) Sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang penerapan metode *systems thinking* di dalam program penghijauan melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) di wilayah Kota Malang.

2. Kontribusi Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pertamanan Kota Malang dalam menerapkan metode *systems thinking* dalam kebijakan penghijauan melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) sebagai suatu solusi terhadap permasalahan lingkungan dengan harapan dapat mengefektifkan program
- b) Sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi dan peminat administrasi publik khususnya kebijakan publik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yaitu sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai argumen yang mendasari penulis untuk menguraikan kebijakan penghijauan melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) di wilayah Kota Malang, uraian tentang model sistem dan *network* program penghijauan di wilayah Kota Malang, uraian tentang pelaksanaan program MIRR I – MIRR V sebagai upaya penghijauan Kota Malang, uraian tentang faktor pendukung (*positive link*) dan penghambat (*negative link*) pelaksanaan program penghijauan wilayah Kota Malang, dan mengapa metode *systems thinking* dapat digunakan sebagai alat analisis dalam mengevaluasi program kebijakan tersebut. Selain itu pada bab ini juga akan berisi rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua teori utama yang digunakan landasan analisis yaitu teori kebijakan publik dan teori pembangunan berkelanjutan terkait dengan lingkungan. Penjabaran teori mengenai implementasi kebijakan publik

juga akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat serta efektivitas Program MIRR. Selain itu akan dipaparkan mengenai metode *systems thinking* yang akan diadopsi dalam menganalisis program penghijauan sebagai suatu kebijakan pemerintah daerah dalam hal mengatasi permasalahan lingkungan. Kedua teori tersebut merupakan *grand theory* yang akan dijadikan dasar pembahasan dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta desain analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian utama yang tidak akan pernah lepas dari administrasi publik (*public administration*). Kebijakan merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan yang pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik.

Penetapan tujuan merupakan langkah utama dan paling penting dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan publik harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas karena tanpa tujuan, kebijakan tidak memiliki arti bahkan dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Tujuan-tujuan kebijakan haruslah terkemas pada sebuah visi kebijakan yang futuristik, artinya bahwa kebijakan publik harus memiliki tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Tanpa hal tersebut, maka kebijakan akan kehilangan arah tujuannya, kebijakan hanyalah sebatas alat untuk memecahkan masalah pada saat kebijakan tersebut dibuat tanpa ada tujuan ke depan yang jelas.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi tentang kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Pendefinisian kebijakan publik oleh para pakar tidak ada yang mutlak digunakan sebagai pedoman pasti karena memang kebijakan publik relatif

dan oleh para pakar terkadang istilah-istilah tersebut dipergunakan secara sinambung berganti dan walaupun kemudian didefinisikan, jarang pula para penulisnya merumuskannya secara konsisten” (Wahab, 2008:3). Berikut ini merupakan berbagai definisi tentang kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit.

Dye dalam Suharto (2008:44), memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yaitu sebagai *“whatever government choose to do or not to do”* yang diartikan bahwa kebijakan publik adalah semua pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik memilih untuk melakukan sesuatu ataupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu.

Cochran dalam Birklan (2010:8) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut, *“the term public policy always refers to the action of govenment and the intentions that determine those actions”* yang diartikan bahwa terminologi kebijakan publik selalu merujuk pada tindakan pemerintah dengan tujuan dari keputusan melakukan tindakan tersebut.

Kraft dan Scott dalam Gerston (2010:6) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut, *“public policy is a course of government*

action (or inaction) taken in response to social problems” yang diartikan bahwa kebijakan publik adalah bagian dari tindakan pemerintah (ataupun tidak melakukan tindakan) yang diambil dalam merespon masalah sosial.

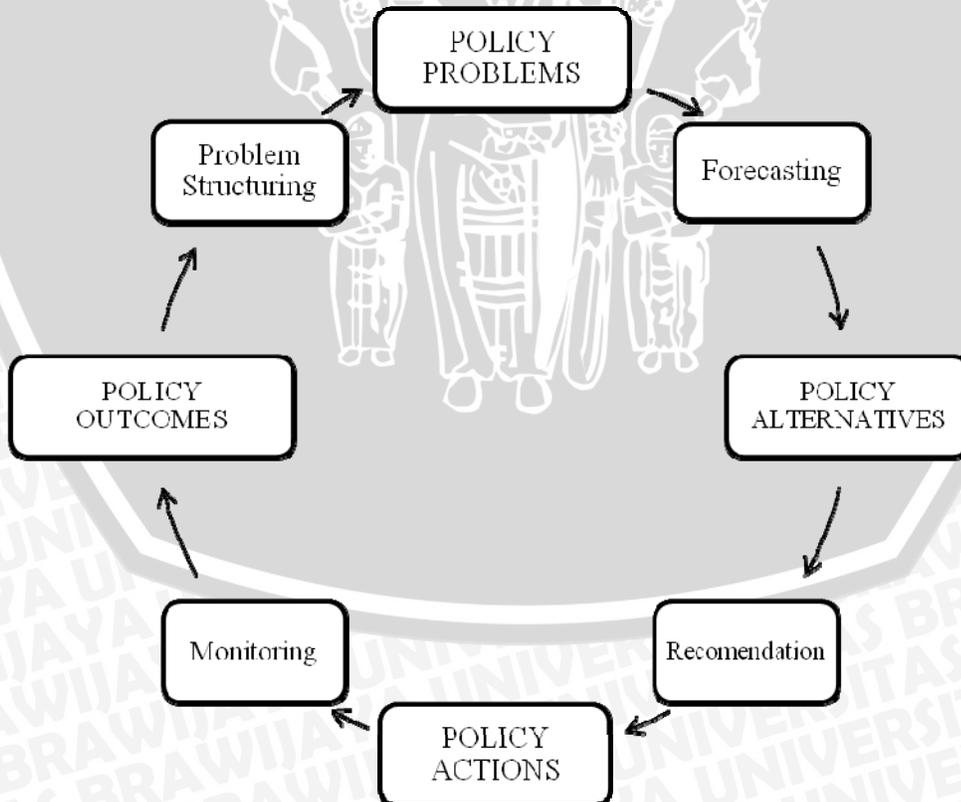
Proses tahapan kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) formulasi kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Identifikasi masalah kebijakan (*Identification of policy problem*), tahap ini dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) publik atas tindakan pemerintah.
- b) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), tahap ini merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c) Perumusan Kebijakan (*policy formulation*), tahap ini merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
- d) Pengesahan Kebijakan (*legitimizing of policies*), tahap ini dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- e) Implementasi Kebijakan (*Policy implementation*), tahap ini dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

f) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), tahap ini dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan dari luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Sedangkan menurut Wibawa (1994:55), memahami proses pembuatan kebijakan sebagai suatu analisis kebijakan yang merupakan suatu usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan. Informasi ini oleh analis kebijakan kemudian digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan. Begitu seterusnya, sehingga membentuk siklus sehingga dapat dilihat seperti gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Siklus Kebijakan



Sumber: Dunn (1999:48) diterjemahkan oleh Wibawa, dkk.

2. Analisis Kebijakan Publik

Berikut merupakan beberapa pengertian tentang analisis kebijakan publik oleh para pakar. Menurut Dye dalam Wahab (2008:4) analisis kebijakan adalah “*what goverments do, why they do it, and what difference it makes*” yang diartikan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan pencapaian hasilnya berbeda-beda. Menurut Dunn (1999:44) yang diterjemahkan oleh Wibawa, dkk bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.

Analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan ragam pendekatan dan metoda untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dan para pihat yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan yang relevan (Wahab, 1999:24).

Analisis kebijakan nantinya akan membantu para pembuat kebijakan (*decision makers*) dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan

dihadapi guna meningkatkan kualitas kebijakan publik yang mereka buat.

Analisis kebijakan menurut Wahab (2008:4) secara sistematis dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis mengenai kebijakan (*analysis of policy*) dan analisis untuk pembuatan kebijakan (*analysis for policy*). Penelitian ini nantinya akan berkonsentrasi pada analisis mengenai kebijakan (*analysis of policy*) khususnya analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian).

Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan *monitoring* dilakukan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai “koreksi dini” agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Sedangkan evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. Metoda pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan yang diambil yaitu:

- a. Deskriptif – *monitoring*: menghasilkan informasi tentang sebab-akibat suatu kebijakan masa lalu.
- b. Evaluative – *evaluation*: memberikan informasi tentang manfaat suatu kebijakan yang lalu maupun yang akan datang.

Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting

dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Melalui proses evaluasi suatu kualitas program dinilai. Hal ini dapat dilakukan baik melalui proses yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan analisis *monitoring* (pengawasan) proses kebijakan adalah:

- a. Menjaga agar program/kegiatan yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap program/kegiatan apabila hasil *monitoring* mengharuskan untuk itu.

Sedangkan tujuan analisis *evaluative* dalam proses kebijakan adalah:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu program/kegiatan untuk dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasarnya.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu program/kegiatan untuk dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut.
- c. Mengukur tingkat keluaran program/kegiatan.
- d. Mengukur dampak program/kegiatan.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
- f. Sebagai bahan masukan untuk program/kegiatan yang akan datang

Terkait dengan analisis kebijakan yang diambil untuk mengkaji penelitian ini yaitu analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian), maka peneliti perlu melakukan suatu pendekatan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian yaitu melalui metode *systems thinking* (berpikir sistem).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:68) menjelaskan implementasi itu adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Mengikuti pandangan Mazmanian dan Sabatier bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Sedangkan menurut Grindle dalam Wahab (2005:59) implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa

dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dengan demikian implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan itu sendiri, dampak yang diperoleh, kepentingan para pembuat kebijakan, inisiator dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan. Konsep implementasi kebijakan juga menentukan keterlibatan aktor-aktor dalam proses implementasi. Aktor tersebut dibedakan menjadi inisiator, formator dan implementator.

4. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2009:137), terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dilaksanakan dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Ketiga adalah tepat target. Ketepatan target berkaitan dengan (a) apakah target sesuai dengan apa yang direncanakan, (b) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, (c) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Kemudian, syarat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan yaitu

interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu, yang termasuk ke dalam lingkungan kebijakan selanjutnya adalah lembaga interpretasi yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan *individuals*. *Individuals* disini bermakna individu-individu tertentu yang memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan implementasi kebijakan. Keempat tepat tersebut menurut Nugroho masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan yaitu politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.

A. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

“masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk Mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Itulah hakekatnya peran administrasi negara dalam pembangunan di Indonesia” (Kartasamita, 1996: 67).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah setidak-tidaknya pada tahap awal pembangunan yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, pasar, dan sebagainya. Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah-sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut administrasi publik yang tanggap terhadap masalah yang dihadapi lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan fisik alam, lingkungan ekonomi maupun lingkungan sosial.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep Pembangunan Berkelanjutan juga dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada tahun 1987. Laporan ini mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi

teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Budimanta (2005:13) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Otto Soemarwoto dalam Sutisna (2006:45), mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur itu meliputi:

1. Tolok ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan.

Terkait dengan tolok ukur pro lingkungan ini, Syahputra (2007) mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

- a. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi.
 - b. Pemanfaatan sumberdaya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya takterbarukan (*nonrenewable resources*).
 - c. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
 - d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).
2. Tolok ukur pro rakyat miskin (*pro-poor*) bukan berarti anti orang kaya. Yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat miskin dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI) yang dikembangkan PBB.
3. Tolok ukur pro kesetaraan jender/pro-perempuan (*pro-women*), kesetaraan jender ini dapat diukur dengan menggunakan *Genderrelated Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) untuk

suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas jender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan.

4. Tolok ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja (*pro-livelihood opportunities*) dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), index gini, pendapatan perkapita, dan lain-lain.
5. Tolok ukur pro dengan bentuk negara kesatuan RI merupakan suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.
6. Tolok ukur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang digaungkan di daerah bersangkutan

1. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Yang dimaksud pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang

melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang sendiri adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Budihardjo (2005), rencana tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan. Namun masih banyak masalah dan kendala dalam implementasinya dan menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Konflik yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah (*public sector*), pengusaha atau pengembang (*private sector*), profesional (*expert*), ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat, wakil masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain: antara sektor formal dan informal atau sektor modern dan tradisional di perkotaan terjadi konflik yang sangat tajam; proyek *urban renewal* sering diplesetkan sebagai *urban removal*, fasilitas publik seperti taman kota harus bersaing untuk tetap eksis dengan bangunan komersial yang akan dibangun; serta bangunan bersejarah yang semakin menghilang berganti dengan bangunan modern dan minimalis karena alasan ekonomi. Kaidah – kaidah pembangunan berkelanjutan cenderung dikibarkan sebagai slogan yang terdengar sangat indah, namun kenyataan yang terjadi malah bertolak belakang.

2. Penghijauan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Salah satu upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka dilakukan kegiatan penghijauan. Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan (Yakin, 2004:24).

Dalam UU PPLH tersebut juga dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dalam UU PPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Upaya dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, tidaklah hanya mengandalkan pemerintah saja, namun lebih jauh masyarakat pun mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan hal itu. Diantaranya yaitu dengan pola pendidikan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Membangun kesadaran masyarakat yang mempunyai wawasan lingkungan yang luas merupakan “pilar” dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar jauh dari berbagai sumber pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Sebab, pada dasarnya masalah lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan etika atau moral lingkungan yang tinggi benar-benar dibutuhkan dalam setiap pembangunan di Indonesia. Tidak

terkecuali adanya penegakan hukum lingkungan secara tegas dan terarah.

Lebih jauh, dengan mengacu pada hal tersebut setidaknya wawasan lingkungan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Masalah lingkungan, seperti halnya banjir, tanah longsor dan kelangkaan air bersih yang sering terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, memang merupakan permasalahan global. Bukan saja menimpa Indonesia, namun di negara-negara lain pun juga ikut merasakan. Walaupun sering dilanda banjir di musim penghujan, Indonesia dalam waktu tertentu juga mengalami kelangkaan air bersih, terutama untuk keperluan pertanian. Hal ini merupakan bukti konkret akibat kurangnya kesadaran masyarakat kita dalam berwawasan lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, ini akan berpengaruh pula terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

a. Peranan Penghijauan Lingkungan

Penghijauan lingkungan merupakan solusi tepat untuk mengatasi segala bencana akibat kerusakan lingkungan seperti banjir. Jika program penghijauan difungsikan dengan optimal, dan sistem drainase diperbaiki, sampah dikelola secara benar serta pembangunan dinding penahan banjir (dam) dilaksanakan ditambah peran serta aktif segenap warga dalam hal penghijauan lingkungan, banjir pasti dapat dicegah dan diatasi secara tuntas. Penghijauan (*Go Green*) adalah program “**Sayangi Bumi**” yang sangat tepat untuk dijadikan solusi, agar bumi tetap bisa diwariskan serta

dinikmati oleh generasi mendatang yaitu anak dan cucu kita sendiri.

(<http://sayangibumi.bolgspot.com>)

Adapun peranan dari penghijauan lingkungan yaitu dapat sebagai resapan air, ruang interaksi, paru-paru kota dan menyerap polusi udara, dan juga mengatasi permasalahan pemanasan global (*global warming*)

(<http://sayangibumi.bolgspot.com>).

b. Penghijauan Lingkungan Sebagai Area Resapan Air dan Paru – paru Kota

Untuk mendukung habitat lingkungan perkotaan, menurut PBB, idealnya disediakan ruang terbuka hijau sekitar 30% dari luas kota yang bersangkutan. Kota Jakarta sekarang ini hanya memiliki ruang terbuka hijau tidak lebih dari 10%. Minimnya area resapan air mengakibatkan aliran air hujan di permukaan tanah akhirnya akan menggenang dan menimbulkan banjir.

Selain berfungsi sebagai area resapan air dan ruang interaksi sosial, ruang terbuka hijau ini semakin penting artinya dalam mendukung program *Go Green* dalam rangka mengatasi Pemanasan Global (*Global Warming*) dan Perubahan Iklim (*Climate Change*) yang dialami bumi kita sekarang ini. Selain itu juga penghijauan berperan sebagai paru-paru kota dan menyerap polusi udara terutama gas emisi CO₂ yang konsentrasinya semakin menumpuk di atmosfer bumi membentuk lapisan yang menyebabkan suhu di Bumi semakin panas.

Penyempitan alur sungai akibat bantarannya banyak digunakan untuk permukiman penduduk juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Idealnya, lahan di sepanjang DAS ini ditertibkan dan peruntukannya dikembalikan sebagai jalur areal terbuka hijau minimal 5 meter ditambah jalan inspeksi untuk perawatan sungai dan penghijauan agar tetap berfungsi secara optimal. Penanaman pohon peneduh dan rumpun bambu bisa dipertimbangkan, mengingat pohon jenis ini sangat potensial untuk berfotosintesis sekaligus menangkap emisi CO₂ di udara, dikarenakan **penanaman bambu seluas satu juta are akan mengurangi hingga 4,8 juta ton emisi CO₂ per tahun.**

Hal-hal lain yang juga sebaiknya dilakukan sebagai solusi mengatasi banjir adalah:

1. Perbaiki sistem drainase dan tempat penampungan air hujan

Kondisi sistem drainase yang belum optimal menyebabkan air pasang laut (Rob) juga menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, memerlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk mendistribusikan air buangan ini, terutama saat terjadinya hujan.

2. Ubah perilaku buang sampah sembarangan

Pada setiap peristiwa banjir, sebagian besar dari sampah akan semakin cepat masuk ke sungai bahkan sampai ke laut. Perlu diketahui sampah non organik seperti plastik baru bisa terurai setelah mencapai ratusan tahun dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem aneka satwa yang ada di sungai dan laut.

Oleh karenanya perlu penyuluhan untuk meningkatkan budaya bersih di masing-masing lingkungan, terutama menyangkut perilaku buang sampah sembarangan ini.

3. **Cegah penurunan permukaan tanah agar tidak meluas**

Penurunan permukaan tanah terjadi akibat tanah yang belum padat dan gencarnya pembangunan fisik untuk perumahan/ perkantoran ditambah tidak terkendalinya pembuatan sumur air yang disedot langsung dari tanah. Akibat lainnya adalah masuk dan merembesnya air laut menyebabkan air tanah berubah menjadi asin dan tidak dapat diminum. Semua area yang mengalami penurunan permukaan tanah sudah pasti menjadi wilayah genangan banjir.

4. **Cegah banjir besar dengan pembangunan dinding penahan banjir**

Dengan adanya penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.

3. Peran Pemerintah Daerah

Penerapan UU No. 22 Tahun 1999 telah mengalami pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi. Partisipasi dan kemandirian di sini adalah berkaitan dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Selain sebagai regulator dalam pembangunan, pemerintah daerah juga harus mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi, sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan sumber daya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pengembangan sektor lainnya. Selain itu, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan pula. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri saja, tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial (Yakin, 2004:25).

Lebih lanjut menurut Yakin (2004:26) pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi.
- b) Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat.
- c) Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.

- d) Pembangunan membutuhkan kriteria dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
- e) Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator agar setiap keputusan pembangunan harus memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, disamping pengentasan kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang paling baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

B. Hubungan *Systems Thinking* dengan Kebijakan Penghijauan

Teori Pembangunan Berkelanjutan yang dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada tahun 1987, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan”. Ketentuan-ketentuan mengenai pembangunan

sendiri telah diatur dalam UU Nomor 32 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga diharapkan melalui teori dan peraturan-peraturan tersebut, menjadi sebuah acuan maupun landasan pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan terkait pembangunan.

Adapun yang menjadi permasalahan lingkungan terkait dengan pembangunan berkelanjutan saat ini adalah:

- a. Penyempitan alur sungai akibat bantarannya banyak digunakan untuk permukiman penduduk.
- b. Penurunan permukaan tanah akibat gencarnya pembangunan fisik untuk perumahan/perkantoran ditambah tidak terkendalinya pembuatan sumur air yang disedot langsung dari tanah.
- c. Banjir sebagai akibat tidak optimalnya sistem drainase dan kurangnya lahan resapan air dalam ruang terbuka hijau (RTH) yang berubah fungsi menjadi bangunan-bangunan pertokoan, rumah mewah, mall, dll.
- d. Kelangkaan air bersih sebagai akibat tidak terkendalinya pembuatan sumur air yang disedot langsung dari tanah.

Maka untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka dilakukan kegiatan penghijauan. Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Adapun kegiatan penghijauan yang akan diteliti kelayakannya dalam mengatasi permasalahan permasalahan lingkungan seperti yang disebutkan diatas adalah Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR). Program Malang Ijo Royo-Royo merupakan program penanaman bibit pohon dengan

konsep multi-partisipatif sebagai salah satu upaya pemerintah maupun stakeholder lainnya dalam penghijauan lingkungan, tujuan dari program MIRR ini adalah:

- a. Menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menghijaukan lingkungan Kota Malang.
- b. Melestarikan lingkungan hidup.
- c. Sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi kota Malang.
- d. Alternatif meminimalkan dampak negatif dari kemajuan kota.

Dalam perjalanannya, gerakan MIRR I – MIRR V telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan peduli lingkungan, seperti:

- a. Sumbangan bibit pohon oleh elemen stakeholders yaitu HM. Sampoerna yang membagikan 6.930 bibit pohon ke-57 kelurahan di kota Malang.
- b. Terselenggaranya Rembug Kampung Malang Ijo Royo-Royo pada Tahun 2007 dengan judul “Rembug Kampung Bareng” yang bertujuan untuk mensosialisasikan program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR).
- c. Terselenggaranya Putri Lingkungan yang berfungsi sebagai duta lingkungan wilayah Malang, yang mana *event* tersebut juga dapat menjadi suatu motivasi bagi generasi muda untuk lebih peka terhadap lingkungan.

Bukti dari kesuksesan program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) ini dapat dilihat dari keberhasilan Kota Malang meraih Piala Adipura sebagai penghargaan terhadap lingkungan. Namun pemerintah nampaknya kurang konsisten dalam mempertahankan penghargaan tersebut. Perolehan penghargaan Piala Adipura menjadi berbeda jika dikaitkan dengan fakta akan keseriusan pemerintah menjaga

lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang tidak ramah lingkungan, seperti:

- a. Pemerintah Kota Malang mengizinkan pembangunan *mall* MOG di areal Gajayana dan jalan veteran yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau.
- b. Pemerintah Kota Malang mengizinkan berdirinya rumah mewah, restoran, dan pertokoan disekitar lahan resapan air Taman Kunir.
- c. Eks-lahan Kampus Penyuluh Pertanian beralih fungsi menjadi sebuah *mall*, yang dikenal sekarang sebagai Mall Malang *Town square* (MATOS).

Namun demikian, konsistensi gerakan ini harus ditelaah sepanjang gerakan ini belum terintegrasi secara penuh dalam tata perencanaan pembangunan kota. Integrasi ini diperlukan agar apapun nama gerakan penghijauan tidak dijadikan sebagai pijakan untuk menggulirkan kebijakan lain yang justru tidak menyandarkan pada keseimbangan lingkungan. Hal ini penting dijadikan dasar pijakan, karena pada kenyataannya kecepatan membangun keseimbangan ekologi misalnya perluasan RTH, masih kalah dibandingkan dengan pembangunan kawasan baru yang justru semakin mengurangi wilayah terbuka hijau di kota Malang. Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang seharusnya diselaraskan kembali oleh pemerintah. Sebab jika tidak, konsep menjaga keseimbangan ekologi dalam bentuk penanaman sejuta pohon – pun akan tetap kalah dengan kekuatan modal yang melahap kawasan hijau perkotaan yang menjanjikan sejuta keuntungan. Fakta seperti inilah yang justru lebih kelihatan hasilnya dengan tumbuhnya bangunan, plaza, *mall* dan pertokoan yang tidak ramah lingkungan

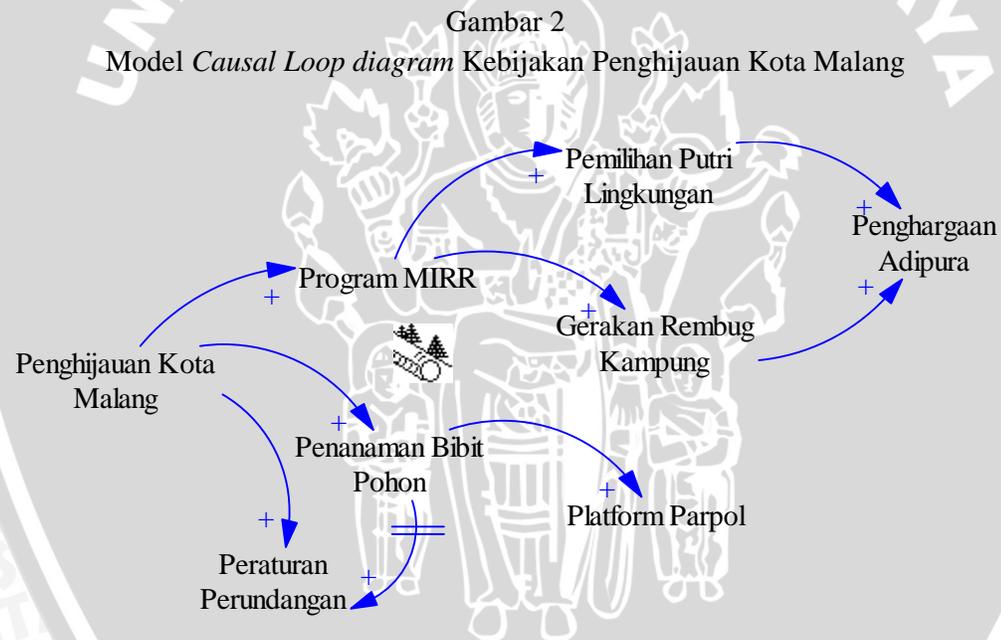
dibandingkan gerakan menanam sejuta pohon yang terkesan insidental, rekreatif dan setengah hati.

Masalah – masalah lingkungan dan peran MIRR dalam program penghijauan yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Systems thinking yang digunakan, dimana Systems thinking disini adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang didahului dengan identifikasi masalah secara komprehensif. Memperhatikan dinamika berbagai faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Sehingga solusi yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan inti atau sumber permasalahan dengan tepat. Dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi Systems thinking disini berupa masalah-masalah lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan program penghijauan.

Ilmu pengetahuan modern telah mencapai kemajuannya dengan memecah-mecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mempelajari secara mendalam masing-masing bagian itu. Pendekatan *Systems thinking* tidak berlaku untuk sistem. Sebuah sistem adalah lebih dari seluruh komponen dijumlahkan. Dan sistem akan bekerja bila seluruh komponennya terletak dan terhubung pada tempatnya. Termasuk di dalam *Systems thinking* adalah kemampuan untuk melihat melalui lensa yang berbeda. Lensa-lensa tersebut adalah *time horizon* (rentang waktu) dan *space horizon* (rentang tempat). Pemilihan lensa akan mempengaruhi isu yang diangkat dan cara penanganan masalah. Seperti lensa *time horizon* (rentang waktu), jadi masalah/isu lingkungan yang menyebabkan menyempitnya ruang terbuka hijau akan menyebabkan orang memandang

lingkungan sebagai persoalan yang memerlukan evaluasi dan pengawasan (*monitoring*) dengan menawarkan solusi yang komprehensif.

Sesuai dengan metode *systems thinking* yang digunakan sebagai alat analisis dalam mengevaluasi program kebijakan dalam penelitian ini, maka berikut akan disajikan model *causal loop diagram* dari sistem dan *networks* kebijakan penghijauan di wilayah Kota Malang yang bersifat tentatif (sementara) yang dapat dirancang dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Data diolah

C. Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR)

Program Malang Ijo Royo-Royo merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan “Malang Bestari 2024” yaitu suatu kebijakan penghijauan yang bersifat *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang digagas oleh Walikota Malang, Peni Suparto terkait permasalahan lingkungan melalui

kebijakan penghijauan yang merupakan solusi atas keadaan lingkungan wilayah Kota Malang yang semakin mengkhawatirkan, dapat dilihat dari tata ruang Kota Malang yang sudah menyalahi peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan “Malang Bestari 2024”, Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) sendiri merupakan penanaman berbagai bibit pohon dengan konsep multi partisipatif yang mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat yang telah dimulai pada tahun 2004 – 2008, dan sudah melaksanakan MIRR I – MIRR V.

1. Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Sesuai kondisi geografisnya, rencana tata ruang Kota Malang dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menyatu dengan alam pegunungan di sekitar kota, perencanaan ruang terbuka hijau ini didukung oleh aneka ragam tumbuhan yang subur serta udara yang sejuk sepanjang tahun. Salah satu ciri khas penataan ruang kota Malang adalah keberadaan ruang terbuka/taman kota, dimulai dari perencanaan Thomas Karstem (1933), tata taman/ ruang terbuka yang *representative* di jalan Tronojoyo, Kertanegara, Tugu, Gajahmada, Merbabu, Ijen, dan jalan Suropati. Disamping sebagai ruang terbuka untuk mendukung keberadaan bangunan pemerintahan dan kawasan perumahan tersebut, sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai kawasan yang dilestarikan karena dapat menjadi salah satu monumen sejarah awal berdirinya Kota Malang.

Pengelolaan/manajemen RTH Kota Malang yaitu:

- 1) Ruang Terbuka Hijau Publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum berupa taman, jalur hijau dan zona konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang.
- 2) Ruang Terbuka Hijau Privat berupa taman/kebun yang berada dirumah/perkantoran dikelola oleh masyarakat/swasta

Pedoman pengelolaan/manajemen RTH di kota Malang mengacu pada beberapa kajian tata ruang dan perundang-undangan/peraturan di tingkat nasional, kabupaten/kota.

- 1) Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28 dan 29.
- 3) Perda Kota Malang No.7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 5) Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan.
- 6) Kepmen PU No.389 Tahun1987 tentang Perencanaan RTH Kota.
- 7) SNI 173 Tahun 2004 tentang Perencanaan Permukiman pada Kawasan Perkotaan.

2. Kebijakan Penghijauan Melalui Program MIRR Untuk Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konteks Administrasi Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian utama yang tidak akan pernah lepas dari administrasi publik (*public administration*). Yang mana kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik. Yang diharapkan publik disini terkait dengan penghijauan lingkungan, dan tugas pemerintah melalui kebijakan tersebut adalah cara untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk mewujudkan harapan tersebut yaitu penghijauan lingkungan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dibutuhkan peran setiap lapisan masyarakat. Sehingga dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan stakeholders, maka tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada pasal 7 dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan cara:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- d. Memberikan saran pendapat.

e. Menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan.

Permasalahan mengenai lingkungan hidup terutama penghijauan menjadi masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Malang akhir-akhir ini. Hal ini diperkuat dengan data yang menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya 4% dari keseluruhan wilayah Kota Malang. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dan pembangunan yang semakin meningkat. Seringkali untuk meraih kemajuan yang pesat, selalu ada yang dikorbankan, sayangnya, dalam hal ini yang dikorbankan adalah lingkungan hidup yaitu ruang terbuka hijau (RTH).

Konsep membangun kota dengan segala kepentingannya seringkali menabrak ketentuan-ketentuan yang sebenarnya sudah digariskan baik itu yang tertuang pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang termasuk Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Untuk itu pemerintah daerah perlu memformulasikan sebuah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang asri sehat dan indah. Dalam usaha pencapaian kearah pembangunan yang berkelanjutan tersebut, pemerintah sebagai penentu kebijakan pembangunan perlu menerapkan program penghijauan. Salah satu program penghijauan yang sudah dilaksanakan pemerintah Kota Malang yaitu Malang Ijo Royo-Royo (MIRR).

Malang sebagai Kota yang peduli terhadap lingkungan menyelenggarakan *event* tahunan seperti Malang Ijo Royo-Royo. Tujuan

diadakannya *event* ini adalah untuk meningkatkan kepedulian warga Malang terhadap lingkungan dimana ia tinggal. Selain itu, berhubung isu *global warming* semakin *santer* terdengar maka Malang ikut berpartisipasi mencegah *global warming* itu sendiri. Agar kehidupan di bumi bisa bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Malang ijo royo-royo mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat layaknya murid sekolah, guru, ormas, TNI, dan Polri. Semua warga Malang diharapkan ikut serta dalam penanaman bibit 1000 pohon. Karena 1 pohon butuh waktu lama untuk dapat tumbuh besar dan melindungi kita dari bencana kekeringan dan bencana banjir bahkan tanah longsor.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai agar tujuan dan sasaran penelitian dapat dicapai. Metode penelitian adalah alat – alat untuk memandu peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan untuk membantu peneliti agar dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian metode penelitian dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penyelidikan yang dilakukan secara berhati – hati melalui pengumpulan data yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan (Nazir, 2005:51).

Metode penelitian yang baik sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan metode atau cara yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna mencari data yang valid dan relevan dengan masalah yang akan diteliti. Secara umum jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode *systems thinking*. Yang mana jenis *systems thinking* yang digunakan adalah *Open System*, yaitu suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya.

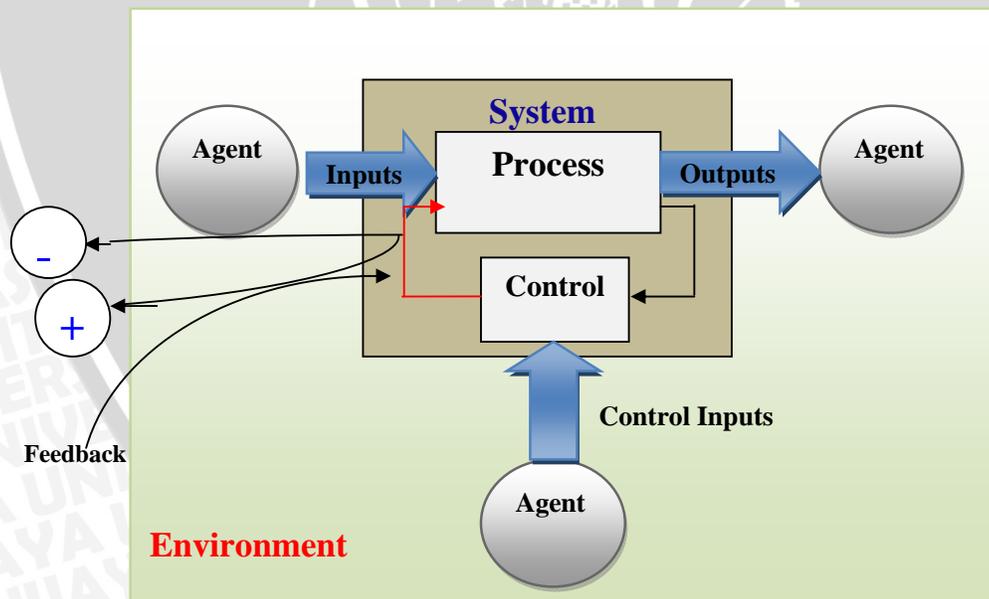
Metode *Systems thinking* menurut Wirjatmi (http://PPSI01-konsep_sistem.pdf.com) adalah cara pandang menyeluruh dengan memperhatikan

keterkaitan variabel/komponen yang membentuk jaringan sebab akibat dan berinteraksi dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis. *Systems thinking* diperlukan untuk mempelajari dan memahami secara holistik fenomena-fenomena yang kompleks dari suatu sistem. Penentuan variabel/komponen dari suatu fenomena dalam *Systems thinking* perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Sistem berada di dalam suatu lingkungan
- b. Perlu disepakati/ditentukan batas-batas dari sistem sendiri, yaitu:
 1. Elemen mana yang ada di dalam atau bagian dari sistem.
 2. Elemen mana yang berada di luar sistem.

Gambar 3

Model Sistem



Sumber: <http://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/04/29-03-2010-systems-thinking-diklatpim-ii-jkt.pdf>

Adapun penjelasan dari gambar diatas adalah:

- a. *Input*, meliputi mengumpulkan dan merakit unsur yang akan diproses yang memasuki sistem.
- b. Proses, meliputi proses perubahan bentuk yang mengubah *input* menjadi *output*.
- c. *Output*, meliputi perpindahan unsur yang sudah dihasilkan pada proses perubahan bentuk menuju tujuan akhirnya.

Suatu sistem akan mentransformasikan *input* menjadi *output* dimana proses transformasi secara khas ditandai dengan adanya *feedback* (umpan balik). *Feedback* atau sering juga disebut dengan mekanisme kontrol adalah esensi dari sebuah sistem yang mengendalikan proses agar *output* sistem sesuai dengan karakteristik dan perilaku dari sistem tersebut. Mekanisme kontrol terdiri dari *monitoring subsystem*, *control inputs*, *feedback mechanism* (positif/negatif) oleh karena itu tanpa umpan balik maka tidak ada sistem. Dengan adanya mekanisme kontrol maka akan diketahui konsekuensi dari langkah yang telah dilakukan sebagai masukan kembali karena akan mempengaruhi langkah berikutnya. Mekanisme kontrol juga digunakan untuk mengendalikan kinerja (*performance*) dari sistem. Yang mana ada tiga tipe kinerja sistem, yaitu:

1. *Effectiveness*: ketercapaian tujuan atau *goal*.
2. *Efficiency*: Pemanfaatan *resources*.
3. *Efficacy*: Kontribusi kepada sistem yang lebih tinggi.

Oleh karena itu mekanisme kontrol merupakan suatu mekanisme yang sangat fundamental yang perlu diperhatikan pada pendekatan sistem

<http://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/04/29-03-2010-systems-thinking-diklatpim-ii-jkt.pdf>.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka lingkungan dalam sistem yang akan diteliti adalah penghijauan di wilayah Kota Malang, dan batasan dari variabel/komponen program penghijauan dalam sistem yang akan diteliti adalah kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang dalam mendukung penghijauan, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Baik berupa kegiatan/program penghijauan yang bersifat mandiri maupun kerja sama dengan elemen stakeholders. *Input* dalam sistem yang akan diteliti disini yaitu “Penghijauan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang”, dan *output* yang diharapkan adalah terwujudnya Kota Malang yang hijau dengan kesadaran lingkungan yang tinggi oleh masyarakatnya.

Dengan metode analisis yaitu *Systems thinking* yang digunakan untuk membangun struktur, memahami kompleksitas sistem dan untuk mendukung proses berpikir intuitif – dialogis, juga digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dari analisis sistem yang akan dilakukan. Dari jenis data dan analisis yang diperoleh, penggunaan metode *Systems thinking* juga dimaksudkan untuk merancang kebijakan yang lebih baik yang dapat memperbaiki perilaku sistem. rancangan kebijakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pemodelan. Kebijakan – kebijakan baru dirancang secara intuitif dan diuji melalui model yang dibuat.

Sehingga penelitian ini tidak hanya berusaha memahami secara aktual mengenai obyek penelitian tetapi ditujukan untuk melakukan perubahan pada

semua diri pesertanya dan perubahan situasi tempat penelitian, juga untuk memberikan rekomendasi model *Systems thinking* pelaksanaan program penghijauan kedepannya. Dengan harapan agar kebijakan penghijauan dalam Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) yang merupakan salah satu program pembangunan berkelanjutan mencapai perbaikan praktik secara inkremental dan berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat holistik, sehingga peneliti kualitatif tidak dapat menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif diperlukan batasan masalah yang disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Fokus penelitian kebijakan menurut Danim (2005:32) memiliki sifat yang sangat khas, kekhasan penelitian ini terletak pada fokusnya yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak dipecahkan akan memberi efek negatif yang sangat luas. Tidak ada ukuran pasti mengenai luas atau sempitnya suatu masalah sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian kebijakan pada dasarnya adalah berorientasi pada solusi dari permasalahan yang muncul akibat diterapkannya sebuah kebijakan.

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis *system thinking* dari kebijakan penghijauan Kota Malang, yang di dalamnya meliputi:
 - a. *Story line* (alur cerita) kegiatan penghijauan oleh pemerintah Kota Malang.
 - b. Model *systems thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang.
2. Faktor pendukung (*positive links*) dan penghambat (*negative links*) pelaksanaan penghijauan wilayah Kota Malang.
3. Rekomendasi Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) sebagai program penghijauan wilayah Kota Malang dalam model *systems thinking*.
 - a. Pengujian MIRR sebagai suatu kebijakan penghijauan melalui skenario – skenario kebijakan.
 - b. Rekomendasi model *causal loop diagram* program (MIRR) sebagai kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang.
 - 1) *Story Line* (Alur Cerita) Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang.
 - 2) *Causal Loop Diagram* Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengadakan penelitian, untuk menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Nazir, 2005:60).

Berdasarkan berbagai aspek tersebut maka lokasi penelitian yang ditetapkan adalah Kota Malang, adapun alasan penetapan lokasi penelitian tersebut adalah:

1. Kota Malang merupakan daerah yang memungkinkan peneliti untuk meneliti, karena daerah asal peneliti yang cukup jauh dari kampus peneliti sendiri yaitu Kota Medan. Selain itu Malang merupakan kota ke – dua terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya, yang sedang pesat – pesatnya melakukan pembangunan di tiga bidang yaitu industri, pendidikan dan pariwisata, untuk itu perlu suatu kebijakan – kebijakan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung ke tiga pilar tersebut.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mana tugas pokok dan fungsinya berkaitan langsung dengan lingkungan, sedang menggalakkan gerakan penghijauan mulai dari tahun 2004-2024 mendatang, yang berperan sebagai solusi atas kerusakan lingkungan di wilayah Kota Malang, oleh karena itu kebijakan penghijauan tersebut membutuhkan suatu pengawasan maupun evaluasi demi perbaikan kebijakan penghijauan Kota Malang kedepannya.

Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah adalah Bidang Pertamanan, Seksi Penghijauan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Malang yang terletak di Jl. Bingkil No. 01 Telp. (0341) 369377. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, khususnya Seksi penghijauan

yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan penghijauan dilihat dari adanya struktur kepanitiaan pelaksanaan program ini, baik itu ketuanya maupun anggotanya.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data, pada proposal masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat setempat, dinas-dinas terkait program tersebut.

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dan arsip-arsip di lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan usaha pengumpulan data yang secara langsung mendatangi lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur, media cetak, makalah seminar atau pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan dialog atau tanya jawab dengan para informan yaitu pemimpin, kabid – kabid dan staf secara langsung untuk memperoleh informasi dan keterangan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik untuk memperoleh data sekunder atau informasi dengan cara mencari data yang tepat dalam sejumlah dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan maupun inventarisasi arsip pada instansi yang dianggap penting dan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri, pada penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.
2. Pedoman wawancara, sebagai kerangka atau dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang berfungsi sebagai informan yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Alat-alat tulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal yang penting di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Tujuan Membuat Model *Systems Thinking* menurut Wirjatmi (http://PPSI01-konsep_sistem.pdf.com) adalah: (a) untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sistem, (b) mengidentifikasi akar masalah, (c) untuk mendapatkan pemahaman variabel penguangkit (*loop*), (d) untuk memahami dampak dari beberapa alternatif solusi. Agar berpikir sistemik tidak terjebak ke dalam suatu kerumitan yang tidak dapat ditangani perlu diperhatikan enam langkah untuk pemecahan masalah:

1. Pengungkapan kejadian nyata
2. Penentuan kejadian yang diinginkan
3. Penetapan kesenjangan
4. Pembuatan analisis
5. Penyusunan kebijakan
6. Memperkirakan dampak.

Proses berpikir sistemik dengan penerapan enam langkah tersebut secara berurut menghasilkan peta (model) pikiran sistemik yang menyeluruh dan terpadu. Menurut Senge (2004:89) kerumitan yang dimaksudkan dalam berpikir sistemik, memerlukan alat (*tools*) untuk pemecahan masalah yang merupakan elemen dasar model *Systems Thinking*, yaitu:

1. *Storyline* (alur cerita) adalah: Setiap peristiwa/kejadian merupakan suatu hubungan sebab akibat yang menggambarkan suatu alur cerita (*story line*). Alur cerita tersebut dapat diidentifikasi ke dalam variabel yang saling berkaitan.
2. Identifikasi variabel adalah: kejadian/peristiwa yang saling terkait dan dapat diukur dan merupakan variabel yang bebas nilai.
 - a. *Hard variable*: variabel yang dapat diukur, contohnya promosi, pelanggan.
 - b. *Performance measure variable*: yaitu pengukuran kinerja variabel dari suatu variabel.
 - c. *Soft variable*: variabel yang tidak dapat diukur, contohnya kejenuhan.
3. *Causal Loop Diagram* (diagram lingkaran sebab akibat) atau CLD yaitu jaringan hubungan sebab-akibat (*cause-and-effect relationships*) antara dua variabel yang menentukan perilaku sistem. Diagram struktural ini ditunjukkan dengan tanda panah atau disebut dengan *link*, dan lingkaran yang disebut dengan *loop*.
 - a. *Link* adalah hubungan antara dua variabel di dalam sistem. Disebut positif apabila penambahan pada satu variabel menyebabkan penambahan juga pada variabel yang lain. *Links* digambarkan dalam bentuk panah yang diartikan sebagai yang “mempengaruhi” atau yang “menyebabkan”. Secara umum terdapat dua jenis kemungkinan keterkaitan antar dua variabel, yaitu:
 - 1) dua variabel yang bergerak dalam arah sama disebut link positif, diberi tanda “s” atau “+” atau huruf R.

2) dua variabel yang bergerak dalam arah berlawanan disebut link negatif, diberi tanda "o" atau "-" atau huruf B.

b. *Loop* adalah satu lingkaran sebab akibat yang terdapat di dalam sistem. *Loop* disebut positif apabila penambahan pada satu variabel menyebabkan penambahan pada sistem tersebut secara global. Sebuah sistem dapat terdiri atas banyak *loop*. Sebuah *loop* yang dominan mempengaruhi perilaku sistem disebut *dominant loop*.

4. Identifikasi variabel kunci (Utama)/variabel pengungkit (*leverage*). Dari hasil kajian melalui CLD akan dapat diketahui secara cermat variabel mana yang merupakan variabel utama yaitu variabel yang sangat berpengaruh yang sangat berpengaruh terhadap bangunan sistem isu strategis, yang apabila variabel ini tidak ada (dihilangkan) akan sangat berpengaruh pada berfungsinya variabel-variabel lainnya. Dengan penentuan variabel kunci, maka dapat dirumuskan langkah-langkah kebijakan (*Problem Solving*) yang tepat dan efektif juga dapat disusun rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan terhadap permasalahan/isu strategis. Menentukan variabel utama dalam *systems thinking* dapat dilakukan dengan "perencanaan skenario" (*scenario planning*). Adapun ciri-ciri dari variabel utama adalah:

- a. Variabel dengan jumlah anak panah paling banyak keluar.
- b. Variabel dengan jumlah anak panah, baik yang keluar maupun yang masuk paling banyak.

Systems thinking dalam model *Causal Loop Diagram* (CLD) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *systems thinking* sederhana. Artinya,

dalam model *causal loop diagram* yang digunakan tidak melakukan analisis *looping*, yaitu analisi untuk menentukan apakah suatu *loop* seimbang (*balance*) atau penguatan (*reinforce*) dengan menghitung jumlah *link* (variabel) “o” (-) dalam *loop*. Tetapi hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana antar variabel saling mempengaruhi, baik secara positif (*positive link*) maupun secara negatif (*negative link*) terhadap suatu sistem yang diteliti.

Dan untuk mempermudah simulasi model *systems Thinking* dapat menggunakan *Software – software* yang didisain untuk membuat simulasi model *systems thinking*, seperti *software Dynamo, Vensim, Stella, I-think, Powersim*. Dan *software* yang peneliti gunakan sebagai *tool* untuk membuat simulasi *systems thinking* dalam penelitian ini adalah *software Vensim*. *Vensim* mampu memberikan notasi grafik yang kompak dan informatif, dan kelengkapan alat - alat untuk mempercepat konstruksi serta menganalisa model suatu proses. Perlu ditegaskan di sini bahwa menggunakan *software vensim* tidak berarti dengan sendirinya menggunakan metodologi *system thinking*. *Software* disini hanyalah sebagai alat (*tool*) untuk mempermudah simulasi model *systems thinking*, karena apabila menggunakan *excel*, variabel yang digunakan dalam *loop* dapat berubah – ubah, sehingga menghambat pembuatan simulasi model *systems thinking* dalam *Causal Loop diagram* (CLD) sistem tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam merancang *loop* dari suatu sistem dalam lingkungan, misal program penghijauan, maka perlu disepakati atau menentukan batas-batas dari sistem sendiri, seperti elemen mana

yang ada di dalam atau bagian dari sistem dan elemen mana yang berada di luar sistem. Hal tersebut untuk memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam pendekatan *systems thinking* dikenal adanya paradigma yang menyatakan bahwa suatu perubahan (perilaku atau dinamika) dimunculkan oleh suatu struktur yaitu unsur-unsur pembentuk yang saling bergantung (*interdependensi*). Logikanya menurut *systems thinking*, perilaku atau dinamika tersebut membentuk struktur dimana unsur-unsur pembentuknya saling bergantung. Dalam hal ini tidak hanya unsur-unsur pembentuk belaka, tetapi terdapat adanya pola keterkaitan antar unsur.

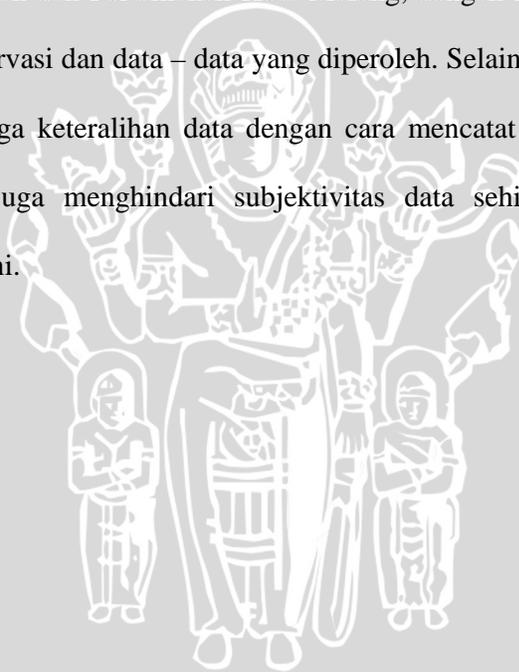
Menurut Senge (2004:173) esensi *systems thinking* memperlihatkan hubungan saling bergantung atau mempengaruhi dan dapat saling mempengaruhi (*feed back*), bukan hubungan sebab akibat searah. *Systems thinking* juga melihat adanya proses-proses perubahan dan berkelanjutan (*on going prosesess*) dan bukan potret-potret sesaat.

Terkait dengan judul penelitian ini, sistem yang akan dianalisis dalam metode *systems thinking* yaitu tentang kebijakan penghijauan melalui program Malang Ijo Royo-Royo yang merupakan solusi dalam mengatasi isu-isu lingkungan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Analisis data kualitatif dengan metode *Systems Thinking* pada dasarnya adalah ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Oleh karena itu selama melakukan penelitian di lapangan, peneliti akan berusaha melihat gejala dalam situasi

sosial/obyek penelitian yang alamiah, dan memperhatikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah.

Selama penelitian, peneliti akan berusaha untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh dari penelitian. Penulis akan melakukan pengecekan data dengan berupaya untuk membandingkan data yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan memadukan data hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, dengan fakta yang ada di lapangan berupa observasi dan data – data yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga akan berusaha menjaga keteralihan data dengan cara mencatat setiap informasi yang diterima dan juga menghindari subjektivitas data sehingga data yang diperoleh adalah murni.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, yang memiliki wilayah seluas 11.005,66 Ha yang secara administratif dibagi dalam 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, dan Kecamatan Lowokwaru. Dari 5 kecamatan yang ada tersebut terbagi atas 5 kelurahan. Kota Malang terletak dibagiansentral dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Secara geografis Kota Malang berada pada koordinat $112^{\circ}06' - 112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}06' - 8^{\circ}02'$ Lintang Selatan, dari segi fisik terletak pada ketinggian 440 – 667 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan kondisi kelerengannya, Kota Malang sebagian besar dataran rendah dengan tingkat

kemiringan antara 0 – 15%, sedangkan sungai yang mengalir di Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Metro dan Amprong (Bappeko Kota Malang, 2007 Hal. 1)

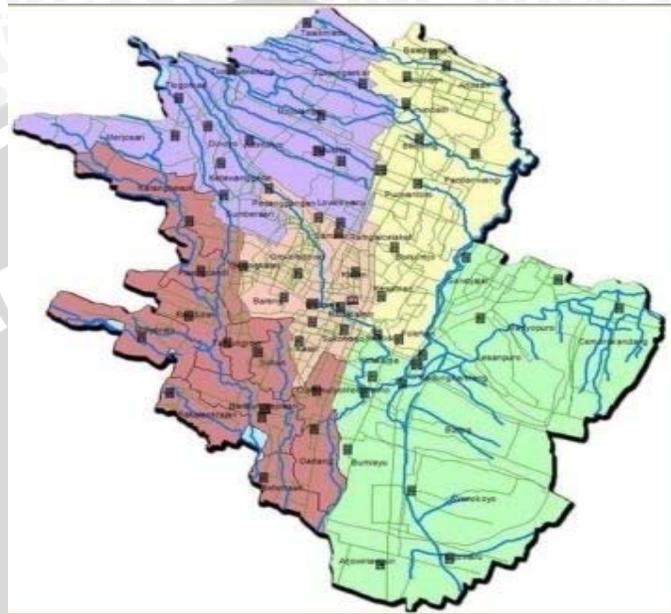
a. Topografi

Kota Malang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 339 s/d 662,5 m diatas permukaan laut, dimana daerah terendah terletak di desa Tlogowaru, Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang mempunyai kemiringan antara 0 – 15%. (Bappeko Kota Malang, 2007 Hal. 2)

b. Iklim

Jenis iklim di kota Malang merupakan iklim tropis, suhu udara rata – rata tahunan berkisar pada 22,8⁰C sampai dengan 25,2⁰C, sedangkan suhu maksimum adalah 32,6⁰C dan suhu minimum 17,2⁰C, seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Agustus dengan kelembapan udara rata-rata berkisar 70% - 80% dimana kelembapan maksimum adalah 97% dan minimum 32%. (Bappeko Kota Malang 2007, hal. 3)

Gambar 4
Peta Wilayah Kota Malang



Su

mber: Bappeko Kota Malang 2007, hal. 3

2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, semakin menuntut daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerahnya masing – masing secara lebih mandiri, efektif dan efisien. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan sendiri bagi daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerahnya masing – masing.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Malang merasa perlu untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahannya sesuai dengan tuntutan

masyarakat di berbagai bidang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang lebih bersih dan berwibawa. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi pada tahun 2001 dimana sebagian besar kewenangan pusat didelegasikan atau dilimpahkan pada daerah, Pemerintah Kota Malang merasa perlu untuk mengkaji berbagai pengelolaan yang telah maupun akan menjadi kewenangannya. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Malang melakukan upaya pengelolaan persampahan.

Maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah melaksanakan tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Sedangkan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, yakni sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang kebersihan dan pertamanan.
- c. Pelaksanaan pendataan dan pemungutan retribusi daerah di bidang kebersihan dan pemakaman.
- d. Pelaksanaan di bidang kebersihan pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman.

- e. Pengelolaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, dan dekorasi kota, dan pemakaman.
- f. Pengawasan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota dan pemakaman.
- g. Penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, dan dekorasi kota dan pemakaman.
- h. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja.
- i. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- j. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman.
- k. Pemberian pertimbangan teknis kerja sama di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota dan pemakaman.
- l. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, dan dekorasi kota, dan pemakaman.
- m. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi.
- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
- o. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- p. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).

- q. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan dekorasi kota dan pemakaman.
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah.
- t. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional.
- u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Strategi peningkatan pelayanan pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang difokuskan pada visi untuk mewujudkan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Hal ini pada akhirnya dapat mewujudkan kepentingan masyarakat yang luas.

1) Visi

Misi Kota Malang yang dijadikan rujukan perumusan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah: “meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat”.

Berangkat dari visi dan misi Kota Malang tersebut, maka visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dinyatakan sebagai berikut: “terwujudnya pelayanan prima bidang kebersihan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang berwawasan lingkungan”.

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang diatas, dimaksudkan sebagai berikut:

“dengan peningkatan pelayanan diharapkan penanganan masalah kebersihan di Kota Malang dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memberikan kepuasan masyarakat kepada masyarakat yang dilayani. Dengan peningkatan kebersihan akan menunjang kebersihan lingkungan yang pada akhirnya kelestarian lingkungan dapat terwujud dengan arti kata pelaksanaan kebersihan dapat mendukung kelestarian lingkungan”.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, selanjutnya dalam misi yang menjadi pedoman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui pelaksanaan program – program yang ditetapkan, dengan upaya mendayagunakan sumber daya yang ada (Organisasi, Dana dan Sumber daya Manusia), maka misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan dan pengolahan sampah secara efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualifikasi dan kemampuan yang tinggi.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta di bidang kebersihan.

4. Peningkatan derajat kesehatan lingkungan.

3) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, yakni:

1. Terwujudnya pengelolaan dan pengolahan sampah yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kebersihan lingkungan.
3. Meningkatkan derajat kebersihan masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
5. Terselenggaranya peningkatan kinerja karyawan.

4) Sasaran

Sedangkan sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang meliputi:

1. Tercapainya pengelolaan dan pengolahan sampah yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya peningkatan pengolahan sampah dan air limbah.
3. Terwujudnya kerja sama pengelolaan dan pengolahan sampah dan air limbah dengan pihak ketiga.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Peningkatan kinerja karyawan.

5) Kebijakan

Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, oleh karena kebijakan teknis pada dasarnya adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan persampahan.
2. Meningkatkan pengolahan sampah untuk mengurangi biaya pengelolaan sampah.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan persampahan dan air limbah.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Merancang peraturan daerah persampahan dan limbah.
7. Pembinaan staf untuk meningkatkan kinerja dan kualitas personil.
8. Peningkatan kebersihan lingkungan.

b. Struktur Organisasi

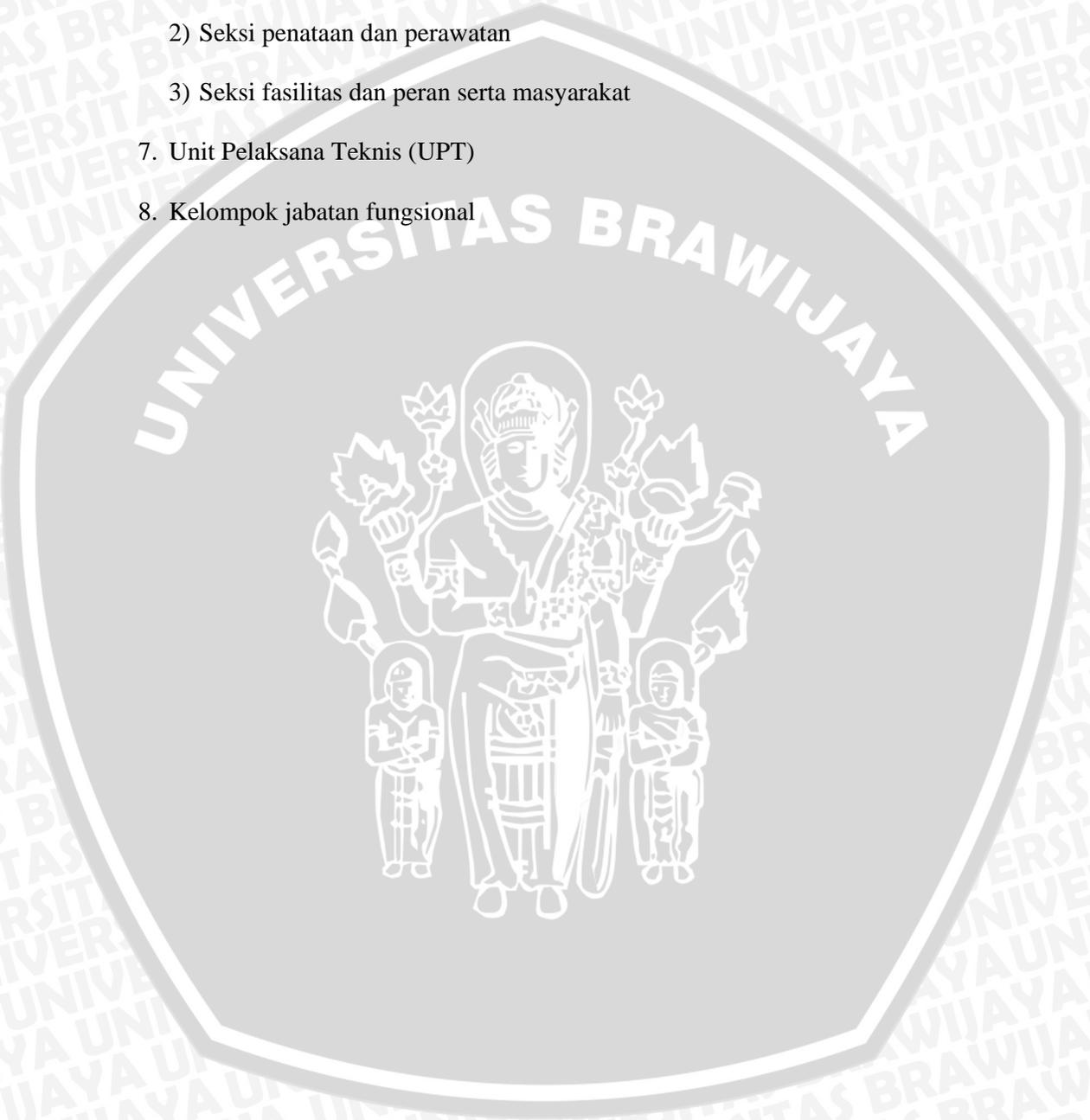
Untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka disusun struktur organisasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Keputusan Walikota Malang No. 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang maka susunan atau struktur organisasi dan uraian tugas yang

ada di Dinas kebersihan Kota Malang adalah organisasi dengan bentuk garis – garis staf, di mana masing – masing bagian bertanggung jawab terhadap bagian yang ada di atasnya.

Sebagai tindak lanjut maka untuk memudah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang terdiri dari:

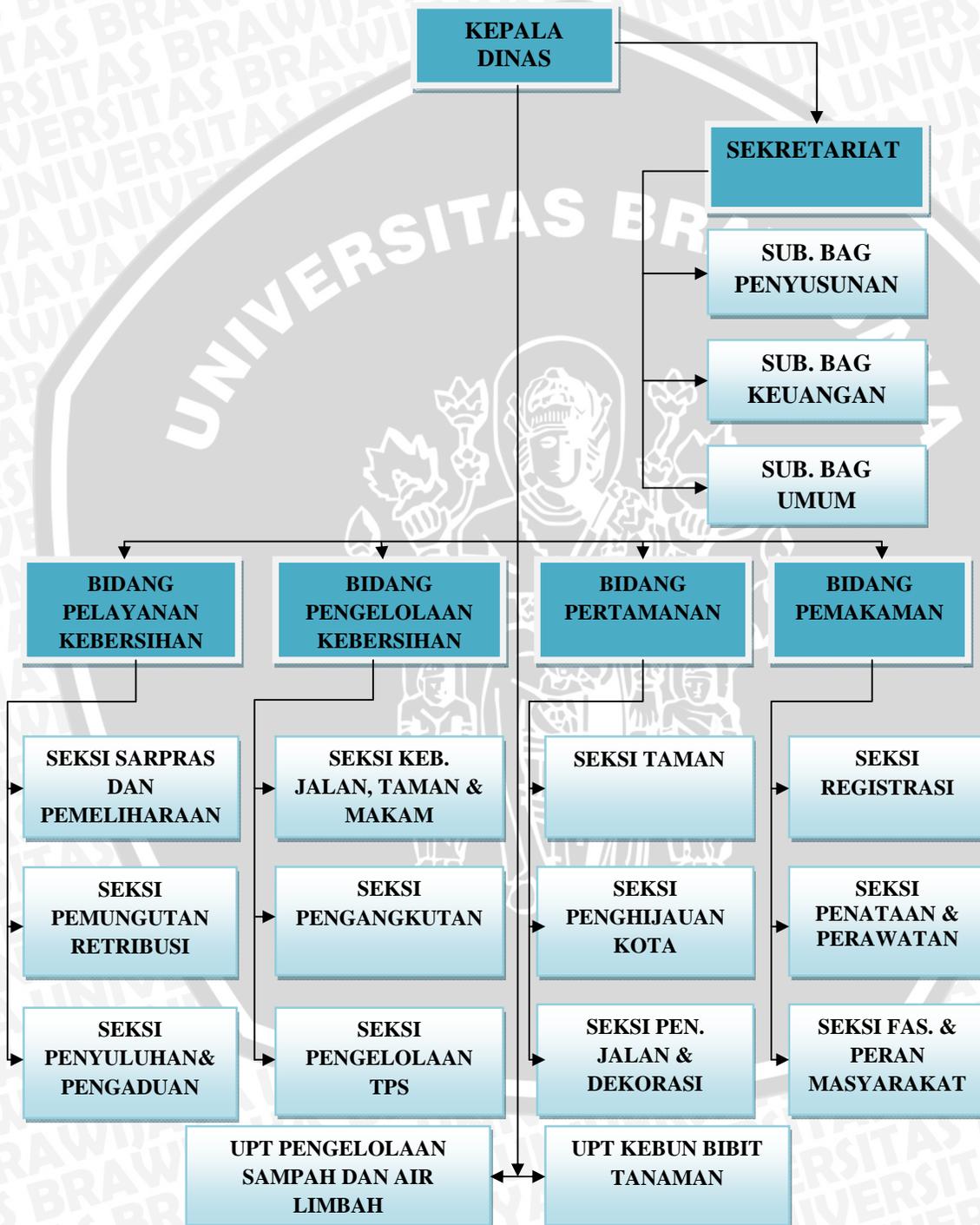
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - 1) Sub bagian penyusunan program
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian umum
3. Bidang pelayanan kebersihan terdiri dari;
 - 1) Seksi sarana, prasarana dan pemeliharaan
 - 2) Seksi pemungutan retribusi
 - 3) Seksi penyuluhan dan pengaduan
4. Bidang pengelolaan kebersihan, terdiri dari;
 - 1) Seksi kebersihan jalan, taman dan makam
 - 2) Seksi pengangkutan
 - 3) Seksi pengelolaan TPS dan TPA
5. Bidang pertamanan terdiri dari;
 - 1) Seksi taman
 - 2) Seksi penghijauan kota
 - 3) Seksi penerangan jalan dan dekorasi kota

6. Bidang pemakaman, terdiri dari;
 - 1) Seksi registrasi
 - 2) Seksi penataan dan perawatan
 - 3) Seksi fasilitas dan peran serta masyarakat
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok jabatan fungsional



Gambar 5

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2010 hal. 8.

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Malang

Jumlah karyawan atau karyawan (personil) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebanyak 1.619 orang, terdiri dari 187 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.432 orang pegawai tidak tetap (PTT), yang menurut golongan terbagi dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Personil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

No	Bagian	Golongan				Jumlah (PNS)	CPNS	PTT	Jumlah
		I	II	III	IV				
1	Kepala Dinas				1	1			1
2	Sekretariat	6	21	13	1	41	12	4	32
3	Pengelolaan Kebersihan	350	96	3	1	450	295	194	939
4	Pelayanan Kebersihan	2	17	7	1	27	8	2	37
5	Pertamanan	42	58	9	1	110	32	11	153
6	Pemakaman	11	23	3	1	38	8	4	50
7	UPT Kebun Bibit Tanaman		10	2		12	3		15
8	UPT Pengelolaan	5	9	3	1	18	50	18	86

Sampah dan Air Limbah								
Jumlah				697	408	233	1338	

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010, hal. 10

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui jumlah karyawan atau pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, yakni sejumlah 1.338 dengan rincian jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 697 orang, calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 408 orang, dan pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 233 orang.

d. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

- A. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- B. Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan keputakaan serta kearsipan. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja).
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
 - d. Penyusunan penetapan kinerja (PK).

- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
 - f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.
 - g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
 - h. Pengelolaan anggaran, barang dan retribusi.
 - i. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
 - j. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
 - k. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - l. Pengkoordinasian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).
 - n. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
 - o. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 - p. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik melalui *website* pemerintah daerah.
 - q. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- 1) Sub bagian Penyusunan Program, melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Dan fungsinya adalah:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Renja.

- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - d. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK).
 - e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
 - h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 - i. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik melalui *website* Pemerintah Daerah.
 - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Sub bagian keuangan mempunyai fungsi;
- a. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan.
 - c. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

- d. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
- f. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.
- g. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah.
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sub bagian Umum, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan, fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
- b. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang pelayanan kebersihan melaksanakan tugas pokok di bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan daerah, mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang pelayanan kebersihan.
- b. Pelaksanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kebersihan.
- c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penagihan retribusi daerah di bidang kebersihan.
- d. Pelaksanaan pendataan dan penagihan retribusi kebersihan.
- e. Pelaksanaan pendataan dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan.
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan sampah.
- g. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan.
- h. Penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perijinan di bidang kebersihan.
- i. Penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis dalam pencabutan perijinan di bidang kebersihan yang menjadi kewenangannya.
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- k. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pelayanan kebersihan.
- l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Sarana, Prasarana, melaksanakan tugas pokok perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana kebersihan. Dan Seksi Sarana, Prasarana mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kebersihan.

b. Perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kebersihan.

c. Penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan kebersihan.

d. Pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan sarana, prasarana dan peralatan kebersihan.

e. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pelayanan kebersihan.

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemungutan Retribusi, melaksanakan tugas pokok pendataan, pengembangan potensi dan pemungutan retribusi kebersihan. Dan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendataan, pengembangan potensi dan pemungutan retribusi kebersihan.

- b. Pelaksanaan pendataan kepada wajib retribusi pelayanan kebersihan.
 - c. Pelaksanaan kajian potensi pengembangan pendapatan dari retribusi kebersihan.
 - d. Penyiapan lahan penetapan jumlah wajib retribusi kebersihan dan besarnya penerimaan retribusi kebersihan.
 - e. Pelaksanaan pemungutan, penagihan dan penerimaan retribusi kebersihan.
 - f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi/pembukuan retribusi kebersihan.
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan, melaksanakan tugas pokok penyuluhan dan pengelolaan pengaduan di bidang kebersihan dan pertamanan. Dan mempunyai fungsi;
- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pengelolaan pengaduan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
 - b. Pelaksanaan penyuluhan kebijakan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

- d. Perencanaan jalinan kerja dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kebersihan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat/pihak ketiga dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kebersihan.
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pengelolaan Kebersihan melaksanakan tugas pokok kebersihan jalan, taman, makam, pengangkutan sampah, pengelolaan TPS dan TPA, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang pengelolaan kebersihan
- b. Pelaksanaan kebersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, jalan lingkungan pemukiman, taman kota dan makam.
- c. Pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan TPS dan TPA.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan.
- f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengelolaan kebersihan.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam, melaksanakan tugas pokok pemeliharaan kebersihan pad jalan, taman dan makam Daerah.

dan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemeliharaan kebersihan pada jalan, taman kota dan makam.

b. Pelaksanaan pembersihan jalan – jalan umum, tempat-tempat umum dan jalan lingkungan pemukiman, taman kota dan makam.

c. Pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan.

d. Pelaksanaan pemantauan petugas kebersihan.

e. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana serta peralatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengangkutan melaksanakan tugas pokok pengangkutan sampah, dan mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan pengangkutan sampah.

b. Pelaksanaan pengangkutan sampah, air kotor dan/atau tinja dari kawasan pemukiman, pertokoan dan bak penampungan sementara ke penampungan akhir.

- c. Pelaksanaan pengangkutan sampah pada jalan.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah
- e. Perencanaan kebutuhan dan penginventarisasian sarana angkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengelolaan TPS dan TPA, melaksanakan tugas pokok pengelolaan dan pemeliharaan TPA dan TPS. Dan mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan TPS dan TPA.
- b. Pelaksanaan penyiapan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA.
- d. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA.
- e. Pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan bersama SKPD/instansi terkait yang diakibatkan keberadaan lokasi TPS dan TPA.
- f. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan lokasi TPS dan TPA.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman, penghijauan kota, penerangan jalan dan dekorasi kota. Adapun fungsi dari Bidang Pertamanan adalah;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta penerangan jalan dan dekorasi kota.
- b. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP serta penerangan jalan dan dekkorasi kota.
- c. Pelaksanaan pendataan/inventarisasi dan pengawasan/monitoring taman kota/lingkungan, penghijauan RTHKP serta penerangan jalan dan dekkorasi kota.
- d. Pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame.
- e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Mimimal (SPM) bidang taman kota, penghijauan serta penerangan jalan dan dekkorasi kota.
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- g. Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Taman, melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota. Dan mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota.
- b. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengaturan keindahan taman kota.
- c. Pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan pembinaan taman kota.
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pengendalian fungsi taman kota.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian fungsi taman kota.
- f. Penyusunan konsep-konsep perencanaan taman kota termasuk pedoman dan kriterianya.
- g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan taman kota dengan instansi terkait secara horizontal dan/atau vertikal.
- h. Penyusunan panduan pembangunan, pemeliharaan taman kota
- i. Pemberian konsultasi dan/atau saran pemeliharaan taman bagi masyarakat yang membutuhkan.
- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penghijauan Kota, melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan, penataan, pemantauan, pemeliharaan, dan pengawasan penghijauan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi hutan kota, jalur hijau, taman kota, taman lingkungan, dan zona penyangga kawasan hijau kota. Dan mempunyai fungsi yaitu;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka di bidang penghijauan kota.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pengaturan keindahan penghijauan RTHKP.
- c. Pelaksanaan penghijauan RTHKP.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan keindahan penghijauan RTHKP.
- e. Pelaksanaan inventarisasi penghijauan RTHKP.
- f. Penyusunan konsep-konsep perencanaan penghijauan kota, jalur hijau, taman kota, taman lingkungan dan zona penyangga kawasan hijau kota.
- g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan penghijauan dengan instansi terkait secara horizontal dan/atau vertical, termasuk rekomendasi danksi pelanggaran penebagan tanaman penghijauan.
- h. Pemberian konsultasi dan/atau saran penghijauan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penerangan Jalan, melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan, penataan, pemantauan, pemeliharaan, dan pengawasan penerangan jalan umum dan dekorasi kota. Dan mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota.

b. Pelaksanaan pembangunan, pengaturan dan keindahan penerangan jalan umum dan dekorasi kota

c. Pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan penerangan jalan umum dan dekorasi kota.

d. Pelaksanaan inventarisasi lampu penerangan jalan umum dan dekorasi kota.

e. Penyusunan konsep-konsep perencanaan penerangan jalan umum dan dekorasi kota termasuk pedoman dan kriterianya.

f. Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan penerangan jalan umum dan dekorasi kota dengan instansi terkait secara horizontal dan/atau vertikal.

g. Pelaksanaan pembinaan penerbitan penggunaan penerangan jalan umum sesuai dengan peruntukannya.

h. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemasangan reklame.

i. Pemberian konsultasi dan/atau saran perihal penerangan jalan umum dan dekorasi kota bagi masyarakat yang membutuhkan.

- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemakaman melaksanakan tugas pokok perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemantauan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di Taman Pemakaman Umum (TPU) dan khusus. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemakaman mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang pemakaman.
- b. Pelaksanaan penyiapan lahan pemakaman.
- c. Pelaksanaan pengaturan, pemanfaatan penggunaan, perawatan dan penerbitan lahan pemakaman.
- d. Pelaksanaan inventarisasi taman pemakaman umum.
- e. Pengaturan pembuatan tanda peringatan atau peruntukan makam.
- f. Pelaksanaan fasilitasi, petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat dan/atau ahli waris dalam pemeliharaan dan perawatan makam keluarga.
- g. Pemrosesan pertimbangan teknis perijinan penggunaan tanah makam
Pemrosesan rekomendasi penyediaan lahan makam bagi pengembang.
- h. Pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar/tidak dikenal yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah.

- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Registrasi, melaksanakan tugas pokok kegiatan inventarisasi, perencanaan, penyiapan petak pad ataman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus. Dan mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan registrasi.
- b. Penyusunan konsep – konsep perencanaan penyiapan petak makam paa taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus termasuk pedoman dan kriterianya.
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknis penyiapan petak makam
- d. Pelaksanaan penyiapan petak makam.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penataan dan Perawatan melakukan tugas pokok perencanaan, penataan, perawatan, pemantauan dan pengawasan taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus, yang mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penataan dan perawatan taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus.

- b. Pelaksanaan penataan taman makam dan petak makam.
- c. Pelaksanaan perawatan, perbaikan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus.
- d. Penyusunan konsep-konsep penataan, perawatan, dan perbaikan, pada taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Fasilitasi dan Peran Serta Masyarakat, melaksanakan tugas pokok fasilitasi peran serta masyarakat dan sosialisasi dalam rangka pengembangan taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus. Yang mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang fasilitasi peran serta masyarakat.
- b. Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan penghijauan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (DKP).

Selanjutnya adalah data sekunder, yaitu berupa data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dan arsip-arsip di lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Analisis sistem dari kebijakan penghijauan Kota Malang, akan membahas bagaimana jaringan sistem pelaksanaan kebijakan penghijauan oleh Pemerintah Kota Malang, sehingga kebijakan tersebut dapat menjadikan Kota Malang sebagai kota yang hijau, asri dan sehat. Adapun data yang terkait di dalamnya meliputi:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Data dalam pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi data tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari kebijakan penghijauan Kota Malang, yang dikenal dengan “Malang Bestari 2024”. Rangkaian kegiatan penghijauan tersebut yaitu Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang dilaksanakan sejak tahun 2004-2008, mulai dari MIRR I-MIRR V. Setelah kegiatan MIRR selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan “Malang Berbunga” yang dimulai sejak tahun 2009-2014 mendatang. Pengelolaan RTH dalam rangka penghijauan Kota Malang tersebut juga tidak dapat hanya dilaksanakan oleh pihak pemerintah saja, tapi oleh dibutuhkan peranan elemen stakeholders. Karena dalam data ini, terdapat tiga pilar utama pengembangan gerakan penghijauan, yaitu bidang pendidikan, perindustrian dan pariwisata.

2. Data *Corporate Social Responsibility* (CSR) 2010-2011

Data CSR disini tentunya mendukung penelitian untuk menganalisis sistem dari kebijakan penghijauan Kota Malang dengan memaparkan data terkait dengan keterlibatan perusahaan milik swasta, pemerintah maupun perorangan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan. Seperti sumbangan berupa bibit pohon penghijauan, pot, maupun polybet, bahkan elemen stakeholders tersebut terlibat langsung dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan penghijauan yang dilaksanakan pemerintah Kota Malang.

3. Data Taman dan Hutan Kota yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Malang.

Taman dan Hutan Kota tentunya berfungsi sebagai daerah resapan air untuk mencegah banjir, *landmark* kota dan tentunya mengurangi polusi udara, taman dan hutan kota merupakan ruang terbuka hijau, untuk itu harus dikelola dengan baik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Data Taman dan Hutan Kota disini akan memaparkan taman dan hutan kota apa saja yang dikelola oleh pemerintah pada tahun 2010 dan wilayah-wilayah mana saja yang memiliki taman kota terbanyak dan yang paling sedikit, yang mana hal tersebut kembali lagi kepada tingkat kebutuhan dari masing-masing wilayah.

4. Data Taman dan Hutan Kota yang dikelola oleh masyarakat

Selain dikelola oleh pemerintah, taman dan hutan kota yang menjadi RTH Kota Malang juga dikelola oleh masyarakat. Dalam data taman dan hutan kota yang dikelola oleh masyarakat tersebut, akan memaparkan nama taman dan hutan kota, luas dari masing-masing taman dan hutan kota, nomor sertifikat, dan lokasi taman dan hutan kota yang berada di beberapa kelurahan di wilayah Kota Malang. Dari data taman dan hutan kota tersebut tentunya mendukung penelitian ini dalam menganalisis sistem dari kebijakan penghijauan Kota Malang.

b. Data Faktor pendukung (*positive links*) dan penghambat (*negative links*) pelaksanaan penghijauan wilayah Kota Malang. Adapun data yang terkait di dalamnya meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 03 Tahun 2003 tentang Pengelolaan

Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Adanya peraturan tersebut tentunya bersifat mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan penghijauan Kota Malang. Namun, Perda No.3 Tahun 2003 tersebut akan memaparkan beberapa poin yang tidak relevan dengan penegakan hukum pada peraturan tersebut, berupa sanksi administrasi dan pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

2. Kumpulan peraturan terkait penghijauan

Selain Perda No. 03 Tahun 2003 diatas, juga terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penghijauan Kota Malang, yaitu

Keputusan Walikota Malang No. 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon. Pengumuman Walikota Malang No. 01 Tahun 2008 tentang Program Penghijauan. Pengumuman Walikota Malang No. 05 Tahun 2004 tentang Peduli Lingkungan. Yang mana peraturan-peraturan tersebut tentunya mendukung adanya kebijakan penghijauan Kota Malang.

c. Data pelaksanaan Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)

Data berikutnya adalah data yang terkait dengan Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR). Sebagai suatu bahan rekomendasi dalam penelitian ini nantinya, maka data MIRR disini memaparkan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam MIRR itu sendiri sejak tahun 2004-2008. Dan mengapa MIRR dijadikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini. Dan program/kegiatan apa saja yang dapat dikembangkan dalam MIRR ini nantinya, sehingga dapat meminimalisir adanya variabel negatif yang digambarkan dengan *negative link*. Jadi MIRR disini, bukan lagi hanya sekedar variabel yang mendukung kebijakan penghijauan, tetapi dengan memaksimalkan MIRR menjadi suatu kebijakan penghijaua, atau sebagai solusi atas rusaknya lingkungan hidup yang terjadi di Kota Malang.

Data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang tersebut kemudian diolah dan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Data Analisis Sistem Dari Kebijakan Penghijauan Kota Malang

Dalam mewujudkan Visi – Misi Kota Malang yakni “terwujudnya Kota Malang yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan”, yaitu dengan melakukan pengembangan gerakan penghijauan di tiga aspek, yaitu: (1) pendidikan, (2) perindustrian, (3) pariwisata.

Tabel 3
Pengembangan Gerakan Penghijauan di Tiga Bidang

NO.	BIDANG	TUJUAN
1.	Pendidikan	1) Menjadikan taman dan hutan kota sebagai laboratorium penelitian. 2) Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pengembangan penghijauan kota. 3) Mewujudkan gerakan sekolah seribu bunga. 4) Mengembangkan hutan kota sebagai kawasan konservasi.
2.	Perindustrian	1) Pengembangan tanaman bernilai ekonomis. 2) Pengembangan tanaman yang mampu mengurangi polusi industri. 3) Menjadikan kawasan industry sebagai kawasan ramah lingkungan.
3.	Pariwisata	1) Pengembangan taman kota sebagai ruang rekreasi 2) Pengembangan kota sebagai ruang relaksasi. 3) Pengembangan <i>landmark</i> kota.

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam *Pengelolaan RTH* (2010:8)

Dari tabel 3 diatas dapat kita lihat pengembangan gerakan penghijauan di tiga aspek, hal tersebut menandakan bahwasanya dalam mewujudkan Kota Malang yang asri dan hijau hendaknya mengembangkan gerakan penghijauan dalam ketiga aspek tersebut, baik bidang pendidikan, perindustrian maupun pariwisata. Dalam pengembangan gerakan penghijauan tentunya juga membutuhkan peran dari pihak lainnya, baik itu masyarakat (*civil society*), pelaku bisnis, dunia pendidikan seperti perguruan tinggi maupun kalangan swasta lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet, selaku Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai berikut:

“dalam mewujudkan visi dari gerakan penghijauan Kota Malang yaitu terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan menuju kota Malang yang asri dan indah tentunya membutuhkan kerja sama dari elemen stakeholders. Pemerintah tidak dapat mewujudkan hal tersebut seorang diri karena permasalahan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012).

Berikut gambaran pelibatan elemen stakeholders dalam Program MIRR sebagai salah satu rangkaian dari gerakan penghijauan Kota Malang, yaitu:

Gambar 6
Pelibatan Kegiatan MIRR



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam
Pengelolaan RTH (2010:10)

Gambar 6 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang sangat berperan penting dalam kegiatan penghijauan khususnya Malang Ijo Royo – royo (MIRR), yaitu warga, pemerintah dan elemen takeholders lainnya. Keterlibatan warga dapat berupa dalam hal penataan pohon maupun kerja bakti, keterlibatan stakeholders seperti dunia bisnis (Sampoerna Hijau), perguruan tinggi dan kalangan swasta lainnya. Keterlibatan tiga aspek tersebut tentunya menunjang efektivitas dan efisiensi gerakan MIRR yang sudah terlaksana sebanyak 5 kali dalam jenjang 5 tahun berturut – turut, yaitu sejak tahun 2004 – 2008. Jadi tidak hanya mengharapkan peran pemerintah saja, Karena pemerintah hanyalah sekedar pembuat kebijakan (*decision maker*) dan fasilitator.

Dukungan terhadap pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan penghijauan Kota Malang, oleh berbagai pihak tentunya sangat diharapkan demi terwujudnya Kota Malang yang hijau dan asri. Berangkat dari kesadaran pentingnya pohon bagi kehidupan, maka dicanangkanlah semboyan “Tiada Hari Tanpa Menanam” oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas penghijauan Kota Malang. Semboyan tersebut dilandasi semangat untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota, agar semakin asri, hijau dan memiliki kualitas udara yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet, selaku Kepala Seksi

Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan lagi sekedar ajang untuk promosi oleh perusahaan-perusahaan swasta, tapi lebih kepada himbuan kepada mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Dan sejauh ini pelaksanaan CSR terkait penghijauan di Kota Malang sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan sumbangan-sumbangan berbagai bibit pohon, maupun terlibat secara langsung dalam kegiatan penghijauan tersebut seperti HM. Sampoerna”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2012)

Sesuai data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, beberapa pihak dan kegiatan yang bekerjasama dalam kurun waktu 2010 – 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Bank Mandiri: 465 polybag
- b. Perum Jasa Tirta: 600 polybag
- c. Hotel Helios: 50 polybag
- d. Auto 2000 Sukun: 1.000 polybag
- e. Pertamina: 400 polybag
- f. Matos: 200 polybag
- g. PT. Sarinah: 1.000 polyba
- h. Yayasan Cor Jesu: 475 polybag
- i. SMK 4 Malang: 40 polybag
- j. SMPN 1 Malang: 50 polybag
- k. Taspen: 700 polybag
- l. Bank BRI: 6.090 polybag
- m. Gapeksindo: 1.255 polybag

n. STIE Indonesia : 25 polybag

Berikut akan disajikan data terkait *Corporate social responsibility* oleh berbagai elemen stakeholders, baik perusahaan swasta, BUMN, dunia pendidikan maupun usaha perseorangan yang ikut terlibat langsung dalam mendukung penghijauan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan Kota Malang.

Tabel 4
Data CSR 2010

Bulan	Elemen Stakeholders	Jenis – Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman
Januari	BANK MANDIRI	Mangga, Saman, Mahoni, Glodokan Lokal, Tanjung, Rambutan, Gembilina, Pucuk Merah, Kantil	465
	JASA TIRTA	Saman, Filicium, Suren, Nangka	600
Februari	Hotel Helios	Tanjung	50
	DISPERTA	Mangga, Rambutan, Sawo, Nangka	300
Maret	Klinik Mata Dr. Cipto	Glodokan Lokal, Mangga	80
	AUTO 2000 Sukun	Sukun	1.000
Juli	PERTAMINA	Mangga	

			400
Agustus	MATOS	Glodokan Tiang	200
	PT. SARINAH	Mangga	1.000
Oktober	SMU Santo Yosep	Tanjung dan Sawo Kecil	475
November	SMK 4 Malang	Tanjung	40
Desember	DISPERTA	Glodokan Lokal, Kenari, Mahoni, Nyamplung, Saman, Ketapang, Matoa, Mahoni Besar	6.355
	SMPN 1 Malang	Tanjung	50
JUMLAH			11.015

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam *Data CSR* (2010:2)

Dari data CSR 2010 diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah tanaman yang disumbangkan antar elemen stakeholders, seperti BANK MANDIRI yang menyumbangkan bermacam – macam jenis tanaman dengan jumlah yang lumayan banyak, dan juga DISPERTA menyumbangkan bermacam – macam jenis tanaman dengan jumlah paling banyak di tahun 2010. Tetapi ada juga elemen stakeholders yang menyumbangkan satu jenis tanaman dengan jumlah yang banyak seperti Auto 2000 Sukun yang menyumbangkan

tanaman sukun sebanyak 1.000 bibit dan PT. Sarinah yang menyumbangkan 1.000 Mangga. Alasan pemilihan satu jenis tanaman dengan jumlah yang banyak tentu saja karena pertimbangan faktor kebutuhan dan kegunaan tanaman tersebut. Selain dari segi estetika dan ekologi, tanaman sukun dan mangga merupakan tanaman pohon produktif, karena buah yang dihasilkan dapat dikonsumsi maupun diperjualbelikan, hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Namun kegiatan CSR oleh elemen stakeholders pada tahun 2010 tidak sepenuhnya tiap bulan memperoleh sumbangan bibit, seperti pada tabel diatas, pada bulan April, Mei, dan Juni, pemerintah Kota Malang tidak memperoleh sumbangan tanaman dari elemen stakeholders. Penyebabnya karena faktor ketersediaan bibit yang tidak dapat tiap bulan diperoleh, walaupun tersedia, usia bibit sebagai tanaman penghijauan masih belum cukup, oleh karena itu pada bulan April, Mei dan Juni tidak terdapat sumbangan bibit pohon sebagai bentuk CSR dari masing – masing instansi swasta maupun BUMN. Selain itu memang masih terdapat beberapa instansi yang masih belum mengikuti kegiatan *corporate social responsibility* (CSR).

Tabel 5
Data CSR 2011

Bulan	Elemen Stakeholders	Jenis – Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman
	DISPERTA	Ketapang, Nyamplang, dan Tanjung	2.480

Januari	TASPEN	Sukun, Kelapa, Sawo, Nangka, Durian, Mangga, Jambu Merah, Gembilina dan Sengon Buto	700
	BANK BRI	Andong, Bakung, Kolbanda, Philodendrom, Bugenvil Varigata, Jamburan Putih, Jamburan Hijau, Puring, Palembang, Palembang Ekor Tupai, Tabebuaya	6.010
Februari	GAPEKSINDO	Medinela, Azalea, melati, Puring, Corombusa, Teko Maria, dan Pucuk Merah	1.330
	STIE INDONESIA	Tanjung	25
Jumlah			10.545

S : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam *Data CSR* (2011:2)

Data CSR pada Tahun 2011 diatas menunjukkan bahwa sumbangan bibit pohon di Kota Malang oleh elemen stakeholders hanya terselenggara pada bulan januari dan februari. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa

DISPERTA konsisten untuk selalu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan lingkungan melalui kegiatan CSR. Karena pada data kegiatan CSR 2010, DISPERTA juga rutin memberikan sumbangan pohon kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Program penghijauan sebagai solusi dari permasalahan lingkungan Kota Malang memang membutuhkan perhatian konsistensi dan keseriusan, baik itu antar pemerintah maupun elemen stakeholders lainnya.

Berikut ini akan disajikan tabel data taman kota, hutan kota dan kebun bibit yang dikelola oleh pemerintah Kota Malang.



Tabel 6
Data Taman Kota, Hutan Kota Dan Kebun Bibit Yang Dikelola Pemerintah Kota
Malang Tahun 2010

NO.	NAMA TAMAN/LOKASI	LUAS M ²	NOMOR SERTIFIKAT	KELURAHAN
1.	Tm. Jakarta (Hutan Kota)	2.221	-	Penanggungan
2.	Tm. Jalur tengah JA Suprpto	1.200	-	Rampal Celaket
3.	Tm. Bundaran P. Sudirman	1.812	SHP NO. 09	Bunul rejo
4.	Jalur Tengah Borobudur	1.650	-	Blimbing
5.	Tm. Dr. Sutomo	453	SU 138/2002	Klojen
6.	Tm. Jalur Tengah Kalimewek	950	-	Balearjosari
7.	Tm. Jalur Tengah R. Intan	2.224	SHP NO. 11	Arjosari
8.	Tm. Kalimewek	5.002	SHP NO. 10	Arjosari
9.	Tm. Segitiga Arjosari	185	SU 2392/2001	Arjosari
10.	Tm. Jalur Tengah Danau Toba	3.902	SHP NO. 03	Sawojajar
11.	Tm. Jalur Tengah Danau Jonge	1.498	SHP NO.12	Madyopuro
12.	Hutan Kota Velodrom	12.500	-	Madyopuro
13.	Hutan Kota Malabar	16.718	-	Oro – oro Dowo
14.	Hutan Kota Kediri	5.479	-	Gading Kasri
15.	Hutan Kota Pandanwangi	-	-	Pandangwangi

16.	Hutan Kota Indragi	-	-	Purwantoro
17.	Kebun Bibit Garbis	3.815	SU 162/2001	Bareng
18.	Kebun Bibit Sawojajar	750	-	Madyopuro
19.	Kebun Bibit Polehan	-	-	Polehan
JUMLAH				

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam *Data Hutan Kota dan Kebun Bibit* (2010:2)

Dari tabel 6 diatas terdapat beberapa taman kota, hutan kota maupun kebun bibit yang dikelola oleh pemerintah Kota Malang yang belum memiliki nomor sertifikat, dan juga keterangan luas lahan di beberapa taman/lokasi yang belum diterangkan. Hal tersebut karena memang lahan taman/lokasi tersebut masih dalam proses oleh Dinas Pertanahan. Sedangkan untuk keterangan Luas taman/lokasi yang belum disebutkan juga karena terdapat perubahan luas lahan seiring dengan adanya proses pembangunan oleh Pemerintah, sehingga tentunya perlu perubahan luas taman/lokasi dari yang sebelumnya.

Penanganan terhadap Taman Kota maupun Hutan Kota tersebut tidak hanya dikelola oleh pemerintah saja, tetapi ada beberapa Taman Kota maupun Hutan Kota yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat sendiri terhadap lingkungannya. Berikut akan disajikan data taman kota milik Pemerintah Kota Malang yang dikelola masyarakat.

Tabel 7
Data Taman Kota Milik Pemerintah Kota Malang Yang Dikelola Masyarakat
Tahun 2010

NO.	NAMA TAMAN/LOKASI	LUAS M ²	NOMOR SERTIFIKAT	KELURAHAN
1.	Tm. Dempo	2.475	SHP No. 32	Oro oro dowo
2.	Tm. Merbabu	3.924	SHP No. 33	Oro oro dowo
3.	Tm. Ungaran	639	SU 425/2002	Oro oro dowo
4.	Tm. Kunir	1.135	SHP No. 31	Oro oro dowo
5.	Tm. Creme	1.825	-	Oro oro dowo
6.	Tm. Terusan Dieng	1.954	SHP No. 14	Pisang Candi
7.	Tm. Anggur	1.600	-	Pisang Candi
8.	Tm. Agung	1.034	SU 227/2001	Pisang Candi
9.	Tm. Sawo	206	SU 116/2001	Bareng

10.	Tm. Simpang Kawi	187	SU 165/2001	Bareng
11.	Tm. Slamet	4.714	SHP No. 31	Gading Kasri
12.	Tm. Saparua	586	SU 332/2001	Kasin
13.	Tm. Banda	341	-	Kasin
14.	Tm. Sumba	587	SU 279/2001	Kasin
15.	Tm. Bengkalis	167	-	Kasin
16.	Tm. Riau	1.410	SHP No. 9	Kasin
17.	Tm. Belitung	620	-	Kasin
18.	Tm. Bundaran Halmahera	54	-	Kasin
19.	Tm. Ternate	156	-	Kasin
20.	Tm. Sarangan	2.164	SHP No. 24	Mojolangu
21.	Tm. Tata surya	560	-	Tlogomas
22.	Tm. Batu Permata	445	-	Tlogomas
23.	Tm. Serayu	135	SU 262/2001	Bunulrejo
24.	Tm. Cidurian	350	-	Purwantoro
25.	Tm. Ciujung	160	-	Purwantoro
26.	Tm. Cisadea	1.005	SHP No.34	Purwantoro
JUMLAH				

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam *Data Hutan Kota dan Kebun Bibit* (2010:4)

Dari tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa tiap – tiap kelurahan memiliki taman/lokasi yang berbeda – beda jumlahnya dibandingkan dengan kelurahan lainnya, contohnya saja kelurahan Kasin yang memiliki delapan Taman Kota,

sedangkan Kelurahan Tlogomas hanya memiliki dua Taman Kota. Hal tersebut disebabkan karena masing – masing kelurahan memiliki luas yang berbeda, dan juga kebutuhan resapan air yang berbeda tentunya. Namun, pengelolaan taman kota maupu hutan kota tersebut belum sepenuhnya terselenggara dengan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari ruang terbuka hijau privat di Kota Malang hanya mencapai 18% dari 20% luas ruang privar minimal dari keseluruhan suatu wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet, selaku Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai berikut:

“di Kota Malang sendiri, ruang terbuka hijau untuk privat masih terpenuhi sekitar 18%, yang seharusnya minimal 20% dari keseluruhan luas wilayah, jadi masih terdapat kekurangan sekitar 2%. Untuk itu pemerintah Kota Malang terus menggalakkan kegiatan penghijauan ini dengan mengajak berbagai elemen stakeholders, agar kesadaran terhadap lingkungan semakin besar, sehingga pemenuhan ruang terbuka hijau dapat mencapai 20% atau bahkan lebih”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2012)

Dari tabel diatas juga masih terdapat taman/lokasi yang masih belum dilengkapi keterangan luas dan juga nomor sertifikat. Kembali lagi karena hal tersebut masih dalam proses oleh dinas terkait, karena adanya perubahan dalam hal luas taman kota.

2. Data Faktor Pendukung (*positive links*) dan Penghambat (*negative links*) Pelaksanaan Penghijauan Wilayah Kota Malang

Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan dari kebijakan penghijauan Kota Malang, maka pengelolaan baik Taman Kota, Hutan Kota, maupun Kebun Bibit yang berfungsi sebagai daerah resapan air maupun untuk memperindah kota, tentunya diperlukan penanganan yang serius oleh

pemerintah Kota Malang maupun warga masyarakat. Karena lingkungan senantiasa berubah, oleh karena itu pemerintah harus selalu tanggap dalam permasalahan lingkungan. Sebagaimana pendapat bapak Slamet selaku Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, sebagai berikut:

“lingkungan selalu mengalami perubahan setiap saat, dan perubahan ini tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itulah, kita hendaknya selalu menjaga lingkungan kita agar tetap hijau, terutama mengenai keberadaan pohon. Pohon merupakan faktor vital yang sangat mempengaruhi lingkungan kita, dan jika tidak dikelola dengan baik maka pohon tersebut akan mati, dan tidak berfungsi lagi sebagai paru – paru kota dan keindahan juga sebagai resapan air”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012)

Wujud kepedulian Pemerintah Kota Malang dalam melestarikan lingkungan hidup, menciptakan lingkungan yang sehat dan hijau juga sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi Kota Malang, dan juga sebagai respon terhadap *global warming* yang sedang marak digalakkan di seluruh penjuru dunia, maka pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan bersama elemen stakeholders menyelenggarakan kegiatan penghijauan yang dikenal dengan “Malang Bestari 2024”. Sebagai suatu program yang bersifat *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) maka dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam penyelenggaraannya.

Berikut Data tahapan gerakan penghijauan menuju “Malang bestari 2024” yang dimulai dari tahun 2004 – 2024 mendatang yaitu sebagai berikut:

1. 2004 – 2008: Malang Ijo Royo – Royo.
2. 2009 – 2014: Malang Berbunga.
3. 2015 – 2019: Malang Berkicau.

4. 2020 – 2024: Malang Asri

Tidak hanya sebatas memberikan sumbangan seperti yang telah disebutkan diatas, elemen stakeholders tersebut juga terlibat langsung dalam mendukung kegiatan penghijauan bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Adapun langkah – langkah kegiatan penghijauan Kota Malang yang sudah terlaksana dalam kurun waktu 2004 – sekarang , yaitu:

- a. Gerakan Sejuta Pohon (GSP). Kota Malang mengikuti lomba mulai tahun 2004 – s/d sekarang.
- b. Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2003 yang di dalamnya mengatur pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Dekorasi Kota.
- c. Penerbitan: Buletin Hijau, Brosur cara Menanam dan Pemeliharaan.
- d. Rembug Kampung (Rempung).
- e. Jum'at bersih.
- f. Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Selain kegiatan – kegiatan yang telah disebutkan diatas, dalam kurun waktu 2010 – 2011 juga terdapat kegiatan penghijauan lainnya yang berlangsung di beberapa titik di Kota Malang Selain itu, yakni:

- a. Penghijauan di DAS Brantas Kel. Jatimulyo, bersama Univ. Brawijaya dan unsur Pramuka.
- b. Rembug kampung di “Kerajaan Watu Kenong” yang dihadiri oleh Walikota dan ketua DPR serta seluruh kepala SKPD Malang.
- c. Sosialisasi tentang penghijauan di lingkungan pendidikan se – kota Malang (SD,SMP, SMA).

- d. Penghijauan di kelurahan Mojolangu RW. 12
- e. Penghijauan di kelurahan Mojolangu RW.17
- f. Penanaman pohon penghijauan dan penyerahan bantuan bibit untuk sekolah – sekolah oleh Walikota.

Dan untuk kawasan – kawasan yang merupakan pusat dari kegiatan penghijauan kota Malang, yang mana peranan kawasan tersebut sangatlah penting, baik dari segi pertimbangan keindahan Kota, maupun resapan air, dan kawasan – kawasan tersebut, yaitu:

- a. Kawasan Boulevard Ijen.
- b. Taman Melati depan perpustakaan kota.
- c. Taman Veteran.
- d. Taman Dieng.
- e. Taman Panglima Sudirman.
- f. Taman Kertanegara.
- g. Taman Danau jongsong.

Kawasan – kawasan tersebut merupakan titik – titik penghijauan Kota Malang, selain karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang ramai lalu lintas dan pusat kota, sehingga berfungsi sebagai paru – paru kota, dan area resapan air, selain itu juga untuk memperindah Kota Malang. Kawasan berupa taman – taman tersebut juga dihiasi dengan patung sebagai *landmark* kawasan, seperti Patung Kendedes, Patung Pejuang, dan Patung Perjuangan.

Selain dari pelaksanaan berbagai kegiatan untuk dalam mendukung gerakan penghijauan di Kota Malang, pemerintah juga menghimbau agar

bangunan-bangunan seperti *mall* dan gedung perkantoran untuk ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan kaca, dan melengkapi bangunannya dengan lubang biopori, yaitu berupa lubang kecil di sekitar bangunan yang berfungsi meresap air ketika hujan, sehingga tidak menimbulkan genangan-genangan air atau banjir ketika hujan di sekitar lokasi bangunan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet, selaku Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai berikut:

“Ruang terbuka hijau tidak hanya sekedar dimaknai dari adanya lahan yang luas dan hijau, akan tapi ruang terbuka hijau dapat diupayakan melalui sistem bangunan yang ramah lingkungan, seperti melengkapi lubang biopori dan mengurangi penggunaan kaca. Untuk mengurangi pemanasan global dan mencegah adanya genangan-genangan air ketika hujan disekitar lokasi bangunan”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2012)

Selain dari pelaksanaan rangkaian kegiatan kebijakan penghijauan tersebut, tentunya suatu kebijakan pemerintah juga harus didukung dengan peraturan – peraturan terkait. Sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat lebih terarah. Bentuk keseriusan Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan Kota Malang yang Hijau dan Asri, tertuang pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Yang mana dalam peraturan tersebut tentunya juga mengatur kegiatan penghijauan. Contohnya pada pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “guna mewujudkan pengelolaan pertamanan kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau Badan yang membangun

diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat sanksi administrasi bagi barang siapa yang tidak melaksanakan penghijauan sesuai dengan peraturan daerah, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya di tanam. Dan ketentuan Pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 tersebut akan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 1.000.000,00.

Selain pasal 6 pada Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tersebut, tersebut, ketentuan larangan terkait penghijauan Kota Malang juga tertuang pada pasal 23, yang berbunyi:

Setiap orang/badan dilarang:

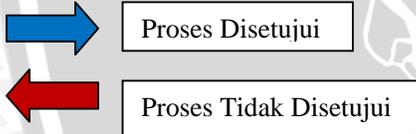
1. Memotong sebagian (mengurangi ranting, bahan atau cabang) dari batang pohon.
2. Mencabut, merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam
3. Merusak (menguliti, memotong akar, menempatkan bongkaran bangunan dijalur hijau/pangkal pohon, menyiramkan bahan padat/cair kepangkal pohon sehingga pohon mati dan kehilangan fungsinya) membakar dan menebang pohon milik pemkot.
4. Merusak taman dan jalur hijau.
5. Mengerjakan/mengolah, menggunakan/menduduki kebun bibit, Hutan Kota dan Tempat Pemakaman Umum secara tidak sah.

Berikut akan disajikan gambar terkait mekanisme permohonan pemotongan pohon sesuai dengan Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003:

Gambar 7
Mekanisme Permohonan Pemotongan Pohon



Keterangan:



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam *Pengelolaan Pertamanan dan Penghijauan* (2010:4)

3. Data Pelaksanaan Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)

Tahapan gerakan penghijauan Kota Malang melalui Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) sejak tahun 2004 – 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Tahapan Gerakan MIRR 2004 – 2008

TAHUN	TAHAPAN MIRR	TEMA	LOKASI
2004 – 2005	MIRR I	Malang Ijo Royo – Royo	Jalan ijen
2005 – 2006	MIRR II	Malang Ijo Royo – Royo Menuju Kota Bunga	Terminal Madyopuro
2006 – 2007	MIRR III	Lingkungan Hijau Menuju Kota Bunga	Vellodrome Sawojajar
2007 – 2008	MIRR IV	Kotaku Hijau, Kotaku Sehat dan Berbunga	Area Parkir/Plaza Araya
2008	MIRR V	Kotaku Hijau, Kotaku Indah dan Berbunga	Taman Gayam

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam Data *Pengelolaan RTH* (2010:20)

Dari tabel 8 data Tahapan Gerakan MIRR 2004 – 2008 diatas, diketahui bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Malang Ijo Royo – Royo tiap tahunnya memiliki tema – tema yang berbeda dan lokasi yang berbeda – beda, hal itu tentunya agar agenda tahunan MIRR tersebut dapat semakin berkembang ke lokasi – lokasi yang memang menjadi titik penting dalam penyelenggaraan penghijauan seperti Jalan Ijen, Terminal Madyopuro, vellodrome Sawojajar, area parkir plaza Araya, dan Taman Gayam.

Sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan “Malang Bestari 2024”, MIRR telah banyak menyelenggarakan beberapa *event – event* dan juga tidak ketinggalan dalam mengikuti perlombaan terkait lingkungan hidup. Karena

dengan ajang lomba tersebut, tentunya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan MIRR, adapun lomba yang diikuti dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam program MIRR, serta kegiatan – kegiatan yang terselenggara selama program MIRR I – MIRR V, yaitu:

1. Ikut serta dalam lomba Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Se- Jawa Timur
2. Mengadakan lomba taman lingkungan tingkat RW.
3. Mengadakan lomba hijau lingkungan tingkat RW.
4. Mengadakan lomba bersih lingkungan tingkat RW.
5. Menyelenggarakan Seminar lingkungan hidup.
6. Pemilihan putri lingkungan.
7. Gerakan Rembug Kampung (Rempung).
8. Deklarasi Lingkungan, yang dilaksanakan pada MIRR III tahun 2006. Diikuti dengan penandatanganan Naskah Deklarasi “Peduli Lingkungan” Oleh Rektor Universitas Brawijaya Malang dan Tokoh Masyarakat.
9. Kegiatan penempelan Stiker Peduli Lingkungan oleh Walikota dan Putri Lingkungan.

Dan beberapa diantara kegiatan – kegiatan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Malang tersebut, Kota Malang telah berhasil memperoleh apresiasi/penghargaan terkait lingkungan hidup dari Pemerintah Pusat maupun provinsi, yaitu:

1. Piala Adipura pada Tahun 2007
2. Juara Harapan II se- Jawa Timur pada tahun 2004
3. Juara II se-Jawa Timur pada tahun 2005

4. Juara I se-Jawa Timur pada tahun 2006
5. Juara I Se-Jawa Timur pada tahun 2007

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bentuk keseriusan pemerintah Kota Malang terkait penghijauan melalui penyelenggaraan kegiatan MIRR sebagai kegiatan penghijauan Kota Malang. Bahkan dari tahun ke tahun pemerintah Kota Malang menunjukkan perkembangan yang semakin baik, dapat dilihat dari perolehan juara yang terus meningkat, Kota Malang benar – benar terpacu menjadikan Kota Malang yang Hijau dan asri.

Setelah berakhirnya program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) pada tahun 2008, yang mana MIRR sendiri sudah terselenggara sebanyak lima kali yaitu dari tahun 2004 – 2008. Maka program selain MIRR sebagai salah satu rangkaian kegiatan “Malang Bestari 2024”, juga terdapat program penghijauan yang dikenal dengan “Malang Berbunga”. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet, selaku Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai berikut:

“pelaksanaan MIRR sendiri hanya sampai pada tahun 2008, dan dilanjutkan lagi pada oleh program malang berbunga. Dan pihak HM. Sampoerna tidak terlibat lagi dalam program ini, seperti halnya MIRR I-MIRR V, hal tersebut dikarenakan untuk meminimalisir adanya dugaan “ajang promosi” dari perusahaan rokok tersebut”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2012)

Program Malang berbunga yang terselenggara dari tahun 2009 – 2014 mendatang juga terdapat rangkaian kegiatan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yaitu berupa proyek pengubahan jalan veteran menjadi seperti jalan Ijen, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Slamet,

selaku Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai berikut:

“proyek selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh DKP terkait dengan penghijauan Kota Malang adalah mengubah jalan veteran seperti jalan Ijen. Proyek tersebut nantinya akan bekerjasama dengan pihak Brawijaya sendiri, hal tersebut dapat memperindah landmark kota dan juga meminimalisir polusi udara, karena daerah tersebut tergolong ramai kendaraan”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2012)

Program “Malang Berbunga” sendiri didukung oleh pemimpin wilayah baik tingkat kecamatan maupun kelurahan. Adapun program – program maupun perlombaan – perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota maupun kecamatan tersebut, yaitu:

1. Program Nukus Sinam pada tahun 2009, yang digulirkan oleh Camat Sukun. Program ini melibatkan kader-kader lingkungan yang ada di masing – masing kelurahan. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah pelatihan *composting*, penanaman lahan-lahan kritis dan kerja bakti membersihkan saluran air atau kali yang ada di wilayahnya masing-masing.
2. Membentuk kader – kader lingkungan di tiap – tiap kelurahan, untuk menggerakkan dan mendampingi masyarakat dalam kegiatan penghijauan.
3. Lomba lingkungan *green and clean* antar RW se-kota Malang.
4. Penghijauan kawasan Jalan Veteran seperti di kawasan Jalan Ijen.

Program “Malang Berbunga” sendiri juga mendapat respon positif dari masing stakeholders yang ikut mewujudkan Kota Malang yang hijau dan Asri menuju “Malang Bestari 2024”, terbukti dengan perolehan beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Malang

mewujudkan kota yang peduli terhadap lingkungan melalui penghijauan, adapun beberapa penghargaan tersebut adalah:

1. Malang terpilih menjadi percontohan Kota Hijau bersama dua daerah lainnya, yaitu Sumatera dan Sulawesi pada tahun 2011.
2. Perolehan penghargaan Piala Adipura dalam kategori Kota Besar.

C. Analisis dan Interpretasi

1. Analisis *Systems thinking* Dari Kebijakan

Penghijauan Kota Malang

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wibawa (1994:55) bahwa kebijakan merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan yang pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik dan tentunya juga sebagai alat untuk memecahkan masalah pada saat kebijakan tersebut dibuat tanpa ada tujuan ke depan yang jelas. Memahami proses pembuatan kebijakan sebagai suatu analisis kebijakan yang merupakan suatu usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan dengan membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan.

Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Malang, pemerintah kota Malang dalam hal ini Walikota Malang menunjuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan untuk melakukan kebijakan penghijauan.

Penghijauan sendiri menurut Yakin (2004:24) adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat

berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan.

Kebijakan penghijauan merupakan salah satu aspek dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dalam hal perlindungan lingkungan, selain aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial. Kebijakan penghijauan di kota Malang yang dikenal dengan “Malang Bestari 2024” merupakan program jangka panjang, untuk itu perlu *monitoring* dan *evaluating* dalam pelaksanaannya, agar kegiatan – kegiatan dalam “Malang Bestari 2024” dapat mengalami perubahan yang lebih baik terhadap lingkungan Kota Malang kedepannya. sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu “memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Jadi harapannya, konsep membangun kota dengan segala kepentingannya tidak menabrak ketentuan-ketentuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri, sehingga tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Untuk memahami bagaimana kebijakan penghijauan dapat mencapai tujuan publik dan tentunya juga sebagai suatu solusi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup di Kota Malang, maka dalam mengkajinya dibuat suatu analisis *Systems thinking* terkait dengan kebijakan penghijauan di kota Malang. *Systems thinking* disini merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah yang didahului dengan identifikasi masalah secara komprehensif, memperhatikan dinamika berbagai faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Sehingga solusi terhadap masalah

lingkungan yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan inti atau sumber permasalahan dengan tepat.

a. *Story line* (Alur Cerita) Kegiatan Penghijauan Oleh Pemerintah Kota Malang

Dengan melihat data keterlibatan stakeholders dalam kebijakan penghijauan Kota Malang, sebagaimana gambar 6 tentang pelibatan kegiatan MIRR diatas, jelas bahwa dalam mewujudkan Kota Malang yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan tentunya harus memperoleh dukungan dari segala pihak, baik itu antar pemerintah, warga masyarakat, maupun pihak swasta. Pengembangan penghijauan juga tentunya harus menyentuh segala bidang, baik itu bidang pendidikan, perindustrian maupun pariwisata seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 3 tentang pengembangan gerakan penghijauan di tiga bidang.

Dalam bidang pendidikan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menjalin kerja sama dalam rangkaian kegiatan Malang Ijo Royo – Royo yaitu (MIRR) III pada tahun 2006 yaitu berupa “Deklarasi Lingkungan”, ditandai dengan penandatanganan Naskah deklarasi “Peduli Lingkungan” Oleh Rektor Universitas Brawijaya Malang. Selain itu juga Universitas Brawijaya ikut mendukung kegiatan penempelan stiker peduli lingkungan dan juga kegiatan Putri Lingkungan dan terlibat langsung dalam penghijauan di DAS Brantas Kelurahan Jatimulyo, serta ikut memberikan sumbangan bibit pohon terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Tidak hanya Universitas Brawijaya saja, STIE Malang juga memberikan sumbangan bibit pohon sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan. Dan tidak hanya kalangan Universitas saja, dalam bidang pendidikan juga tidak ketinggalan tingkat SMA, SMP dan Juga SD mendukung gerakan penghijauan Kota Malang, baik berupa dukungan melalui keterlibatan dalam rangkaian kegiatan penghijauan maupun dukungan dalam bentuk sumbangan bibit pohon. Bentuk dukungan tersebut tentunya sesuai dengan tujuan bidang pendidikan dalam menggerakkan penghijauan seperti yang sudah paparkan dalam tabel 3 tentang pengembangan gerakan penghijauan di tiga bidang diatas.

Dalam bidang perindustrian, gerakan penghijauan tentunya sangat bermanfaat sekali, karena seperti kita ketahui banyak industri – industri saat ini yang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, hanya memikirkan keuntungan untuk perusahaannya, tanpa menyadari arti penting lingkungan terhadap keberlangsungan hidup. Harapannya, dengan adanya gerakan penghijauan di bidang perindustrian, melalui pengembangan tanaman bernilai ekonomis, dan tanaman yang mampu mengurangi polusi industri, dapat menjadikan kawasan industri sebagai kawasan ramah lingkungan.

Sedangkan dalam bidang Pariwisata, pengembangan gerakan penghijauan menuju “Malang Bestari 2024” seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 3 tentang pengembangan gerakan penghijauan di tiga bidang diatas yakni, melalui pengembangan Taman Kota sebagai rekreasi, pengembangan Hutan Kota sebagai ruang relaksasi dan pengembangan

Landmark Kota. Tentunya hal tersebut dapat menunjang sektor pariwisata, dengan keadaan lingkungan kawasan wisata yang asri tentunya akan menarik para wisatawan luar maupun domestik, untuk berkunjung ke kota Malang.

Adapun bentuk dukungan dunia bisnis atau kalangan swasta dalam gerakan penghijauan Kota Malang baik melalui kegiatan – kegiatannya maupun sumbangan berupa bibit pohon, seperti data CSR pada tabel diatas, dijelaskan bahwa CSR bukan lagi sekedar simbolisasi atau ajang promosi pihak swasta semata, tapi merupakan himbauan pemerintah sebagai bentuk kesadaran dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. Seperti HM. Sampoerna Malang, yang merupakan salah satu sektor swasta yang terlibat langsung dalam gerakan penghijauan Kota Malang melalui kegiatan Malang Ijo Royo – Royo (MIRR), dari mulai MIRR I pada tahun 2004, sampai MIRR V pada Tahun 2008. HM. Sampoerna Malang bersama Dinas Pertamanan Kota Malang bersama – sama menggerakkan penghijauan melalui Malang Ijo Royo – Royo (MIRR), sampai akhirnya Kota Malang banyak memperoleh penghargaan terkait lingkungan hidup dari pemerintah pusat maupun Provinsi.

Terlepas dari hal tersebut, baik bantuan melalui keterlibatan langsung melalui kegiatan – kegiatan penghijauan maupun sumbangan berupa bibit pohon dan sebagainya, jika tidak didukung dengan konsistensi dari segala pihak, tentunya kebijakan penghijauan tersebut menjadi kurang efektif. Bibit pohon yang disumbangkan seharusnya mendapat pengawasan

yang intensif dari segala pihak agar dapat tumbuh sebagaimana mestinya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung dari polusi, berfungsi sebagai keindahan (*landmark* kota), dan tentunya resapan air dalam menangkal banjir. Ketika bibit pohon tersebut sudah dewasa, bukan berarti semua pihak lepas tangan, tetapi pohon – pohon tersebut harus diawasi terus menerus, sehingga jika ada pohon yang sudah tidak layak dapat segera diganti, dan ranting – ranting pohon yang sudah tua dapat ditebang agar tidak mengganggu pertumbuhannya, begitulah seharusnya kerja sama pemerintah dengan stakeholders dalam hal penghijauan melalui penanaman bibit pohon. Tidak hanya sekedar menyumbangkan bibit pohon kemudian lepas tangan, tetapi dibutuhkan kerja sama dalam hal pengawasan pertumbuhan pohon tersebut.

Seperti halnya data CSR pada tabel diatas, justru tiap perusahaan swasta, BUMN, maupun dunia pendidikan konsisten dalam memberikan sumbangan bibit pohonnya. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan swasta, BUMN, maupun perseorangan yang hanya memberikan sumbangan bibit pohon sebagai simbolisasi semata tidak rutin setiap tahunnya, dan bahkan masih terdapat terdapat perusahaan – perusahaan swasta yang sama sekali belum memenuhi CSR nya, baik berupa sumbangan bibit pohon, maupun terlibat dalam kegiatan penghijauan lainnya.

Hal demikian tentunya menyebabkan kebijakan penghijauan yang kurang efektif, sebagaimana dikatakan oleh Nugroho (2009:137) bahwa

ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dilaksanakan dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan, dan tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan swasta. Jika kerja sama pemerintah dan stakeholders berlangsung demikian, tentunya kebijakan penghijauan sebagai solusi memecahkan masalah lingkungan, akan menjadi kurang efektif pelaksanaannya.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil inti pembahasan bahwa kebijakan penghijauan, dengan segala rangkaian kegiatan dalam mendukung terciptanya visi gerakan penghijauan Kota Malang, tentunya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, dalam hal ini yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tetapi juga dukungan dari segala pihak, baik masyarakat maupun sektor swasta. Dan sejauh ini masih terdapat beberapa stakeholders yang masih kurang peduli dengan lingkungannya. Selain dukungan terhadap pengembangan penghijauan tersebut masih kurang di dukung dengan konsistensi dari masing – masing stakeholders.

Berikut ini akan dijelaskan rangkaian kegiatan dari gerakan penghijauan Kota Malang yang dikenal dengan “Malang Bestari 2024”, yang dimulai pada tahun 2004 sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah “Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)” yang dimulai dari tahun 2004 – 2008, dan “Malang Berbunga” yang dimulai dari tahun 2009 – 2014.

1) Alur Cerita (*Story Line*) Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)

Suatu masalah kerusakan lingkungan yaitu berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan untuk menanggapi *isu global warming*, maka diselesaikan dengan solusi pembuatan kebijakan penghijauan yang kemudian dikenal dengan “Malang Bestari 2024”. Dalam gerakan penghijauan menuju “Malang Bestari 2024” tersebut, salah satu rangkaian kegiatannya adalah Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR), yang dimulai pada tahun 2004 – 2008. MIRR pada tahun 2004 berlokasi di jalan ijen, pemilihan lokasi tersebut hanyalah simbolisasi semata, karena penghijauan dilakukan secara keseluruhan di kota Malang. pelaksanaan MIRR pada tahun 2004 tersebut telah berhasil meraih Juara Harapan II se – Jawa Timur dalam Lomba Gerakan Sejuta Pohon (GSP).

Kemudian pada pelaksanaan MIRR II pada tahun 2005 dengan tema “Malang Ijo Royo- Royo Menuju Kota Bunga”, dengan lokasi di Terminal Madyupuro. Kota Malang berhasil menjadi Juara II se – Jawa Timur dalam lomba Gerakan Sejuta Pohon.

Dan pada pelaksanaan MIRR III pada tahun 2006 dengan tema “Lingkungan Hijau Menuju Kota Bunga” yang berlokasi di Vellodrome Sawojajar, Kota Malang berhasil menjadi juara I se – Jawa Timur dalam Lomba Gerakan Sejuta Pohon (GSP). Dalam MIRR III ini terdapat kegiatan – kegiatan penghijauan yang terlaksana oleh pemerintah bekerja

sama dengan elemen stakeholders. Seperti Deklarasi lingkungan, yang kemudian menyelenggarakan lomba pemilihan Putri Lingkungan Kota Malang, serta disusul dengan kegiatan penempelan stiker peduli lingkungan. Rangkaian kegiatan MIRR III juga ditandai dengan adanya kegiatan Rembug Kampung di Kerajaan Watu Kenong, kegiatan Rembug Kampung tersebut mengakibatkan terselenggaranya sosialisasi penghijauan di lingkungan pendidikan, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dengan adanya sosialisasi di lingkungan pendidikan tersebut mendorong adanya penanaman pohon penghijauan yang ditandai dengan penyerahan bantuan bibit untuk sekolah – sekolah oleh Walikota dan juga bantuan bibit oleh dunia pendidikan. Selain itu, kegiatan Rembug Kampung juga ditandai dengan kegiatan sosialisasi di beberapa kelurahan, yang menyebabkan adanya kegiatan “Penhijauan Di Kampung”, seperti kelurahan Mojolangu RW 12 dan kelurahan Mojolangu RW 17.

Lanjut pada MIRR IV pada tahun 2007 dengan tema “Kotaku Hijau, Kotaku Sehat dan Berbunga” yang berlokasi di Area Parkir/Plaza Araya, Kota Malang berhasil meraih Juara I se – Jawa Timur dalam Lomba Gerakan Sejuta Pohon (GSP). Tidak hanya itu saja, bahkan Kota Malang berhasil meraih Piala Adipura dalam kategori Kota Besar. Dalam MIRR IV sendiri terdapat kegiatan – kegiatan penghijauan yang terselenggara seperti adanya kegiatan Jum’at bersih, walaupun pelaksanaannya kurang efektif karena kurangnya sosialisasi. Rangkaian

kegiatan MIRR IV selanjutnya adalah Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).

Pelaksanaan MIRR V pada Tahun 2008 dengan tema “Kotaku Hijau, Kotaku Indah dan Berbunga” dengan lokasi di Taman Gayam, juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan penghijauan, seperti pengadaan Lomba di tingkat RT dan RW. Adapun jenis – jenis lombanya adalah Lomba Taman Lingkungan, Lomba Hijau Lingkungan dan Lomba Bersih Lingkungan. Pada MIRR V ini pelaksanaan lomba GSP sudah selesai, oleh karena itu dalam MIRR V Kota Malang tidak memperoleh penghargaan apapun.

2) Alur Cerita (*Story Line*) Program Malang Berbunga

Setelah pelaksanaan MIRR dari tahun 2004 – 2008, selanjutnya rangkaian kegiatan Penghijauan bertema “Malang Bestari 2024” sebagai solusi terhadap permasalahan lingkungan Kota Malang, yaitu “Program Malang Berbunga” yang dimulai pada tahun 2009 – 2014 mendatang.

Program Malang Berbunga dimulai dengan adanya Program Nukus Sinam yang merupakan program penghijauan dengan penanaman bibit pohon oleh Camat Sukun, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pemilihan kader – kader lingkungan di berbagai kelurahan. Dari pemilihan kader – kader lingkungan tersebut, para kader dibekali dengan pelatihan – pelatihan yang terkait lingkungan yang menunjangnya sebagai seorang kader, sehingga dilaksanakan pelatihan *composting*, yang merupakan tata cara pengolahan sampah. Dari pelatihan *composting*

tersebut kemudian dilaksanakan penanaman lahan – lahan kritis dan juga kerja bakti.

Selain dari rangkaian kegiatan tersebut, “Malang Berbunga” juga mengadakan beberapa lomba. Salah satunya adalah lomba lingkungan yang dikenal dengan *green and clean* antar RW se-kota Malang. Berkat rangkaian kegiatan penghijauan dalam program “Malang Berbunga” tersebut menjadikan Kota Malang sebagai Kota percontohan Kota Hijau bersama dua daerah lainnya, yaitu Sumatera dan Sulawesi pada tahun 2011.

Selain dari pelaksanaan rangkaian kegiatan penghijauan menuju “Malang Bestari 2024”, kebijakan penghijauan dalam *systems thinking* tentunya didukung dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, Keputusan Walikota Malang No. 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon, dan juga Pengumuman Walikota Malang No. 01 Tahun 2008 tentang Program Penghijauan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan fisik Kota Malang yang cukup pesat serta minat para pelaku pembangunan yang demikian antusias bahkan cenderung sulit untuk dikendalikan sehingga menimbulkan ancaman bagi keberadaan Pertamanan dan Dekorasi Kota yang ditandai dengan adanya penebangan pohon liar, perusakan tanaman dan ekosistem alam. Perda No. 3 Tahun 2003 tersebut berperan sebagai mekanisme kontrol dalam *systems*

thinking oleh pemerintah sebagai *agent* pengontrol. Karena sebuah kebijakan tidak dapat berjalan efektif tanpa didasari oleh mekanisme hukum yang berlaku. Namun melihat fakta di lapangan, masih banyak terdapat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan pohon. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang terlalu ringan, yaitu sanksi administrasi bagi barang siapa yang tidak melaksanakan penghijauan sesuai dengan peraturan daerah, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya di tanam. Dan ketentuan Pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 tersebut akan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 1.000.000,00. Menyebabkan masih terdapat kasus – kasus pelanggaran seperti penebangan pohon secara liar, perusakan tanaman dan ekosistem alam dan juga kasus peracunan pohon.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pemodelan *story line* (alur cerita) kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang melalui model *Causal Loop Diagram*, maka berikut ini akan dibuat suatu pemetaan kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang.

Tabel 9
Pemetaan *Story line* (alur cerita) Kebijakan Penghijauan Kota Malang dari Tahun 2004 – Sekarang

No.	Kegiatan Penghijauan	Data
1.	Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)	MIRR dimulai sejak tahun 2004-2005 dengan tema yang berbeda-beda tiap tahunnya. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
2.	MIRR I	MIRR I terselenggara pada tahun 2004. Pada MIRR I, Kota Malang berhasil meraih Juara harapan II Lomba Gerakan Sejuta Pohon (GSP) se-Jawa Timur. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
3.	MIRR II “Malang Menuju Kota Bunga”	Keberhasilan MIRR I kemudian diikuti dengan pelaksanaan MIRR pada tahun 2005. MIRR II, Kota Malang berhasil naik peringkat menjadi Juara II Lomba GSP se-Jawa Timur. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
4.	MIRR III “Lingkungan Hijau Menuju Kota Bunga”	Keberhasilan MIRR II kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan MIRR III, yang selanjutnya Kota Malang berhasil memperoleh Juara I lomba GSP Se-Jawa Timur. Pada MIRR III ini terselenggara beberapa kegiatan seperti Deklarasi lingkungan dan Rembug Kampung. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
5.	Deklarasi Lingkungan	Deklarasi lingkungan ditandai dengan penandatanganan Naskah Deklarasi “Peduli Lingkungan” Oleh Rektor Universitas Brawijaya Malang dan Tokoh Masyarakat. Deklarasi lingkungan ini merupakan wujud kerja sama pemerintah dengan elemen stakeholders. (Dari

		data <i>Pengelolaan RTH</i>)
6.	Rembug Kampung	Rembug Kampung merupakan sarana berdiskusi/berunding antara pemerintah dan masyarakat terkait persoalan lingkungan, merupakan sarana efektif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terhadap eksekutif. Acara Rembug Kampung dihadiri Walikota Malang, wakil Legislatif dan Yudikatif Kota Malang, Lurah se-kota Malang, juga perwakilan dari 22 RW. Dalam kegiatan Rempug ini, terselenggara kegiatan pemilihan putri lingkungan, sosialisasi penghijauan di lingkungan pendidikan, dan Sosialisasi masalah lingkungan di kelurahan. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
7.	Lomba Pemilihan Putri Lingkungan	Terselenggara dari hasil rembug kampung. Pemilihan putri lingkungan merupakan ajang lomba untuk kawula muda kota Malang agar ikut aktif dalam memahami isu lingkungan. Dari kegiatan ini kemudian terselenggara kegiatan penempelan Stiker Peduli Lingkungan oleh Walikota dan putri lingkungan hidup Kota Malang. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
8.	Sosialisasi di Kelurahan	Merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh kepanitiaan gerakan MIRR yang dibentuk dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bekerja sama dengan Lurah setempat. Yang kemudian kegiatan sosialisasi ini menghasilkan penghijauan di kampung. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
9.	Sosialisasi Penghijauan di Lingkungan	Kegiatan sosialisasi ini terselenggara dari hasil Rembug Kampung. Yang mana pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan

	Pendidikan	mengadakan sosialisasi penghijauan di perguruan tinggi, maupun tingkat SMA, SMP dan SD. Sosialisasi di lingkungan pendidikan ini ditandai dengan adanya penyerahan bantuan bibit dan penanaman pohon penghijauan. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
10.	Penyerahan Bantuan Bibit dan Penanaman Pohon penghijauan	Penyerahan bantuan bibit dan penanaman pohon penghijauan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan pengembangan gerakan penghijauan di tiga bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan, dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pengembangan penghijauan kota. Namun pemilihan bibit kurang kolektif, terkesan asal jadi. Dan kurangnya pengawasan terhadap pertumbuhan pohon menyebabkan bertambahnya jumlah pohon mati, dan juga adanya peracunan pohon, sehingga hal tersebut menyebabkan berkurangnya penilaian Adipura. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
11.	MIRR IV “Kotaku Hijau, Kotaku Sehat dan Berbunga”	Untuk meminimalisir kegiatan yang berdampak negatif terhadap kegiatan penghijauan pada MIRR III, maka diselenggarakan MIRR IV yang pada perjalanannya berhasil meraih Juara I Lomba GSP se-Jawa Timur. Dalam MIRR IV ini kemudian diselenggarakan Kegiatan jum’at bersih, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dan Gerdu Taskin. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
12.	Jum’at Bersih	Merupakan kegiatan gotong-royong yang dilakukan masyarakat dan juga pemerintah, disekitar lingkungannya. Diadakan 1 kali dalam sebulan. Namun karena kurangnya sosialisasi antar pemerintah dan juga kepada masyarakat menyebabkan kegiatan ini kurang efektif. (Dari

		data <i>Pengelolaan RTH</i>)
13.	Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)	Suatu kegiatan penanaman lahan kritis yang dilakukan Dinas kehutanan bekerjasama sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. dari terselenggaranya kegiatan ini, Kota Malang berhasil memperoleh piala Adipura. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
13.	MIRR V “Kotaku Hijau, Kotaku Indah dan Berbunga”	Atas keberhasilan MIRR IV, maka diselenggarakan MIRR V. MIRR V sendiri berhasil menyelenggarakan lomba taman lingkungan, lomba hijau lingkungan, dan lomba bersih lingkungan. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
14.	Program Malang Berbunga	Salah satu program penghijauan setelah berakhirnya program MIRR, yang dimulai pada tahun 2009-2014 mendatang. Program ini ditandai dengan adanya program Nukus Sinam dan Lomba <i>green and clean</i> antar RW se-Kota Malang. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
15.	Lomba <i>green and clean</i> antar RW se-Kota Malang	Dari penyelenggaraan Lomba <i>green and clean</i> antar RW se-Kota Malang ini, kota Malang berhasil meraih apresiasi sebagai Kota Percontohan Hijau 2011, bersama 2 kota lainnya. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
16.	Program Nukus Sinam	Program yang digulirkan oleh Camat Sukun. Dalam pelaksanaannya, program Nukus Sinam akan disinergikan dengan LPMK melalui dana hibah yang diterima masing-masing kelurahan. Dan tentunya program ini melibatkan kader-kader lingkungan yang ada di masing – masing

		kelurahan. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
17.	Pemilihan Kader lingkungan di Kelurahan	Berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menggalakkan kegiatan penghijauan di tingkat kelurahan. Untuk membekali pengetahuan para kader maka dilakukan pelatihan <i>composing</i> . (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
18.	Pelatihan <i>Composing</i>	Merupakan bekal untuk para kader lingkungan tentang tata cara pengolahan sampah hingga bermanfaat terhadap lingkungan. Dari pelatihan tersebut, kemudian para kader menggalakkan kerja bakti. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
19.	Kerja Bakti	Berbekal pelatihan <i>composing</i> , para kader kemudian menggalakkan kerja bakti di lingkungannya. Kerja bakti tersebut kemudian ditandai dengan penanaman lahan-lahan kritis. (Dari data <i>Pengelolaan RTH</i>)
20.	Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota	Berperan sebagai mekanisme kontrol dalam <i>systems thinking</i> oleh pemerintah sebagai <i>agent</i> pengontrol. Yang mana dalam perda ini sanksi administrasi dan pidana yang cenderung ringan menyebabkan integritas masyarakat yang rendah. Hal tersebut ditandai dengan masih maraknya merusak tanaman dan ekosistem alam berupa penebangan pohon secara liar. (dari Kumpulan peraturan tentang kebersihan dan pertamanan).

Sumber: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), (Data Diolah)

Tabel 9 diatas dibuat untuk mempermudah pemahaman terhadap model *causal loop diagram* kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang, sehingga variabel-variabel yang merupakan rangkaian dari kegiatan penghijauan Kota Malang yang digunakan dalam *causal loop diagram* memperoleh penjelasan bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi dan darimana data tersebut diperoleh, hal tersebut dilakukan agar penelitian dengan menggunakan analisis metode *systems thinking* disini lebih komprehensif. Selain pemetaan *Story line* (alur cerita) kebijakan penghijauan Kota Malang tersebut, berikut akan disajikan identifikasi *links* dari sub sistem kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Kebijakan Penghijauan | ← | Global Warming |
| | ← | Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
| 2. Kebijakan Penghijauan | → | MIRR |
| | → | Malang Berbunga |
| | → | Perda No. 3 Tahun 2003 |
| 3. MIRR | → | MIRR I Tahun 2004 |
| | → | MIRR II Tahun 2005 |
| | → | MIRR III Tahun 2006 |
| | → | MIRR IV Tahun 2007 |
| | → | MIRR V Tahun 2008 |
| 4. MIRR I | → | Juara Harapan II Lomba GSP Se-Jawa Timur |

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 5. MIRR II | → | Juara II Lomba GSP Se-Jawa Timur |
| 6. MIRR III | → | Juara I Lomba GSP Se-Jawa Timur |
| | → | Deklarasi Lingkungan |
| | → | Rembug Kampung |
| 7. Rembug Kampung | → | Lomba Pemilihan Putri Ling. |
| | → | Sosialisasi di Kelurahan |
| | → | Sosialisasi Peng. di Ling. Pend. |
| 8. Lomba Pem. Putri Ling. | → | Penempelan Stiker Peduli Lingkungan |
| 9. Sosialisasi di Kelurahan | → | Penghijauan di Kampung |
| 10. Sos. Peng. di Ling. Pend. | → | Penyerahan Bantuan Bibit dan Penanaman Pohon Penghijauan |
| 11. Bantuan Bibit | → | Pemilihan Bibit Asal Jadi |
| | → | Kurangnya Pengawasan terhadap Pertumbuhan Pohon |
| 12. Kurangnya Pengawasan | → | Pemilihan Bibit Asal Jadi |
| | → | Peracunan Pohon |
| | → | Bertambahnya Pohon Mati |
| 13. Bertambahnya Pohon Mati | → | Kurangnya Penilaian Adipura |
| 14. MIRR IV | → | Juara I Lomba GSP Se-Jawa Timur |
| | → | GERHAN |
| | → | Jum'at Bersih |

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 15. GERHAN | → | Piala Adipura |
| 16. Jum'at Bersih | → | Kurangnya Sosialisasi |
| 17. MIRR IV | → | Lomba Bersih Lingkungan |
| | → | Lomba Hijau Lingkungan |
| | → | Lomba Taman Lingkungan |
| 18. Malang Berbunga | → | Lomba <i>Green And Clean</i> Antar RW |
| | → | Program Nukus Sinam |
| 19. Lomba <i>Green And Clean</i> | → | Kota Percontohan Kota Hijau 2011 |
| 20. Program Nukus Sinam | → | Pemilihan Kader-Kader Lingkungan |
| 21. Pemilihan Kader Ling. | → | Pelatihan <i>Composing</i> |
| 22. Pelatihan <i>Composing</i> | → | Kerja Bakti |
| 23. Kerja Bakti | → | Penanaman Lahan-Lahan kritis |
| 24. Perda No. 3 Thn. 2003 | → | Lemahnya Penegakan Hukum |
| | → | Ringannya Saknsi Adm. dan Pidana |
| 25. Integritas Mas. Rendah | → | Lemahnya Penegakan Hukum |
| | → | Perusakan Tan. & Ekosistem Alam |
| | | Ringannya Saknsi Adm. dan Pidana |

26 Perusakan Tanaman

- Integritas Masyarakat rendah
- Penebangan Pohon Secara Liar

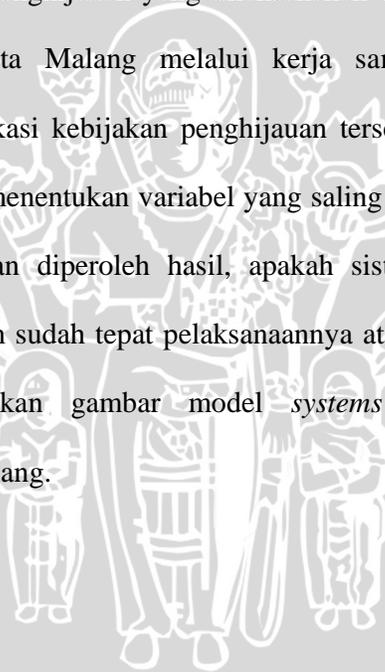
Setelah dilakukan pemetaan kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang, dan juga identifikasi *links* dari sub sistem kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang, seperti yang sudah dipaparkan diatas, maka selanjutnya akan dibuat suatu model *Causal Loop Diagram* (CLD) kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang. seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa CLD merupakan jaringan hubungan sebab-akibat (*cause-and-effect relationships*) antara dua variabel yang menentukan perilaku sistem, yang ditunjukkan dengan tanda panah atau disebut dengan *link*, baik berupa link negatif maupun positif. Adapun variabel-variabel yang diidentifikasi dalam *causal loop diagram* dalam penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan dari kebijakan penghijauan kota Malang yang membentuk beberapa sub sistem dan menghasilkan output dari masing-masing sub sistem.

b. Model *Systems Thinking* Kebijakan Penghijauan Kota Malang

Kebijakan penghijauan melalui model *systems thinking* (berpikir sistem) tersebut diambil untuk mengkaji penelitian ini melalui analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian), dengan melakukan suatu pendekatan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Wahab (2008:14), bahwa analisis *monitoring*

(pengawasan) dan *evaluation* (penilaian) kebijakan dapat ditelaah dari pendekatan metode *Systems thinking* yang merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang didahului dengan identifikasi masalah secara komprehensif. Memperhatikan dinamika berbagai faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Sehingga solusi yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan inti atau sumber permasalahan dengan tepat.

Masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kegiatan – kegiatan penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Malang melalui kerja sama dengan berbagai stakeholders. Identifikasi kebijakan penghijauan tersebut dilakukan secara komprehensif untuk menentukan variabel yang saling mempengaruhi dalam sistem. Sehingga akan diperoleh hasil, apakah sistem yang diuji yaitu kebijakan penghijauan sudah tepat pelaksanaannya atau perlu pembenahan. Berikut akan disajikan gambar model *systems thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang.



Dari gambar 8 diatas, dapat dilihat bahwa antar variabel saling mempengaruhi secara positif (*positive link*) dan juga saling mempengaruhi secara negatif (*negatife link*). variabel – variabel tersebut yang mengendalikan proses agar *output* sistem sesuai dengan karakteristik dan perilaku dari sistem yang diharapkan. Negatif dan positif *link* tersebut merupakan mekanisme *feedback* atau sering juga disebut mekanisme kontrol.

Dalam gambar 8 model *systems thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang tersebut, yang menjadi *input* dari sistem adalah kebijakan penghijauan. Dan mekanisme kontrol sistem tersebut yang terdiri dari variabel – variabel yang saling mempengaruhi secara positif (*positife link*) maupun yang mempengaruhi secara negatif (*negatife link*), membentuk beberapa sub sistem (*loop*). Seperti kebijakan penghijauan melalui Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) dibagi kepada 5 sub sistem, karena MIRR dilaksanakan selama 5 periode yaitu MIRR I dari Tahun 2004 – MIRR V Tahun 2008. Dimana pelaksanaan MIRR setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda – beda dengan agenda kegiatan yang berbeda – beda juga, sehingga hal tersebut mempengaruhi variabel masing – masing MIRR. *Link* positif dan *link* negatif pada sub sistem tersebut akan mempengaruhi *Causal Loop diagram* (diagram lingkaran sebab akibat) secara keseluruhan dari sistem kebijakan penghijauan.

Selain Program MIRR, rangkaian kegiatan dari kebijakan penghijauan Kota Malang juga didukung dengan adanya Program Malang

Berbunga, yang terselenggara dari tahun 2009 – 2014 mendatang. Sejauh ini Program Malang Berbunga sendiri juga memiliki agenda kegiatan yang berbeda dengan MIRR, sehingga Program Malang berbunga juga merupakan salah satu dari sub sistem yang terdapat dalam model *systems thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang. Dalam sub sistem tersebut terdapat variabel yang bersifat mendukung (*positive link*) dan yang bersifat menghambat (*negative link*) terhadap kebijakan penghijauan Kota Malang.

Selain dari rangkaian kegiatan kebijakan penghijauan seperti Program MIRR dan Malang Berbunga seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan penghijauan Kota Malang agar *output* yang diperoleh sesuai dengan visi gerakan penghijauan Kota Malang yakni “terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan menuju Kota Malang yang Asri dan Indah”, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.

Hal tersebut sesuai dengan peranan pemerintah daerah yang telah dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya, yaitu untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Melalui Perda tersebut, harapannya visi gerakan penghijauan Kota Malang sebagai gerakan sadar lingkungan yang tentunya terkait dengan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik.

Adanya Perda tersebut dalam model *systems thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang tentunya berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap hal – hal yang merugikan lingkungan dan pelaksanaan gerakan penghijauan, dengan harapan dapat dipatuhi segala pihak. Namun melihat model sistem kebijakan tersebut, masih terdapat variabel – variabel negatif (*negative Links*) yang tentunya menghambat pelaksanaan kebijakan penghijauan Kota Malang.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil inti pembahasan bahwa variabel – variabel yang merupakan rangkaian kegiatan dari masing – masing program, baik itu Program MIRR atau Program Malang Berbunga, tentunya dapat bersifat mendukung (*positive links*) dan juga penghambat (*negative links*) terhadap kebijakan penghijauan Kota Malang, berperan sebagai mekanisme *feedback* atau mekanisme kontrol, yaitu mekanisme yang akan menentukan hasil (*output*) dari sistem kebijakan penghijauan Kota Malang.

2. Faktor Pendukung (*Positive Links*) Dan Penghambat (*Negative Links*) Pelaksanaan Penghijauan Wilayah Kota Malang

Dari rancangan model *systems thinking* kebijakan penghijauan pada gambar 8 *Causal Loop Diagram* (CLD) Kebijakan Penghijauan Kota Malang diatas, maka secara langsung akan diperoleh faktor pendukung (*positive links*) dan penghambat (*negative links*) dari pelaksanaan Penghijauan Kota Malang. Identifikasi kebijakan penghijauan yang diuraikan ke beberapa variabel, baik yang bersifat *positive links* maupun *negative links* dilakukan secara

komprehensif. Sehingga variabel yang bersifat *positive links* tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, dan variabel yang bersifat *negative links* dapat diminimalisir untuk perbaikan efektivitas implementasi program selanjutnya. Hal tersebut tentunya juga membantu *decision maker* untuk mengetahui apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat atau belum.

Sebagaimana dikatakan Nugroho (2009:137), bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dilaksanakan dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ketiga adalah tepat target. Ketepatan target berkaitan dengan (a) apakah target sesuai dengan apa yang direncanakan, (b) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, (c) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Kemudian, syarat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gerakan penghijauan Kota Malang, yang terdiri dari rangkaian kegiatan/program merupakan program penanaman berbagai bibit pohon dengan konsep multi partisipatif yang mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, kalangan pelajar, mahasiswa, aparat TNI dan Polri, Ormas, Parpol, lembaga swadaya, dan tidak

ketinggalan para pengusaha. Hal ini sesuai dengan syarat ke empat Nugroho (2009:137) yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan, yakni lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Jadi gerakan penghijauan dengan konsep multi partisipatif tersebut, harus dapat bekerja sama demi mewujudkan tujuan dari kebijakan penghijauan itu sendiri, yaitu menjadikan Kota Malang yang hijau dan asri dengan integritas masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan.

Dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan, berikut ini akan dipaparkan faktor pendukung (*positive links*) dan penghambat (*negative links*) dari pelaksanaan Penghijauan Kota Malang.

a. Faktor Pendukung (*Positive Links*) Pelaksanaan Penghijauan Kota Malang

Dari gambar model *system thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang diatas, adapun faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan penghijauan Kota Malang adalah:

1. Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) yang mampu merangsang berbagai stakeholders untuk peduli akan lingkungan. Hal terbut ditandai dengan keberhasilan program MIRR meraih berbagai penghargaan:
 - a. Pelaksanaan Program MIRR I mampu meraih penghargaan sebagai Juara Harapan II se-Jawa Timur dalam Lomba GSP.
 - b. Pelaksanaan Program MIRR II meraih penghargaan sebagai Juara II se-Jawa Timur dalam lomba GSP.

c. Pelaksanaan Program MIRR III mampu meraih penghargaan sebagai Juara I se-Jawa Timur dalam Lomba GSP.

- 1) Pelaksanaan Deklarasi lingkungan
- 2) Lomba Pemilihan Putri Lingkungan
- 3) Rembug Kampung
- 4) Sosialisasi penghijauan di lingkungan pendidikan,
- 5) Sosialisasi di beberapa kelurahan.
- 6) Penghijauan di Kampung
- 7) Aksi penempelan stiker Peduli lingkungan

d. Pelaksanaan Program MIRR IV berhasil meraih penghargaan Juara I Lomba GSP se-Jawa Timur, dan juga berhasil meraih penghargaan Piala Adipura dalam kategori Kota Besar.

e. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)

f. Pelaksanaan Program MIRR V

- 1) Lomba Bersih Lingkungan tingkat RT dan RW
- 2) Lomba Hijau Lingkungan tingkat RT dan RW
- 3) Lomba Taman Lingkungan tingkat RT dan RW

2. Pelaksanaan Program Malang Berbunga, juga berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Percontohan Kota Hijau 2011 oleh Pemerintah pusat.

a. Lomba lingkungan *green and clean* antar RW Se – Kota Malang.

b. Program Nukus Sinam di kecamatan Sukun

c. Pemilihan Kader – kader lingkungan hidup

- 1) pelatihan *composting*
- 2) penanaman lahan-lahan kritis
- 3) dan kerja bakti

b. Faktor Penghambat (*Negative links*) Pelaksanaan Penghijauan Kota Malang

Selain faktor pendukung (*negative links*) dari gambar model *systems thinking* kebijakan penghijauan Kota Malang diatas, tentunya juga terdapat faktor penghambat (*negative link*) dari pelaksanaan penghijauan Kota Malang tersebut. Berikut akan diuraikan apa saja faktor penghambat (*negative link*) dari pelaksanaan penghijauan tersebut terkait dengan kegiatan/program penghijauan yang dilaksanakan.

1. Kurangnya perawatan oleh pemerintah maupun elemen stakeholders lainnya terhadap bibit pohon dalam kegiatan penanaman pohon penghijauan, menyebabkan adanya beberapa pohon mati yang berjumlah di kota Malang. hal tersebut mengakibatkan kurangnya penilaian Adipura, sehingga Kota Malang gagal meraih penghargaan Adipura.
2. Integritas masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah dengan adanya peracunan pohon.
3. Kurangnya pengawasan terhadap pohon-pohon yang mati.
4. Kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan Jum'at bersih.
5. Sanksi Administrasi yang tergolong ringan yaitu barang siapa yang tidak melaksanakan penghijauan sesuai dengan peraturan daerah, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman

yang seharusnya di tanam. Dan juga ketentuan Pidana, yaitu pidana kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 1.000.000,00. Karena sanksi administrasi dan pidana yang berlaku yang dianggap ringan tersebut, sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku pengrusakan lingkungan, akibatnya kasus – kasus pengrusakan lingkungan masih marak terjadi.

Dari identifikasi faktor pendukung (*positive links*) dan faktor penghambat (*negative links*) pelaksanaan penghijauan Kota Malang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil inti pembahasan bahwa antar variabel dalam *causal loop diagram* tersebut saling mempengaruhi secara negatif maupun positif terhadap sistem kebijakan penghijauan Kota Malang. Tetapi variabel yang bersifat mendukung (link positif) pada CLD tersebut lebih banyak dibanding variabel yang bersifat menghambat (link negatif). Namun, walaupun variabel pada sub sistem *Causal Loop Diagram* (CLD) secara keseluruhan bersifat positif link, penelitian ini tetap memberikan rekomendasi model kebijakan yang lebih efektif untuk diterapkan oleh pemerintah Kota Malang terkait penghijauan, dengan harapan *link* negatif pada *loop* kebijakan penghijauan sebelumnya dapat diminimalisir sehingga kinerja sistem mengalami *Effectiveness* atau ketercapaian tujuan atau *goal*.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil inti pembahasan bahwa usaha untuk menghijaukan lingkungan harus memahami dan mengidentifikasi secara komprehensif apa saja faktor pendukung (*positive links*) dan faktor penghambat (*negative links*) dari pelaksanaan

kegiatan/program penghijauan Kota Malang. Hal tersebut dilaksanakan untuk menganalisis kebijakan penghijauan yang diambil apakah sudah berkompeten untuk mencapai visi dari gerakan penghijauan itu sendiri atau masih butuh pengkajian ulang, tentunya dengan menggunakan analisis *monitoring* dan *evaluating*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab (2008:4) bahwa *Monitoring* meliputi kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi merupakan usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan.

Dan tentunya gerakan penghijauan harus dilaksanakan dengan baik tidak sekedar wacana semata, dan juga harus ditunjang dengan adanya komitmen dari semua pihak baik dari antar pemerintah maupun elemen stakeholders agar hasil (*output*) dari gerakan penghijauan Kota Malang yaitu “terwujudnya kota yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan” tercapai dengan hasil yang maksimal yang diharapkan sehingga bermanfaat untuk keberlangsungan bumi dan lingkungan masyarakat tentunya.

3. Rekomendasi Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Dalam Model *Systems Thinking*

Kesejahteraan suatu masyarakat diwujudkan dengan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan prinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan sumber daya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan terkait dengan lingkungan hidup sebagai solusi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Kota Malang, yaitu kebijakan penghijauan melalui "Malang Bestari 2024". Penghijauan sendiri merupakan segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan (Yakin, 2004:24). Penghijauan sebagai salah satu upaya untuk memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, harus dilaksanakan secara konseptual.

Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sedangkan Pembangunan berkelanjutan dalam UU PPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Seperti halnya kebijakan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, tentunya mengharapkan suatu pencapaian visi dari gerakan penghijauan tersebut terlaksana secara maksimal, efektif dan efisien. Namun

dari analisis *system thinking* terhadap kebijakan tersebut masih terdapat beberapa faktor penghambat (*negative links*) dalam proses pelaksanaannya, sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil (*output*) yang ingin dicapai dari gerakan penghijauan tersebut.

Untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan yang visioner dibutuhkan skenario kebijakan untuk mencapai visi dari kebijakan tersebut. Skenario kebijakan tersebut tentunya terkait dengan hasil analisis *systems thinking*. Tujuan skenario kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan suatu solusi akan permasalahan lingkungan Kota Malang dengan kebijakan yang terlaksana lebih efektif sehingga kinerja sistem mengalami *Effectiveness* atau ketercapaian tujuan atau *goal*.

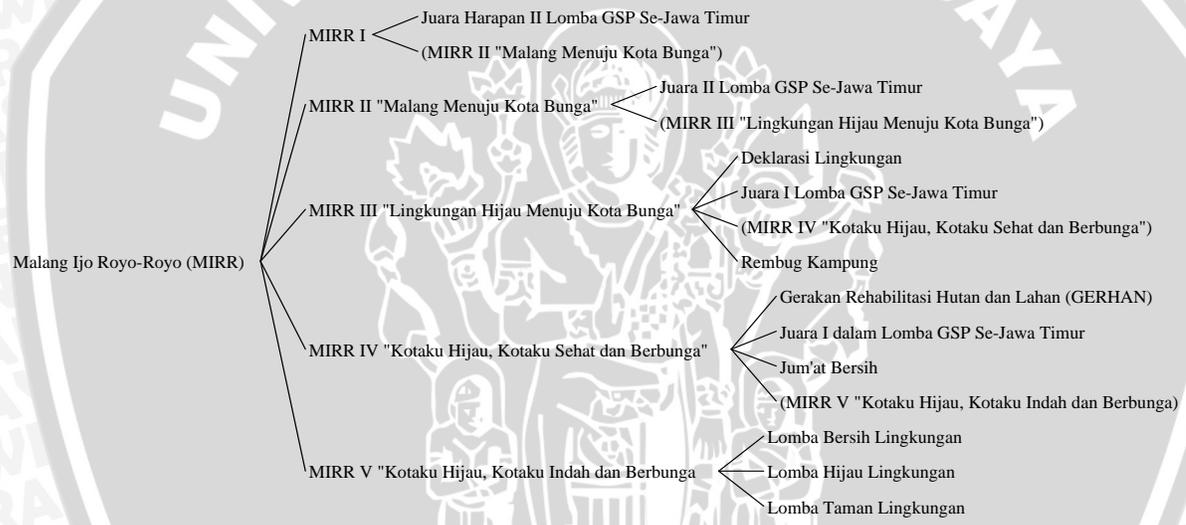
a. Identifikasi Variabel Kunci/Variabel pengungkit

Sebelum membuat skenario kebijakan penghijauan selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan identifikasi variabel kunci/ variabel pengungkit (*leverage*) dari sistem kebijakan penghijauan yang dinilai paling mempengaruhi. Dengan penentuan variabel kunci, maka dapat dirumuskan langkah-langkah kebijakan (*Problem Solving*) yang tepat dan efektif juga dapat disusun rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan terhadap permasalahan/isu strategik. Dari identifikasi variabel kunci tersebut kemudian ditetapkan 1 atau 2 variabel kunci yang kan digunakan sebagai skenario kebijakan, yang kemudian berkembang menjadi rekomendasi atas permasalahan isu lingkungan hidup.

Dari gambar 8 *causal loop diagram* kebijakan penghijauan Kota Malang diatas, maka diperoleh 2 variabel kunci, yaitu:

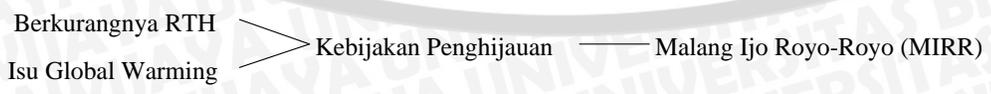
- 1) Malang Ijo Royo-Royo (MIRR), memiliki *uses tree* atau arus keluar (yang mempengaruhi) paling banyak, yaitu sebanyak 20 *uses tree* dan *causes tree* (yang dipengaruhi) sebanyak 3.

Gambar 9
Diagram *Uses Tree* Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)



Sumber: Data diolah.

Gambar 10
Diagram *Causes Tree* Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)



Sumber: Data diolah.

2) Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), memiliki *uses tree* atau arus keluar (yang mempengaruhi) sebanyak 4, dan *causes tree* sebanyak 5.

Gambar 11
Diagram *Uses Tree* Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)



Sumber: Data diolah.

Gambar 12
Diagram *Causes Tree* Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)



Sumber: Data diolah

Berdasarkan identifikasi variabel kunci tersebut, maka rekomendasi atas permasalahan lingkungan yang ditawarkan terkait dari hasil analisis *systems thinking* adalah dengan menjadikan Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) sebagai kebijakan penghijauan dan solusi atas permasalahan lingkungan hidup selanjutnya, tidak sekedar variabel yang menguatkan sistem penghijauan Kota Malang, tetapi berperan sebagai kebijakan yang lebih baik untuk kedepannya.

Program MIRR dengan konsep multi partisipatif tersebut, merupakan suatu program yang impresif, hal tersebut dapat dilihat dari kesuksesan MIRR I yang kemudian dilanjutkan oleh MIRR II – MIRR V,

disusul dengan munculnya *event-event* yang terkait dengan gerakan penghijauan. Sehingga pantas bila MIRR bukan lagi sekedar *event* insidental tetapi sebagai gerakan integral dalam rangka menghijaukan kota. Melihat pentingnya program ini, program MIRR sebagai upaya penyadaran peduli lingkungan patut didukung. Program MIRR sebagai rangkaian kegiatan penghijauan melalui penanaman, bisa jadi merupakan alternatif meminimalkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan akibat kemajuan kota.

Untuk mewujudkan tujuan dari skenario kebijakan tersebut, maka dalam penelitian ini akan menawarkan skenario-skenario kebijakan sekaligus menjadi alternatif kebijakan dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Skenario-skenario kebijakan yang ditawarkan mengacu pada implikasi kebijakan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan kebijakan penghijauan di kota Malang.

Dari gambar *causal loop diagram* model *systems thinking* kebijakan penghijauan diatas, yang mana MIRR sebagai salah satu variabel telah memaparkan *link* positif dan *link* negatif dari kebijakan penghijauan yang dilaksanakan. Karena kebijakan yang direkomendasikan sebagai solusi dari kerusakan lingkungan adalah Program MIRR, maka kebijakan MIRR haruslah visioner, memiliki visi – misi yang jelas. Dan tentunya mampu meminimalisir *link* negatif dan sebaliknya mengembangkan *link* positif dari kebijakan sebelumnya, sehingga kinerja sistem yaitu kebijakan MIRR

mengalami *Effectiveness* atau ketercapaian tujuan atau *goal* dari sistem itu sendiri.

b. Pengujian MIRR Sebagai Suatu Kebijakan Penghijauan Melalui Skenario – Skenario Kebijakan Yang Ditawarkan

1) MIRR Sebagai Kebijakan Penghijauan Melalui Optimalisasi

Pelaksanaan Perlombaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambar 8 *causal loop diagram* model *systems thinking* kebijakan penghijauan diatas, terdapat variabel – variabel kegiatan yang memberikan *output link* positif pada gerakan penghijauan Kota Malang. tentunya dengan optimalisasi pelaksanaan lomba – lomba terkait penghijauan melalui Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk kedepannya. Karena kegiatan – kegiatan yang ditawarkan MIRR I – MIRR V cukup menarik dan memberikan *link* positif pada hasil penghijauan Kota Malang.

Dengan optimalisasi pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan perlombaan penghijauan, baik tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun tingkat RT dan RW tentunya dapat memacu masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan. Pelaksanaan lomba – lomba terkait penghijauan, merupakan suatu pendekatan yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah kepada masyarakat, karena memberikan motivasi berupa *reward* yang akan diperoleh dari perlombaan tersebut.

Namun pelaksanaan perlombaan tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga perlu dukungan dari segala pihak, baik *private sector*, maupun masyarakat itu sendiri, hal tersebut tentunya untuk mengefektifkan *goal* dari kegiatan tersebut. Pemerintah bekerja sama dengan elemen stakeholders lainnya juga harus mampu berinovasi terus menerus terkait kegiatan apa yang menarik yang dapat diperlombakan terkait penghijauan yang dapat menarik simpati masyarakat untuk lebih *aware* pada lingkungannya.

Karena apabila penyelenggara perlombaan terkait penghijauan yang dilaksanakan tersebut tidak ada berinovasi dan cenderung monoton, tentunya hal tersebut akan dapat mengakibatkan rasa jenuh pada masyarakat itu sendiri dan pengelola kegiatan itu tentunya, sehingga program – program yang impresif tersebut hanya akan tinggal wacana. Jadi pemerintah maupun elemen stakeholders lainnya dituntut lebih kreatif, berinovasi terhadap pelaksanaan kegiatan – kegiatan penghijauan.

2) MIRR Sebagai Kebijakan Penghijauan Melalui Optimalisasi Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Optimalisasi sosialisasi berperan penting dalam mewujudkan visi gerakan penghijauan, karena sosialisasi merupakan sarana yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat akan arti penting menjaga lingkungan hidup. Pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan penghijauan akan menjadi sia – sia

apabila masyarakat sendiri tidak memahami manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Sosialisasi memungkinkan pemerintah untuk dapat berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga suasana yang lebih intim dapat diperoleh, dan hal tersebut tentunya memudahkan kedua belah pihak untuk berdiskusi terkait isu lingkungan, dan bagaimana permasalahan terkait kerusakan lingkungan tersebut dapat dicegah ataupun diminimalisir dengan pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Namun sosialisasi tersebut dapat menjadi tidak efektif dan efisien karena disebabkan tidak semua wilayah dalam Kota Malang dapat disentuh pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan/program yang akan dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kader – kader lingkungan yang dipilih oleh masing – masing pemimpin wilayah, baik kader lingkungan tingkat kecamatan, kelurahan bahkan tingkat RT maupun RW akan dapat memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya untuk menginformasikan aksi peduli lingkungan terhadap masyarakat. Karena tugas dari kader lingkungan tersebut adalah untuk menginformasikan arti penting lingkungan hidup pada masyarakat di wilayahnya serta terlibat langsung dalam kegiatan – kegiatan penghijauan, untuk itu seorang kader dituntut untuk kreatif, inovatif, aktif, jujur, mau bekerjasama dan juga rela berkorban dalam hal menjaga lingkungan. Seorang kader lingkungan

dituntut harus benar-benar berjuang tanpa pamrih, karena kader lingkungan mengusung misi sosial

Melalui media sosialisasi dan pemilihan kader – kader lingkungan dalam rangkaian kegiatan MIRR yang direkomendasikan terkait dengan kerusakan lingkungan, harapannya dapat mengefektifkan visi dari gerakan penghijauan Kota Malang, yakni mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan menuju Kota Malang yang asri.

c. Rekomendasi Model *Causal Loop Diagram* Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang

1) *Story Line* (Alur Cerita) Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang

Berdasarkan gambar *causal loop diagram* kebijakan penghijauan Kota Malang dan pengujian MIRR sebagai suatu kebijakan penghijauan melalui skenario – skenario kebijakan yang telah dijelaskan diatas, maka adapun alur cerita (*Story Line*) dari program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) sebagai rekomendasi atas kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kota Malang untuk kedepannya, dapat diuraikan sebagai berikut ini.

Melalui Malang Ijo Royo – Royo sebagai salah satu kebijakan penghijauan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Malang, maka pemerintah bekerja sama dengan elemen stakeholders dapat melakukan sebuah kegiatan berupa sosialisasi kepada

masyarakat akan arti penting dari menjaga lingkungan dan manfaat dengan adanya program/kegiatan penghijauan yang dilaksanakan. Dengan optimalisasi kegiatan tersebut akan memberikan *link* positif terhadap *output* dari MIRR, yaitu peningkatan kesadaran lingkungan oleh masyarakat. Dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi tersebut sehingga dapat menyentuh seluruh wilayah Kota Malang, kemudian dapat dilakukan kegiatan pemilihan kader lingkungan di masing – masing wilayah.

Sosialisasi penghijauan juga dapat dilaksanakan oleh para anak muda Kota Malang, untuk menarik perhatian mereka terhadap isu lingkungan hidup tersebut maka pemerintah bekerjasama sama dengan elemen stakeholders dapat melakukan kegiatan pemilihan putri lingkungan. Dari kegiatan tersebut tentunya mereka dituntut harus mampu memahami isu lingkungan hidup dan bagaimana cara untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal tersebut tentunya dapat menjadi suatu inovasi sekaligus bahan masukan terhadap pemerintah Kota Malang dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.

Setelah melakukan berbagai sosialisasi tersebut, pemerintah dapat melakukan perlombaan terkait penghijauan. Hal tersebut tentunya dapat memacu masyarakat antar wilayah untuk lebih *aware* terhadap lingkungannya, dengan perlombaan *green and clean*. Karena suatu kemenangan yang diperoleh oleh tiap wilayah akan menjadi kebanggan

tersendiri bagi wilayah tersebut apabila dapat memperoleh penghargaan terkait penghijauan lingkungan.

Untuk mengefektifkan MIRR sebagai rekomendasi atas kerusakan lingkungan di wilayah Kota Malang, yang dirancang sebagai suatu kebijakan, maka pemerintah sebagai *agent* pengontrol harus membuat payung hukum yang kuat terkait dengan kebijakan tersebut, yang dapat menindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan terkait dengan penghijauan kota. Dalam hal ini pemerintah sudah membuat Perda No.3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Dalam peraturan tersebut sudah terdapat ketentuan – ketentuan terkait sanksi administrasi dan sanksi Pidana terhadap siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, dan juga ketentuan pemilihan bibit pohon yang digunakan sebagai penghijauan, jadi bukan sekedar bibit pohon yang terkesan asal jadi, sekedar formalitas aksi peduli lingkungan oleh suatu instansi ataupun perseorangan. Seperti yang dikemukakan Yakin (2004:4) bahwa pemilihan jenis tanaman untuk penghijauan agar tumbuh dengan baik hendaknya mempertimbangkan syarat-syarat hortikultura (ekologikal) dan syarat- syarat fisik. Syarat hortikultural yaitu respon dan toleransi terhadap temperatur, kebutuhan air, kebutuhan dan toleransi terhadap cahaya matahari, kebutuhan tanah, hama dan penyakit, serta syarat-syarat fisik lainnya yaitu tujuan penghijauan, persyaratan budi daya, bentuk tajuk, warna, dan aroma.

Harapannya dengan tindakan hukum dan pematuhan elemen stakeholders terhadap Perda tersebut, maka hal – hal seperti pemilihan bibit pohon yang terkesan asal jadi tersebut dapat diminimalisir. Dalam Perda tersebut juga mengharuskan pemerintah dan elemen stakeholders lainnya untuk selalu melakukan pengawasan dan perawatan kepada pohon–pohon tersebut, untuk meminimalisir pohon yang mati dan juga tindakan – tindakan pengrusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku – pelaku usaha juga harus lebih memperhatikan pembangunan perusahaannya, tempat usahanya seperti *mall*, pabriknya untuk tetap ramah lingkungan. Seperti jumlah kaca, lubang bioperi yang berfungsi sebagai resapan air, sehingga lahan yang didirikan bangunan tersebut tetap memiliki daya serap terhadap air, sehingga tidak menimbulkan banjir, ataupun genangan – genangan air di sekitar area bangunannya. Kegiatan tersebut dinamakan *green building*. Perlu diketahui bahwa ruang terbuka hijau itu tidak sekedar adanya lahan yang ditanami pepohonan yang berfungsi menyerap air ketika hujan agar terhindar dari banjir, namun ruang terbuka hijau tersebut juga terkait dengan sistem bangunan yang ramah lingkungan. Dengan sistem bangunan yang ramah lingkungan tersebut dapat meminimalisir penyempitan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga tidak menimbulkan banjir disekitar wilayah didirikannya bangunan tersebut.

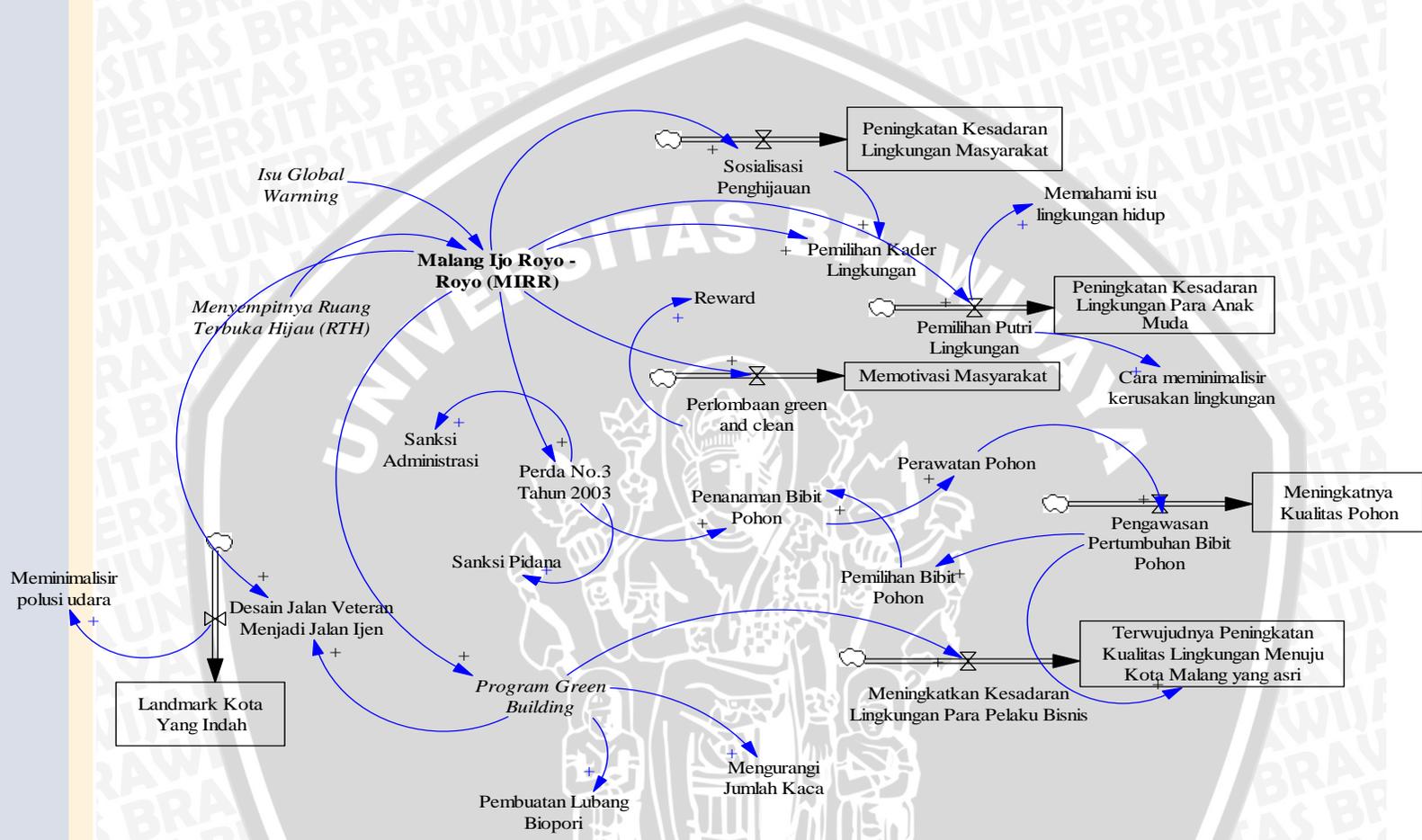
Kemudian kegiatan/program yang akan dilakukan pemerintah sendiri yang cukup impresif untuk kedepannya adalah desain Jalan Veteran seperti Jalan Ijen, program tersebut juga didukung oleh Universitas Brawijaya. Dengan adanya rancangan kegiatan tersebut, tentunya akan memperindah *landmark* Kota Malang, sebagai jalan yang padat dengan arus kendaraan, tentunya kegiatan tersebut akan bermanfaat dalam h dari kendaraan – kendaraan, dan juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air.

Maka dari rangkaian kegiatan tersebut yang merupakan variabel dengan *link* positif terhadap Program MIRR sebagai kebijakan penghijauan dan solusi atas kerusakan lingkungan Kota Malang, maka akan menghasilkan *output* yang diharapkan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan menuju Kota Malang yang hijau dan asri.

2) *Causal Loop Diagram* Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR)

Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang

Berdasarkan *story line* (alur cerita) Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) Sebagai Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang diatas, selanjutnya akan dibuat suatu model *systems thinking* berupa *Causal Loop Diagram* Malang Ijo Royo – Royo sebagai kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang.



Sumber: Data Diolah

Lampiran 1

Dari gambar 13 diatas, dapat dilihat bahwa antar variabel saling mempengaruhi secara positif (*positive link*), sehingga menghasilkan ketercapaian suatu *output* yang positif, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan menuju Kota Malang yang hijau dan asri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sistem dalam *causal loop diagram* yang ditawarkan yaitu MIRR sebagai Kebijakan Penghijauan dapat meminimalisir adanya variabel-variabel negatif. Karena gambar 13 *causal loop diagram* yang ditawarkan yaitu MIRR sebagai Kebijakan Penghijauan pada variabel – variabel memberikan *link* positif terhadap sistem sehingga *output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan dari visi gerakan penghijauan Kota Malang.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wibawa (1994:55), yaitu dalam memahami proses pembuatan kebijakan sebagai suatu analisis kebijakan yang merupakan suatu usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Dan dari analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian) kebijakan yang ditelaah dari pendekatan metode *Systems thinking* seperti yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghijauan di kota Malang masih harus di evaluasi selama masih terdapat *link-link* negatif yang sifatnya menghambat sistem penghijauan. Dengan mengidentifikasi secara komprehensif variabel-variabel dengan *link* negatif tersebut maka dapat meminimalisir permasalahan –permasalahan terkait dengan sistem

Lampiran 1

tersebut, sehingga nantinya kinerja sistem tersebut bersifat *Effectiveness* terhadap ketercapaian tujuan atau *goal* dari sistem itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Evaluasi Kebijakan Penghijauan Wilayah Kota Malang Melalui Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) dalam Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem dan *networks* atas kebijakan penghijauan di wilayah Kota Malang Berdasarkan model *systems thinking*, maka yang menjadi *input* dari sistem adalah kebijakan penghijauan. Dan mekanisme kontrol sistem tersebut yang terdiri dari variabel – variabel yang saling mempengaruhi secara positif (*positife link*) maupun yang mempengaruhi secara negatif (*negatife link*), membentuk beberapa sub sistem (*loop*).
2. Faktor pendukung (*positive link*) dan penghambat (*negative link*) dalam pelaksanaan penghijauan wilayah Kota Malang berdasarkan model *Causal Loop Diagram* (CLD), maka faktor pendukung (*positive link*) nya adalah Program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang terselenggara dari MIRR I-MIRR V, memberikan beberapa *positive link* dari rangkaian kegiatannya yang merupakan variabel dari sistem kebijakan penghijauan, seperti pelaksanaan deklarasi lingkungan, pemilihan putri lingkungan, Rembug Kampung, sosialisasi penghijauan di lingkungan pendidikan, sosialisasi di beberapa kelurahan, penghijauan di kampung, penempelan stiker peduli lingkungan,

Lampiran 1

GERHAN. Sedangkan Program Malang Berbunga memberikan kontribusi dalam *positive link* dengan adanya Program Nukus Sinam, dan pemilihan kader-kader lingkungan. Sedangkan faktor penghambat (*negative link*) dari *Causal Loop Diagram* (CLD) kebijakan penghijauan Kota Malang, adalah masih kurangnya kepedulian pemerintah maupun elemen stakeholders dalam hal merawat pohon yang berfungsi sebagai hutan kota, integritas masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah, ditandai dengan masih adanya kasus peracunan pohon, kurangnya sosialisasi dari terselenggaranya kegiatan, dan lemahnya penegakan hukum.

3. Rekomendasi model pelaksanaan *systems thinking* melalui program Malang Ijo royo-royo (MIRR) sebagai program penghijauan wilayah Kota Malang yang akan datang diperoleh dari hasil identifikasi variabel *Causal Loop Diagram* (CLD) kebijakan penghijauan Kota Malang yang diolah menggunakan *software vensim* maka diperoleh variabel kunci (utama)/variabel pengungkit (*leverage*), yaitu Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) yang memiliki *uses tree* atau arus keluar (yang mempengaruhi) paling banyak, yaitu sebanyak 20 *uses tree*. Sedangkan variabel pengungkit kedua adalah Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).
4. Implikasi Kebijakan dilakukan dengan cara membuat skenario kebijakan dari hasil identifikasi variabel kunci (utama)/variabel pengungkit (*leverage*), yang bertujuan untuk mewujudkan kinerja sistem agar mengalami *Effectiveness* atau ketercapaian tujuan atau *goal*. Skenario kebijakan tersebut yaitu menjadikan MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi

Lampiran 1

perlombaan lingkungan hidup, dan skenario kedua adalah menjadikan MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat menerapkan skenario kebijakan penghijauan melalui optimalisasi perlombaan lingkungan hidup dan optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat untuk mewujudkan kinerja sistem agar mengalami *Effectiveness* atau ketercapaian tujuan atau *goal*.
2. Skenario MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi perlombaan lingkungan hidup dapat memacu masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan. Pelaksanaan lomba – lomba terkait penghijauan, merupakan suatu pendekatan yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah kepada masyarakat, karena memberikan motivasi berupa *reward* yang akan diperoleh dari perlombaan tersebut.
3. Skenario MIRR sebagai kebijakan penghijauan melalui optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi memungkinkan pemerintah untuk dapat berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga suasana yang lebih akrab dapat diperoleh, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk berdiskusi terkait isu lingkungan, dan bagaimana permasalahan terkait kerusakan lingkungan tersebut dapat diminimalisir dan dicegah.

Lampiran 1

4. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah untuk perbaikan kinerja sistem kebijakan penghijauan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan menjadikan Program Malang Ijo Royo – Royo (MIRR) sebagai kebijakan penghijauan wilayah Kota Malang melalui *Causal Loop Diagram* (CLD) dengan optimalisasi pelaksanaan berbagai lomba lingkungan hidup, sosialisasi terhadap masyarakat, menghimbau para pelaku usaha untuk menerapkan *green building*, mengubah jalan veteran seperti jalan Ijen untuk membangun *landmark* Kota yang indah serta sejuk. Alasan rekomendasi kebijakan tersebut adalah skenario kebijakan tersebut efektif dalam mencapai visi gerakan penghijauan Kota Malang, yaitu “terwujudnya kota yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan”.
5. Untuk mewujudkan visi dari gerakan penghijauan Kota Malang yaitu terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan menuju Kota Malang yang asri dan indah tentunya membutuhkan kerja sama dari elemen stakeholders. Pemerintah tidak dapat mewujudkan hal tersebut seorang diri karena permasalahan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
6. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan penghijauan daerah Kabupaten Malang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian) kebijakan tersebut yang dapat ditelaah dari pendekatan metode *Systems thinking* sebagai pembanding penelitian ini.
7. Penggunaan analisis *monitoring* (pengawasan) dan *evaluation* (penilaian) dalam mengkaji kebijakan penghijauan Kota Malang, maka pemerintah dapat

Lampiran 1

melakukan “koreksi dini” terhadap kebijakan yang diambil, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu.

Sedangkan analisis evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program dari kebijakan penghijauan yang dilaksanakan, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan kebijakan tersebut.

8. Analisis metode *systems thinking* tidak hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah secara komprehensif, memperhatikan dinamika berbagai faktor yang terlibat yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik yang dapat memperbaiki perilaku sistem. Rancangan kebijakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pemodelan. Sehingga penelitian ini tidak hanya berusaha memahami secara aktual mengenai obyek penelitian tetapi ditujukan untuk melakukan perubahan pada semua diri pesertanya dan perubahan situasi tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arikunto & Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Birkland, Thomas A. 2010. *An Intoduction to The Public Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. Edisi Ketiga. New York: M.E. Sharpe Inc.
- Budihardjo, Eko. 2005. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Budimanta, Arif. 2005. *Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: [Elex Media Komputindo](#).
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Senge, & Forrester, Jay W., Peter M. 2004. *Tests for Building Confidence in System Dynamics Model*. North-Holland: Publishing Co.
- Gerston, Larry N. 2010. *Public Policy Making: Process and principles*. Ed. Ketiga. New York: M.E. Sharpe Inc.
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Meadows, Dennis. "System Thinking and Aplication to Global Natural resource Issues", paper pada Trainin.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Lampiran 1

Siagian P .Sondang. 1982. *Administrasi Pembangunan*: Konsep, dimensi, dan strateginya. Jakarta: Gunung Agung.

Sobandi, Baban. 2004. *Etika kebijakan publik*. Bandung: Penerbit Humaniora.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharto, Edi . 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sutisna, Endang. 2006. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Pulik*. Malang: UMM Press.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

_____, Mustapadidjaya. 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Yakin, Addinul. 2004. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan: Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presindo.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. “UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997”, diakses pada tanggal 03 Oktober dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/uu/uu_23_1997.pdf

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. “UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004,” diakses pada tanggal 03 Oktober dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/uu/uu_32_2004.pdf

Lampiran 1

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007. “UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007,” diakses pada tanggal 03 Oktober dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/uu/uu_26_2007.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. “UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009,” diakses pada tanggal 03 Oktober dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/uu/uu_32_2009.pdf

Artikel dan Jurnal Internet :

Setiawan, Cawi. 2010. *Penghijauan Lingkungan Sebagai Solusi Utama Agar Jakarta Tidak Terkena Banjir Besar Lagi*. diakses pada tanggal 13 september 2011 dari <http://sayangibumi.blogspot.com>

Raharjo, Budi. *Penghijauan Kota*. Diakses pada tanggal 13 September 2011 dari <http://claudiuskelvin.blogspot.com>

Greenlumut. 2008. *Hijau Bumiku-Lestari Alamku*. Diakses pada tanggal 20 September 2011 dari <http://greenlumut.blogspot.com>

Wirjatmi, Endang. 2010. *Systems Thinking*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2011 <http://diklatpimlan.files.wordpress.com>

Wibowo, Farid. 2009. *Kampanye Humas Malang Ijo Royo-Royo Sebagai Gerakan Sadar Penghijauan Pada Masyarakat*. Diakses pada tanggal 24 September 2011 <http://researchgate.net.com>

_____, 2008. *Malang Ijo Royo-Royo*. Diakses pada tanggal 24 September 2011 dari <http://pelajarpeduli.com>

Lampiran 1

LAMPIRAN 1

HASIL DOKUMENTASI

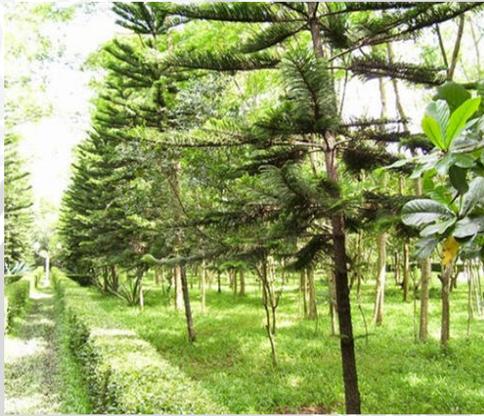


Foto: Hutan Kota Malabar sebagai Kawasan RTH



Foto: Taman Alun-alun sebagai Kawasan RTH



Lampiran 1



Foto: Sosialisasi oleh Kepala DKP Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH



Foto: Wakil Walikota Malang Menyerahkan bantuan bibit kepada Perwakilan Siswa



Foto: Devile Pasukan Kuning DKP



Foto: Sumbangan bibit pohon Oleh SMAN 5 pada DKP Kota Malang



Foto: Pemilihan Putri Lingkungan Kota Malang



Foto: Pawai Putri Lingkungan bersama elemen stakeholders

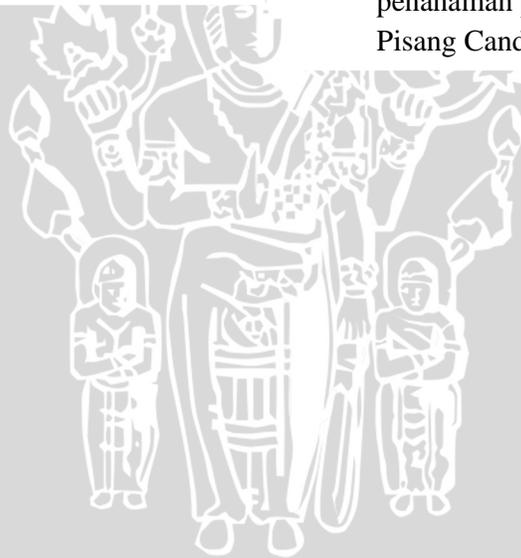
Lampiran 1



Foto: Pembuatan Sumur Resapan Air



Foto: Aksi gotong royong penanaman pohon di Kel. Pisang Candi Kec. Sukun



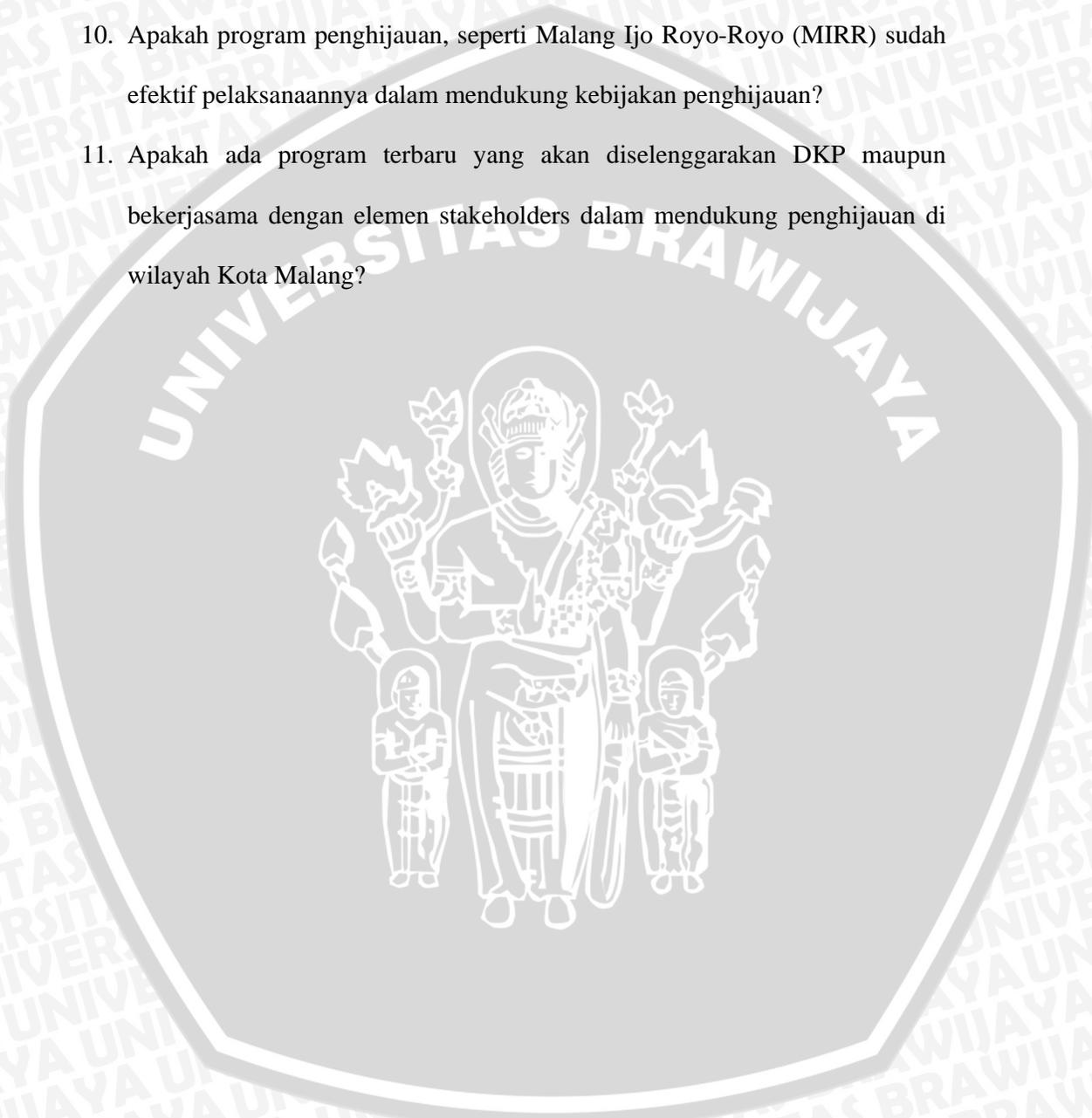
Lampiran 1

LAMPIRAN 2**DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana persoalan lingkungan hidup di kota malang?
 - a. Ketersediaan Ruang Terbukan Hijau (RTH)
 - b. Banjir dll.
2. Alasan apa yang menjadikan kegiatan penghijauan sebagai solusi dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup di kota malang?
3. Apakah terdapat Perda terkait dengan penghijauan Kota Malang? jika ada,
 - a. Bagaimana realisasi dari peraturan tersebut? efektif apa tidak.
 - b. Apakah Sanksi Administrasi maupun sanksi Pidana dalam Perda tersebut sudah efektif apa belum?
4. Apa saja program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam mendukung kebijakan penghijauan?
5. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan didukung oleh elemen stakeholders?
6. Apa saja kendala-kendala dalam merealisasikan program/kegiatan penghijauan di kota Malang, sehingga kedepannya faktor-faktor tersebut dapat diminimalisir
7. Apa saja faktor pendukung terkait kebijakan penghijauan di kota Malang, agar kedepannya hal tersebut dapat lebih dikembangkan lagi.
8. Program MIRR sendiri dilatarbelakangi atau dipelopori oleh siapa?

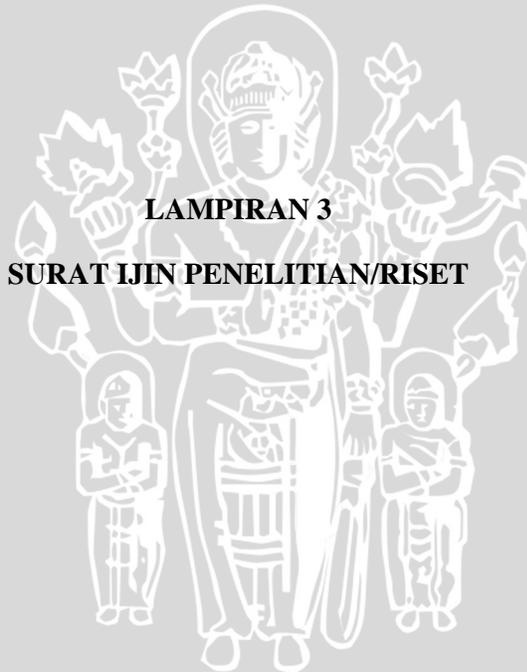
Lampiran 1

9. Sejak kapan pelaksanaan MIRR dimulai dan terakhir kapan program MIRR ini dilaksanakan?
10. Apakah program penghijauan, seperti Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) sudah efektif pelaksanaannya dalam mendukung kebijakan penghijauan?
11. Apakah ada program terbaru yang akan diselenggarakan DKP maupun bekerjasama dengan elemen stakeholders dalam mendukung penghijauan di wilayah Kota Malang?



Lampiran 1

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN 3

SURAT IJIN PENELITIAN/RISET



Lampiran 1

CURRICULUM VITAE

Nama : Asrawani Tambunan

Nomor Induk Mahasiswa : 0810310020

Tempat dan tanggal lahir : Tukka, 03 Juni 1990

Pendidikan : 1. SDN 1 Onan Tukka

Tamat tahun 2003

2. SMPN 1 Sibolga

Tamat tahun 2005

3. SMUN 1 (Plus) Matauli Pandan

Tamat tahun 2008

4. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas

Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Masuk tahun 2008

Pas Poto

3 x 4

Lampiran 1

